

**COMMUNITY EMPOWERMENT
DALAM INDUSTRI PARIWISATA**
*S*tudi Kasus di Bali

COMMUNITY EMPOWERMENT
DALAM INDUSTRI PARIWISATA
Studi Kasus di Bali

Oleh :
Ujud Tahajuddin
DTP. Kusumawardhani

Editor :
Rusdi Mochtar



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

© 2011 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Community Empowerment dalam Industri Pariwisata (Studi Kasus di Bali)/Ujud Tahajuddin, DTP. Kusumawardhani-Jakarta, 2011.

vi hlm + 176 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-602-221-099-3

1. Community Empowerment-Bali
2. Pariwisata - Industri

338. 47

Penerbit:

PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI)

Jl. Hibrida Raya Blok PD 14 No. 7

Kelapa Gading

Jakarta 14250

Telp: (021) 4508142



LIPI

*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232
Faks.: 021-5701232

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan salah satu bentuk partisipasi peneliti dalam mendorong perkembangan kepariwisataan yang memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Pada kesempatan ini peneliti berupaya mengidentifikasi potensi *community empowerment* yang eksis diimplementasikan oleh pelaku industri pariwisata, khususnya yang bergerak dalam sektor akomodasi pariwisata, dalam upaya memberdayakan kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat marginal lokal. Berdasarkan pada analisis terhadap model *community empowerment* yang eksisting, peneliti mencoba membangun model pemberdayaan yang dianggap memiliki nilai replikasi untuk dilakukan oleh pihak yang berkompeten dalam rangka membangun dan memacu perkembangan kepariwisataan yang bergandengan dengan perkembangan kehidupan masyarakatnya.

Dengan mengimplementasikan model *community empowerment* tersebut diharapkan bahwa kepariwisataan yang menjadi salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Indonesia dapat mengangkat pendapatan negara dalam bentuk devisa, ataupun pemeratakan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, memperluas lapangan usaha bagi masyarakat. Dengan demikian, secara keseluruhan pariwisata, pada gilirannya, dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dengan adanya hasil penelitian *community empowerment* ini diharapkan dapat mempermudah para pengambil kebijakan dan para pihak dalam memformulasikan kebijakan dan membangun program kegiatan yang mampu mengakselerasi pembangunan kepariwisataan yang memiliki *multiplier effect* bagi masyarakat.

Meskipun begitu, disadari bahwa hasil penelitian ini tentu saja tidak luput dari berbagai kekurangan. Untuk itu kami sangat menghargai bila ada pembaca yang bersedia memberi masukan baik berupa saran maupun kritik terhadap isi buku ini.

Akhir kata, kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mendukung kelancaran penelitian dan penulisan buku ini. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, Desember 2011

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan LIPI

Ttd.

Drs. Abdul Rachman Patji, MA
NIP.19520218 198002 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Penelitian	7
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian	8
1.4 Kerangka Teoritis	8
1.5 Metode Penelitian	22
1.5.1 Pendekatan	22
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumennya	23
1.5.3 Analisis Data	25
1.5.4 Lokasi Penelitian	25

BAB II PROFIL DAERAH PENELITIAN

27

2.1 Perkembangan Akomodasi Pariwisata di Bali	27
2.2 Profil Daerah Kabupaten Gianyar	38
2.3 Profil Kecamatan Gianyar	40

BAB III PELUANG MANFAAT SOSIAL EKONOMI INDUSTRI AKOMODASI PARIWISATA BAGI KOMUNITAS LOKAL

43

3.1 Peluang Manfaat Sosial Ekonomi	43
3.2 Respons Masyarakat Terhadap Perkembangan Industri Akomodasi	46

BAB IV
KONDISI, BENTUK-BENTUK PROGRAM
PEMBERDAYAAN PARIWISATA KOMUNITAS
MARJINAL LOKAL YANG PERNAH DAN SEDANG
DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN
DAERAH, SERTA RESPONS MASYARAKAT49

4.1	<i>Community Empowerment</i> Kementerian Pariwisata Melalui PNPM Mandiri	49
4.1.1	Pengertian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	51
4.1.2	Pendekatan dan Strategi	52
4.1.2.1.	Pendekatan	52
4.1.2.2.	Strategi	53
4.1.2.3.	Pendekatan fisik dilakukan melalui	54
4.1.2.4.	Pendekatan nonfisik dilakukan melalui	55
4.1.3	Kelompok sasaran dan Penerima Manfaat PNPM Mandiri Pariwisata	56
4.1.3.1.	Kelompok Sasaran PNPM Mandiri Pariwisata	56
4.1.3.2.	Penerima Manfaat PNPM Mandiri Pariwisata	57
4.1.4	Bantuan Program PNPM Mandiri Pariwisata	57
4.1.4.1.	Bantuan untuk Masyarakat	57
4.1.4.2.	Bantuan untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Swasta Lainnya	58
4.2	Pemberdayaan Masyarakat Melalui PNPM Mandiri dan Respons Dinas Pariwisata	58
4.3	Respons Pengusaha Akomodasi Terhadap PNPM Mandiri	61
4.4	Upaya <i>Community Empowerment</i> Pemerintah Daerah Provinsi Bali	62
4.5	<i>Community Empowerment</i> Dinas Pariwisata Provinsi Bali	65
4.5.1	Program Pemberdayaan Dinas Pariwisata Melalui Pengembangan Desa Wisata	65
4.5.2	Program Pemberdayaan Dinas Pariwisata Melalui Bimbingan Teknis (Bintek)	69
4.5.3	Pemberdayaan Pramuwisata Melalui Perubahan Kebijakan Dinas Pariwisata	73
4.5.4	Program Pemberdayaan Dinas Pariwisata Melalui Bimbingan Masyarakat	76

4.6	<i>Community Empowerment Bali CBT Center (Bali Community Based Tourism Center)</i>	77
4.7	<i>Community Empowerment</i> Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi Bali	83
4.7.1	Kebijakan	83
4.7.2	Proses dan Program Pemberdayaan Disperindag Provinsi Bali	84
4.8	<i>Community Empowerment</i> Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali	87
4.8.1	Kebijakan	87
4.8.2	Proses dan Program <i>Community Empowerment</i> Pada Industri Akomodasi	89
4.9	<i>Community Empowerment</i> Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar melalui Program PNPB Mandiri dan Kemitraan	91

BAB V

KONDISI, BENTUK-BENTUK PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MARJINAL LOKAL YANG PERNAH DAN SEDANG DILAKUKAN SEKTOR AKOMODASI, SERTA RESPONS MASYARAKAT 105

5.1	<i>Community Empowerment</i> Dari Pengusaha Akomodasi.....	105
5.2	<i>Community Empowerment</i> PT. BTDC (BUMN)	111
5.2.1	Kronologi Pembangunan PT BTDC	111
5.2.2	Pemberdayaan Masyarakat Langsung dalam Kebijakan PT BTDC	115
5.2.3	Pemberdayaan Masyarakat Tidak Langsung Dari Kebijakan dan Eksistensi PT BTDC	117
5.2.4	<i>Community Empowerment</i> PT BTDC dalam Bidang Pendidikan	119
5.2.5	<i>Community Empowerment</i> PT BTDC di Bidang Ekonomi	122
5.3	<i>Community Empowerment</i> Dari PHRI	128
5.4	<i>Community Empowerment</i> Bali Hotel Association (BHA)	132
5.4.1	Manajemen Organisasi Bali Hotel Association (BHA)	132
5.4.2	Kebijakan Program <i>Community Empowerment</i> Bali Hotel Association (BHA)	133
5.4.3	Program, Proses, dan Respons Masyarakat Terhadap <i>Community Empowerment</i> yang Dilakukan BHA (Contoh Kasus desa Bedulu)	136

5.4.4	Respons dan Partisipasi BTDC dalam <i>Community Empowerment</i> BHA	150
5.4.5	Respons Pemerintah Daerah terhadap <i>Community Empowerment</i> BHA	152

BAB VI
RINGKASAN HASIL PENELITIAN 157

BAB VII
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 167

7.1	Kesimpulan	167
7.2	Rekomendasi	170

DAFTAR PUSTAKA 173

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata dunia yang semakin berkembang dari tahun ke tahun membuka peluang besar bagi negara-negara yang memiliki obyek dan daya tarik wisata untuk meraup devisa dan mengentaskan kelompok marjinal dari kemiskinan melalui penyerapan dan penciptaan kesempatan/lapangan kerja. Pada tahun 1989, WTO (*World Tourism Organization*) telah mengestimasi bahwa pariwisata, baik langsung atau tidak langsung, menciptakan 74 juta pekerjaan di dunia. Berdasarkan perhitungan *World Travel and Tourism Council*, diperkirakan delapan persen lapangan pekerjaan di Indonesia pada tahun 1997 disediakan oleh sektor pariwisata atau sama dengan satu dari 12,6 pekerjaan.¹

Dari segi kesempatan kerja dan pendapatan, khususnya di Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memperkirakan bahwa kesempatan kerja yang tercipta dari industri pariwisata pada tahun 2009 mencapai 12,5 juta orang dengan jumlah pendapatan mencapai lebih dari Rp225 trilyun.² Setyanto P. Santosa (2004) juga menyatakan hal yang sama, bahwa sektor pariwisata merupakan penyedia kesempatan kerja yang sangat dominan, yakni 10 persen dari lapangan kerja di Indonesia dengan 7,3 juta tenaga kerja langsung dan lima juta tenaga kerja tidak langsung. Artinya, jika kemajuan pariwisata terhambat maka ketersediaan lapangan kerja ikut terganggu. Oleh karena itu, harus dirancang berbagai strategi yang dapat menciptakan lapangan kerja atau paling tidak mempertahankan agar jumlah tenaga kerja yang ada tidak berkurang.³

¹ <http://www.terranet.or.id/mitra/p2par/dokumen/masukan1325.pdf>.

² *Ibid*

³ Setyanto P. Santosa (13 Januari, 2004): Artikel Mengenal Daya Saing Pariwisata Indonesia, http://kolom.pacific.net.id/ind/setyanto_p.santosa/artikel_setyanto_p.santosa/mengenal_daya_saing_pariwisata_Indonesia.html

Belakangan ini ada kecenderungan sektor pariwisata Indonesia semakin melemah. Neraca Satelit Pariwisata menunjukkan, bahwa penyerapan tenaga kerja tahun 2008 turun menjadi 7,52 juta orang dengan jumlah pendapatan sebesar Rp99,24 trilyun dibandingkan penyerapan tenaga kerja tahun 2004 sebanyak 8,49 juta orang dengan jumlah pendapatan mencapai Rp113,78 trilyun. Meskipun pada tahun 2005 jumlah pendapatan meningkat lagi menjadi Rp146,80 trilyun, namun penyerapan tenaga kerja tetap kecil, yakni sebanyak 6,55 juta orang (Nesparnas 2004, 2006).

Selain itu, pariwisata Indonesia juga semakin kalah dalam persaingan dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara walaupun Indonesia demikian kaya dengan keanekaragaman budaya dan alam yang indah dan memukau. Pada tahun 1999, Indonesia menerima kunjungan hanya sekitar lima juta wisatawan atau 14 persen dari seluruh pengunjung wisatawan asing ke wilayah Asia Tenggara, sedangkan kunjungan wisatawan ke Singapura sebanyak 21 persen, ke Malaysia 24 persen, dan ke Thailand 26 persen. Kondisi pariwisata Indonesia ternyata kemudian semakin buruk. Pada tahun 2006 kunjungan wisatawan ke Indonesia turun secara drastis menjadi 4,8 juta (8,6 persen), sedangkan ke Singapura mencapai 9,7 juta (17,1 persen), ke Thailand sebanyak 13,8 juta (24,4 persen), dan ke Malaysia melejit tajam sebanyak 17,5 juta kunjungan wisatawan (31 persen).⁴

Biro Pusat Statistik (BPS) memperkirakan kontribusi dari kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2006 terhadap ekonomi Indonesia sebesar US \$ 4,47 miliar atau menurun 2,22% dibandingkan pada tahun 2005 yang mencapai sebesar US \$ 4,52 miliar. BPS juga mencatat bahwa wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada tahun 2007 meningkat menjadi 5.505.759 orang, dan pada tahun 2008

⁴ Wuryastuti Sunario (1987), *Perlu Management Handal Untuk Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Indonesia*, (Penulis adalah mantan Direktur Eksekutif Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan pengamat pariwisata). www.geografiana.com/nasional/wisata/ *belum-optimal-pengelolaan-pariwisata-alam-indonesia-*

meningkat lagi sebesar 13,24% menjadi 6.234.497 orang. Rata-rata wisatawan mancanegara menghabiskan waktu di Indonesia (*length of stay*) sekitar 9 hari dengan pengeluaran perhari sekitar US \$ 100. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia antara lain karena pengaruh dari dicabutnya *travel warning* yang dikeluarkan Amerika dan negara-negara Eropa.⁵

Sekalipun secara pendapatan ekonominya cenderung menurun, pariwisata tetap merupakan aktivitas ekonomi dan sosial yang penting bagi Indonesia. Terlebih lagi Organisasi Pariwisata Dunia (2001) memprediksi angka kedatangan internasional di seluruh dunia akan meningkat dari 565 juta di tahun 1995 menjadi hampir 1,6 milyar pada tahun 2020, dan penerimaan (*receipts*) dari pariwisata internasional (di luar transport) diperkirakan mencapai US \$2 triliun.⁶ Di antara 1,6 milyar wisatawan tersebut, 438 juta orang akan berkunjung ke kawasan Asia-Pasifik dan 100 juta orang ke Cina.⁷ *Trend* naik ini terus berlanjut, karena melakukan perjalanan sudah menjadi bagian dari *life-style* masyarakat dunia. Dalam kondisi resesi sekalipun, frekuensi perjalanan tidak terlalu terpengaruh, kecuali membatasi alokasi uang yang dibelanjakan.

Data tentang pertumbuhan pariwisata dunia menunjukkan, bahwa Eropa merupakan kawasan yang paling mendominasi dengan 403,2 juta kedatangan wisatawan dan 56,6 persen pangsa pasar (*market share*). Namun, dari rata-rata pertumbuhan dapat dikenali bahwa Asia Pasifik menjadi kawasan yang paling berkembang di tahun-tahun mendatang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,6 persen per tahun.⁸

⁵http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=16¬ab=16.

⁶ 9810Ringkasan Eksekutif-Bidang Pariwisata.pdf(application/pdf object)-Mozilla Firefox.

⁷ Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI (2006), Rencana strategi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 2005–2009, Jakarta.

⁸ [http://kppo.bappenas.go.id/files/9810RINGKASAN_EKSEKUTIF - BIDANG PARIWISATA.pdf](http://kppo.bappenas.go.id/files/9810RINGKASAN_EKSEKUTIF_-_BIDANG_PARIWISATA.pdf)

Kendati di satu sisi terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah wisatawan, namun pada sisi lain pariwisata Indonesia akan menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk merebut pangsa pasar pariwisata dunia. Menyikapi dua hal tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009 pemerintah menekankan pentingnya meningkatkan kontribusi sektor non-migas dalam perolehan devisa menjadi sekitar USD 10 miliar pada tahun 2009 dengan meningkatkan pariwisata sebagai penghasil devisa besar. Pariwisata tetap menjadi prioritas pada tahun-tahun mendatang, dan merupakan salah satu isu strategis dalam RPJM 2010-2014, yang berpeluang menarik minat wisatawan mancanegara sekaligus menjadikan Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia.

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam RPJM 2010-2014 adalah :

- (a) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2014 (dalam juta orang)
- (b) Meningkatnya perolehan devisa pada tahun 2014 (dalam USD)
- (c) Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara pada tahun 2014 (dalam jumlah perjalanan wisnus)
- (d) Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional pada tahun 2014 (dalam persentase)
- (e) Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDB Nasional (dalam persentase)
- (f) Meningkatnya jumlah investasi dalam industri pariwisata baik PMA maupun PMDN pada tahun 2010-2014 (dalam banyaknya perusahaan)
- (g) Meningkatnya nilai investasi dalam industri pariwisata baik PMA maupun PMDN (dalam USD atau IDR).

Sekalipun pariwisata memberikan dampak positif terhadap ekonomi, khususnya dalam penyerapan dan penyediaan lapangan kerja baru, pengembangannya perlu dilakukan secara hati-hati dengan memerhatikan aspek-aspek yang lain. Berbagai studi tentang pariwisata menunjukkan bahwa pengembangan suatu daerah wisata atau kunjungan wisatawan memberikan dampak, baik yang bersifat positif seperti

modernisasi, peningkatan pendapatan, peningkatan infrastruktur dan sebagainya, maupun yang bersifat negatif seperti perubahan sosial, ketimpangan sosial dan ekonomi, kehancuran budaya lokal, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kondisi lingkungan, baik fisik maupun sosial sangat penting diperhatikan agar pengaruh negatif dari pariwisata dapat dieliminasi.⁹ Pariwisata juga dapat mendorong tumbuhnya upaya pelestarian budaya, sejarah, dan perlindungan lingkungan. Sebaliknya, ia sekaligus juga dapat menghancurkan semuanya. Pariwisata akan bermanfaat atau sebaliknya sangat bergantung pada ketepatan perlakuan terhadapnya dan strategi yang digunakan dalam menjalankan dan mengembangkannya.

Kehadiran pariwisata di suatu daerah dan sekaligus pengembangannya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat daerah tersebut. Dalam konteks sosio-ekonomi dan sosio-budaya, keterlibatan masyarakat lokal secara partisipatif, khususnya yang terpinggirkan oleh pembangunan, sangat penting. Dengan begitu, mereka ikut menikmati manfaat dari pariwisata di daerah mereka. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata hendaklah berbasis pada *community empowerment*. Semua obyek wisata, baik alam, budaya, maupun obyek wisata lainnya tidak akan menarik bagi wisatawan untuk dikunjungi, apalagi tinggal berlama-lama, jika tidak memiliki nilai tambah dalam bentuk pelayanan terbaik oleh masyarakat lokal dan tingginya perhatian terhadap pemeliharaan lingkungan. Wisatawan biasanya tertarik datang, tinggal dalam waktu relatif lama, dan kembali lagi ke suatu daerah wisata jika masyarakatnya bersikap ramah, hangat, memberikan rasa aman, dan peduli dengan lingkungan.

Persoalannya, seringkali pariwisata dilihat hanya sebagai suatu bisnis yang diukur secara kuantitatif. Padahal, untuk mengembangkan pariwisata perlu juga memerhatikan sisi kualitatif hubungan antar manusia, sebagaimana dinyatakan oleh Rob Dodson dan J.J. Courtney. Mereka menyatakan,

⁹Tahajuddin, Ujud, dkk., (1995), “*Aspek Sosial Budaya Industri Pariwisata*”, Seri Penelitian PMB-LIPI, Jakarta.

“So often is tourism seen purely as a business, illustrated by income, expenditure, arrivals, departures, foreign exchange earnings... If we are to develop an appropriate understanding of tourism, we need to take into account the qualitative human interaction as well as the quantitative data that is so frequently emphasized.”¹⁰

Sisi kualitatif hubungan antar manusia dalam pariwisata dan pengembangannya diartikan sebagai pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) marjinal lokal yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial karena pembangunan. Dalam forum *International Conference on Cultural Tourism and Local Communities 2006* yang berlangsung di Yogyakarta, dan diikuti oleh lebih dari 350 peserta dari 31 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika, pimpinan *United Nations World Tourism Organization* (UN-WTO) menegaskan kemungkinan dikembangkannya pariwisata untuk menegakkan sektor ekonomi yang pada ujungnya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.¹¹

Pesan dan ajakan moral tersebut sejatinya relevan dengan kondisi ekonomi dan pembangunan di Indonesia saat ini, di mana berdasarkan garis kemiskinan yang diukur dari pendapatan per kapita sebanyak US\$ 2 per hari, sekitar 31,5 juta penduduk tergolong miskin. Angka kemiskinan tersebut akan meningkat tajam jika ambang batas garis kemiskinan sedikit dinaikkan. Apalagi jika kemiskinan dilihat dari penduduk yang mendapatkan subsidi beras bagi rakyat miskin atau ‘raskin’ yang berjumlah lebih dari 40 juta, dan penduduk yang mendapatkan peluang untuk memperoleh pelayanan jaminan kesehatan masyarakat atau ‘jaskesmas’ yang berjumlah di atas 70 juta jiwa.¹²

¹⁰ Rob Dodson and J.J. Courtney, (1994), *Ticket to Thailand: A Study of Tourism*, Assumption University Press. Bangkok

¹¹Ki Supriyoko (2006) Dari *International Conference on Cultural Tourism 2006* di Yogyakarta: Pariwisata Sebagai Pilar Ekonomi.

¹² Lihat : <http://suarapembaca.detik.com/read/2011/02/08/104850/1562321/471/salah-tafsir-data-kemiskinan>

Ki Supriyoko juga menegaskan peran pariwisata saat ini sebagai sektor sangat strategis dan penting dalam pembangunan ekonomi bangsa-bangsa di dunia pada umumnya. Salah satu kontribusi penting dari pengembangan sektor pariwisata adalah pemberdayaan masyarakat atau komunitas lokal.¹³

Dengan mengacu kepada kondisi pariwisata dan kecenderungan perkembangannya ke depan, baik di tingkat global, regional Asia Pasifik dan Asia Tenggara maupun khususnya di Indonesia; juga peluang kemanfaatannya secara ekonomi bagi komunitas di daerah tujuan wisata sebagaimana dinyatakan di atas, maka pariwisata Indonesia dan pengembangannya seyogyanya ikut melibatkan partisipasi komunitas lokal, khususnya yang terpinggirkan karena pembangunan. Dengan demikian, komunitas lokal juga ikut menikmati manfaat ekonomi yang menyertainya. Pengembangan pariwisata hendaknya juga mempertimbangkan faktor lingkungan, baik daya dukung maupun pemeliharannya sebagai bagian tak terpisahkan dari pariwisata dan keberlanjutannya. Ke arah maksud tersebutlah penelitian tentang *community empowerment* dalam industri pariwisata ini ditujukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian tentang *community empowerment* dalam industri pariwisata menjadi penting dilakukan untuk memberi masukan kepada para pengambil kebijakan dalam merumuskan model pembangunan industri pariwisata yang menghasilkan *mutual benefits* bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terdiri dari masyarakat, industri pariwisata, dan pemerintah.

1.2 Masalah Penelitian

Dengan mengacu latar belakang di atas, maka industri pariwisata seyogyanya harus dapat memberi stimulan untuk berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat lokal, khususnya

¹³ Ki Supriyoko (2006) Dari *International Conference on Cultural Tourism 2006* di Yogyakarta: Pariwisata Sebagai Pilar Ekonomi.

komunitas lokal yang terpinggirkan, ke arah peningkatan harkat dan martabatnya secara ekonomi, khususnya dalam penyerapan dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini ialah:

- (1) Peluang manfaat sosial ekonomi apa saja yang tersedia bagi komunitas lokal dalam industri pariwisata?
- (2) Bagaimana kondisi dan bentuk-bentuk upaya atau program pemberdayaan komunitas marginal lokal yang pernah dan sedang dilakukan oleh *stakeholders* industri pariwisata?
- (3) Sejauh mana respon komunitas lokal, khususnya yang terpinggirkan, dalam menangkap peluang ekonomi dari pariwisata, dan keterlibatannya dalam program-program pemberdayaan?

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan alternatif rumusan kebijakan penguatan kapasitas negara dan masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat komunitas marginal lokal secara sosial dan ekonomi dalam pusran arus pembangunan dengan mengoptimalkan manfaat sosial ekonomi industri pariwisata dalam sektor akomodasi, khususnya dari aspek pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan penyerapan serta penciptaan lapangan kerja.

Adapun sasaran penelitian ini adalah untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi *stakeholders* pariwisata dalam merumuskan strategi-strategi pemberdayaan komunitas marginal lokal di daerah tujuan wisata pada sektor akomodasi pariwisata.

1.4 Kerangka Teoritis

Berdasarkan rekomendasi *International Union of Office Travel Organization* (IUOTO) dan *World Tourism Organization* (WTO), pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Wisatawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan

perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi di luar tempat tinggal biasanya atau keluar dari lingkungan tempat tinggalnya termasuk ke negara lain untuk periode kurang dari 12 (dua belas) bulan dan memiliki tujuan untuk melakukan berbagai aktivitas wisata. Terminologi ini mencakup penumpang kapal pesiar (*cruise ship passenger*) yang datang dari negara lain dan kembali dengan catatan bermalam.¹⁴

Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa pariwisata perlu dikembangkan, yaitu:

- *Greater disposable income available for travel*
- *Less working hours and a large number of employees who receive paid holidays and annual vacations, thus providing the leisure time for travel*
- *Higher education levels and greater awareness of other areas of the world, leading to a desire of more persons to travel*
- *Rapid and dispersed economic development leading to greatly increased business travel*
- *Major improvements in transportation including in air travel services and highway networks.*¹⁵

Alasan di atas memperlihatkan adanya peluang untuk mengembangkan pariwisata sebagai akibat dari peningkatan pendapatan; makin sedikitnya waktu kerja dan meningkatnya waktu luang; adanya peningkatan pendidikan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menyebar; serta adanya perbaikan dalam teknologi transportasi. Peluang tersebut tentunya perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pengembangan pariwisata Indonesia secara berkelanjutan. Dalam konteks pengentasan masyarakat dari kemiskinan,

¹⁴Lihat <http://visit-to-indonesia.blogspot.com/2007/09/konsep-dan-definisi-pariwisata.html> dan <http://id.wikipedia.org/wiki/pariwisata>.

¹⁵ Inskeep, Edward (1991), *Tourism Planning : An Integrated and Sustainable Development Approach*. VNR Tourism and Commercial Recreation Series. New York, Van Nonstrand Reinhold.

peluang tersebut harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pengembangan pariwisata Indonesia secara berkelanjutan.

Sejauh ini telah banyak penelitian yang terkait dengan pariwisata, sebagai contoh, penelitian tentang “Aspek Sosial Budaya Industri Pariwisata” yang dilakukan oleh PMB-LIPI dari tahun 1994 - 1997. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di daerah-daerah penelitian (Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bali, Maluku) umumnya setuju daerah mereka dijadikan DTW (daerah tujuan wisata), karena akan berdampak positif bagi peningkatan pendapatan, memperluas kesempatan kerja dan usaha, serta memperluas pergaulan.

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya dilakukan modifikasi terhadap seni budaya mereka agar lebih atraktif dalam menarik perhatian wisatawan. Hasil lainnya, adanya dukungan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata melalui penyebaran informasi kepariwisataan, khususnya tentang keberadaan obyek wisata yang terdapat di daerah. Mereka juga menginginkan dilakukannya peningkatan kualitas seluruh bentuk pelayanan kepariwisataan.

Sementara itu berbagai hasil penelitian lainnya memperlihatkan dampak sosial-budaya pariwisata terhadap masyarakat yang cukup beragam, baik positif maupun negatif sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Dampak Sosial-Budaya Pariwisata Menurut Beberapa Penulis

Penulis	Dampak yang teridentifikasi
De Kadt (1979)	<ul style="list-style-type: none"> • Kesenian, kerajinan dan berbagai aspek kebudayaan lokal bisa mengalami revitalisasi • Kontak dengan wisatawan memengaruhi perilaku/sikap/nilai terhadap wisatawan atau pariwisata
Matheson dan Wall (1982)	<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata telah mengubah struktur internal dalam masyarakat, sehingga terjadi perbedaan antara mereka yang mempunyai hubungan dengan pariwisata dan mereka yang tidak. Jadi keterkaitan pariwisata menjadi salah satu pemisah atau pembeda dalam masyarakat.
Murphy (1985)	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi akulturasi yang dapat dilihat dari perubahan perilaku masyarakat lokal • Kalangan muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap <i>demonstration effect</i>. Tetapi sesungguhnya pembelajaran bahasa asing juga melalui proses yang sejalan dengan proses <i>demonstration effect</i> ini.
Krippendorf (1987)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman yang riil atau komunikasi yang efektif jarang terjadi dalam interaksi <i>host-guest</i>. • Pariwisata mempunyai sifat kolonialistis, sehingga merebut independensi masyarakat lokal di dalam proses pengambilan keputusan.
Cohen (1988)	<ul style="list-style-type: none"> • Ada kesan terjadinya dampak negatif akibat adanya komoditisasi
Nunez (1989)	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi proses akulturasi budaya
Urry (1991)	<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata memberikan peluang kepada wanita untuk secara-ekonomi lebih independen
Harrison (1992)	<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata membawa berbagai peluang baru bagi masyarakat, dan mendorong berbagai bentuk perubahan sosial.
McKercher (1993)	<ul style="list-style-type: none"> • Selalu ada konflik antara wisatawan dengan masyarakat lokal, karena permintaan tidak nyambung (<i>incompatible demands</i>). • Pariwisata membawa investasi secara tidak seimbang, karena terfokus pada <i>profit centre</i> (misalnya kolam renang, hotel, dst), dan bukan pada <i>cost centre</i> (misalnya fasilitas pengolahan sampah, drainase, dst).

<p>Sharpley (1994)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebudayaan selalu beradaptasi, termasuk dengan industri pariwisata. Tetapi dalam prosesnya kebudayaan cenderung kehilangan makna dan otentisitasnya demi kepentingan pariwisata, meskipun akulturasi merupakan proses yang wajar dalam setiap pertemuan antarbudaya. • Pariwisata merangsang munculnya komunikasi di dalam masyarakat lokal. Pariwisata memberikan kontribusi nyata di dalam pelestarian bangunan-bangunan bersejarah atau keagamaan. • Masyarakat lokal mengadopsi bahasa asing sesuai kebutuhan. • Masyarakat membuat stereotip tentang perilaku wisatawan. • Terjadi komoditisasi dari aspek-aspek keagamaan yang memunculkan konflik. • Peluang kerja dan kehadiran tamu merangsang kaum muda untuk pindah ke lokasi di mana pariwisata berkembang.
<p>Burns and Holden (1995)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat mengembangkan berbagai mekanisme untuk beradaptasi, dan sering berusaha mengurangi kontak dengan wisatawan bila memungkinkan. • Kebudayaan dipandang sebagai sumber daya komersial. • Pariwisata memberikan keuntungan sosial-ekonomi pada satu sisi, tetapi di sisi lain membawa ketergantungan dan ketimpangan sosial atau memperparah ketimpangan yang telah ada. Pariwisata juga menyebabkan terjadinya <i>overcrowding</i> yang menyebabkan berbagai masalah sosial.
<p>McIntosh et.al (1995)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidaksenangan muncul akibat gap ekonomi antara wisatawan dengan masyarakat. • Muncul ketidaksenangan karena pariwisata menyebabkan terjadinya inflasi, sehingga masyarakat lokal tidak mampu membeli barang-barang yang dibutuhkannya.

Sumber: Diolah dari Brunt and Courtney: 496-497.

Terlepas dari dampak positif dan negatif yang diperlihatkan oleh berbagai hasil penelitian di atas, realitasnya industri pariwisata merupakan industri dunia terbesar yang banyak dimanfaatkan sebagai mesin pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

*Tourism is one of the world's largest industries, increasingly promoted as an engine for development and poverty alleviation. According to the World Tourism Organization (WTO), a UN specialised agency and leading organisation in the field, tourism represents approximately 7 percent of worldwide export of goods and services. This share increases to 30 percent when considering service export exclusively.*¹⁶

Masalahnya yang perlu diperhatikan dalam industri pariwisata adalah bagaimana mengembangkan strategi untuk menarik manfaat (*benefit*) seluas-luasnya dari eksistensi industri pariwisata bagi komunitas dan pemerintah lokal daerah. Dengan begitu diharapkan terciptanya suatu hubungan yang harmonis dan saling pengertian/menguntungkan antara industri pariwisata dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan perkembangan industri pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya kepariwisataan, baik alam, sosial, ekonomi, maupun budaya, harus diorientasikan untuk meningkatkan kemakmuran kelompok masyarakat, utamanya kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar DTW. Untuk itu, kebijakan pengembangan pariwisata perlu mengacu pada model pembangunan yang memihak kepada masyarakat.

Dalam konteks keberpihakan kepada masyarakat, model pembangunan ekonomi Indonesia yang selama ini sangat mengandalkan pendekatan pertumbuhan yang diharapkan menghasilkan 'kue' pembangunan yang besar sehingga dapat didistribusikan kepada berbagai lapisan penduduk secara merata, *trickle down effects*, dalam kenyataannya mengalami kegagalan. Hal ini terjadi karena dalam mengimplementasikan model pertumbuhan tersebut terjadi hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan, sekalipun kondisi ini tidak spesifik Indonesia. Pada tahun 1970-an

¹⁶Camelia M. Tepelus (2006), A Model for Multi-stakeholder Partnerships on Human Right in Tourism, dalam Jan Jonker dan Marco de Witte (Editors), *Management Models for Corporate Social Responsibility*, Springer Berlin-Heidelberg, Germany

banyak negara berkembang yang juga sangat mengandalkan pertumbuhan dihadapkan pada terjadinya ketimpangan pendapatan yang semakin melebar antar lapisan masyarakat.

Dengan gagalnya upaya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam model pembangunan yang mengandalkan pada pertumbuhan ekonomi, maka kemudian muncul pendekatan kebutuhan dasar, *basic need approach*.¹⁷ Dalam mengimplementasikan pendekatan ini, pemerintah mencoba memberikan bantuan kepada masyarakat kelompok bawah melalui program-program bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Dari berbagai pengukuran yang dilakukan, pendekatan tersebut juga gagal mencapai sasaran, karena bantuan yang diberikan ternyata tidak menunjang kreativitas kegiatan masyarakat. Yang terjadi, masyarakat justru menganggap bahwa pemberian bantuan tersebut merupakan kewajiban pemerintah. Akibatnya, masyarakat yang dibantu cenderung menuntut terus adanya bantuan.

Kegagalan dua pendekatan di atas, yakni pendekatan "*trickle down effect*" dan "*basic needs*" yang tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal, kini memunculkan pendekatan baru, yakni *community-based development approach*. Pendekatan pembangunan berbasis masyarakat ini kemudian diadopsi oleh banyak negara berkembang menjadi model pembangunan alternatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat diposisikan sebagai subyek utama dari sasaran pembangunan melalui pemberian keterampilan. Dalam implementasinya, model ini menggunakan pendekatan partisipasi. Masyarakat strata bawah difasilitasi agar mampu memperbaiki diri dan tidak bergantung pada pihak lain. Melalui berbagai peningkatan keterampilan tersebut, mereka diharapkan mampu membina kemitraan dengan pihak lain karena ada

¹⁷Untuk mencapai sasaran pendekatan pembangunan yang mengacu pada kebutuhan dasar manusia tersebut, terlebih dahulu perlu disusun beberapa indikator pembangunan. Baru kemudian disusun berbagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan baik sosial, ekonomi dan budaya.

hubungan resiprositas yang bersifat *simbiosis mutualistis* (saling menguntungkan).

Dalam konteks pengembangan pariwisata, strategi pembangunan yang dikembangkan tentunya harus bergerak dalam koridor *sustainable development*, khususnya *sustainable tourism* yang menekankan beberapa aspek, seperti sisi kualitas pengalaman para wisatawan ketika berkunjung, kualitas hidup masyarakat tempatan, dan keberlanjutan sumber daya untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, keberlanjutan dalam konteks ini meliputi strategi menyeimbangkan keuntungan bagi para *stakeholders* (komunitas lokal, industri, dan wisatawan), baik dari sisi ekonomi, lingkungan maupun *community development*. Khusus dalam konteks *community development*, pengembangan pariwisata bukan hanya harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal melainkan harus pula memerhatikan tuntutan sosial dari masyarakat sekitar.

Community development adalah sebuah konsep pembangunan yang cukup luas, meliputi konsep tentang penguatan/ pemberdayaan masyarakat atau *community empowerment* yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Substansi dari implementasi *community development* adalah penguatan/ pemberdayaan masyarakat. Artinya, komunitas yang diberdayakan pada gilirannya harus bisa mandiri. Namun demikian, disadari bahwa pelaksanaan *community empowerment* memerlukan proses dan komitmen dari para pemangku kepentingan yang terdiri dari masyarakat, pemerintah lokal, dan agen-agen pembangunan.

Secara konseptual dalam ekonomi pembangunan, esensi pendekatan *empowerment* adalah mobilisasi upaya-upaya untuk menolong diri sendiri (*self-help*) dari masyarakat kurang beruntung dan bukannya memberikan kesejahteraan sosial kepada mereka. *Economic empowerment* juga berarti penguatan masyarakat yang kurang beruntung atau yang terpinggirkan (*marginalized*). Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai peluang untuk memenuhi kebutuhan minimal, kehilangan kepercayaan diri, dan ketergantungan kepada belas kasihan orang lain yang dapat menimbulkan problem psikologis, sosial dan

bahkan mental terhadap mereka. Karena itu, pemberdayaan dalam konteks *empowerment*, merupakan suatu proses untuk mendapatkan peluang-peluang dasar tersebut, baik secara langsung oleh diri sendiri maupun dari kelompok yang beruntung. Dengan kata lain *empowerment* adalah usaha-usaha aktif dalam mengembangkan kemampuan diri untuk memperoleh peluang-peluang pemenuhan kebutuhan sendiri agar tidak tergantung kepada pihak lain.

Salah satu strategi *empowerment* adalah membantu masyarakat marginal membuat organisasi nir-labanya sendiri, karena mereka lah yang mengetahui apa yang paling mereka butuhkan. Sebab, kontrol organisasi oleh pihak luar mengakibatkan mereka masuk ke dalam marginalisasi selanjutnya. Sebagai contoh, organisasi kedermawanan yang dibawa dari luar dapat melemahkan (*disempower*) komunitas bersangkutan karena dapat menimbulkan sikap ketergantungan. Suatu organisasi nir-laba sesungguhnya dapat menciptakan strategi-strategi yang mengakibatkan terjadinya perubahan struktural dan berkurangnya ketergantungan. Suatu organisasi nir-laba yang dikelola oleh komunitas lokal akan membuahkan berbagai manfaat seperti, dapat membuat agenda dan perencanaan sendiri, mencari sumber daya yang dibutuhkan, melakukan pekerjaan secara maksimal, dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil yang ditetapkan. Sebab, bila tidak maka akan mengalami kegagalan.¹⁸

'*Empowerment*' berasal dari kosakata politik (eksternal) yang berarti memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada orang lain, dan juga menjelaskan perilaku manusia (internal). Makna lainnya ialah berdaya dari dalam diri sendiri melalui pengetahuan baru, penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri, inisiatif, dan kesadaran yang tinggi, yang akhirnya memberikan kekuatan kepada individu secara politis (eksternal) dan internal dalam bentuk perilaku untuk bertindak sesuai dengan keinginan individu yang bersangkutan.

¹⁸Lihat *Empowerment* dalam Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Empowerment#The_process_of_empowerment.

Empowerment juga berarti proses pengelompokan di mana mereka yang kurang memiliki sumber daya berkesempatan luas untuk memperoleh dan mengendalikan sumber daya yang ada. Keshab Kumar Pokhrel menjelaskan hal ini sebagai berikut:

*“When individuals are capable of obtaining their basic needs and controlling their resources, they are empowered. Otherwise, they are dis-empowered to some extent. If you want to empower some one, we must surrender control, giving up some of our own power in order that the so-called ‘powerless’ may discover their power.”*¹⁹

Masyarakat yang diberdayakan dapat menjadi suatu kekuatan besar bagi perubahan. *Empowerment* yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan eksternal dan internal umum digunakan dalam proyek-proyek pembangunan, gerakan-gerakan perempuan, pendidikan, dan program-program kesejahteraan dan bantuan keluarga. Masyarakat yang berdaya (*empowered communities*) mampu membuat keputusan dan melakukan tindakan kolektif untuk meraih cita-cita bersama. Dengan demikian, sektor ekonomi mereka akan berkembang, dan masyarakat akan menjadi mandiri dan mampu menjamin kebutuhan sendiri, berhubungan dengan orang lain dengan percaya diri, dan mengetahui sumber daya yang ada untuk digunakan bagi pembangunan dalam proses *community empowerment*. Seperti di Nepal, *community empowerment* merupakan proses di mana orang-orang miskin dan terpinggirkan sadar akan kekuatan mereka untuk menyampaikan masalah-masalah mereka sendiri. Bila orang miskin menyadari kekuatan tersebut, maka mereka dapat menjadi agen perubahan bagi dirinya dengan mengidentifikasi strategi dan mengimplementasikan kegiatan pembangunan yang dibuatnya.²⁰

¹⁹Email message from Keshab Kumar Pokhrel, August 24, (1999), dikutip dari John Williamson, former MCC Nepal and MCC Indonesia, *Practical Community Empowerment : Concepts, Organizational Issues and the Process*.

²⁰*Ibid.*

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, masyarakat yang berdaya (*empowered community*) merupakan guru atau fasilitator yang lebih banyak mendengar daripada berbicara, memaparkan situasi kepada kelompok, memfasilitasi suatu proses belajar di mana kelompok dapat menganalisis secara mendalam situasi yang mereka hadapi dan bergerak untuk mengubah situasi tersebut. Inisiatif dan solusi masalah muncul dari masyarakat sendiri. Walaupun perlu bantuan dari luar, mereka akan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Sumber-sumber informasi dan literatur menyebutkan bahwa sebelum suatu tindakan atau program *community empowerment* dilakukan dalam suatu masyarakat, para praktisi yang terlibat harus selalu memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap beberapa hal sebagai bahan pertimbangan dan aspek dukungan. Di antaranya, perlunya mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi dan potensi atau *assets* yang dimiliki oleh masyarakat sasaran program. Langkah selanjutnya ialah menemukan sumber daya yang mereka miliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, yang kondusif untuk pelaksanaan suatu program *community empowerment*.

Para praktisi sebagai aktivis sosial yang terlibat dalam *community empowerment* pada sektor pariwisata menganggap kebutuhan riil masyarakat setempat perlu diketahui dengan tepat, agar program *community empowerment* yang dilakukan betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Selain itu, penting juga mempelajari karakter komunitas sasaran untuk mengetahui aspirasi dan ekspektasi mereka yang sesungguhnya terhadap program *community empowerment* yang dilakukan. Dengan kata lain, para aktivis sosial tersebut dituntut untuk secara cerdas mampu menggunakan sumber daya sosial masyarakat untuk mendapatkan pengaruh politik dan ekonomi yang sering mereka gunakan dalam memenuhi berbagai kebutuhan.

Mengacu pada konsep *community empowerment* yang dipaparkan di atas, maka partisipasi masyarakat (komunitas lokal) merupakan salah satu elemen kunci dalam menentukan keberhasilan suatu program *empowerment*. Dalam partisipasi diasumsikan bahwa

masyarakat lah yang paling mengetahui masalah dan cara pemecahannya sesuai rasionalitas mereka. Dengan pendekatan partisipasi tersebut, keputusan-keputusan yang diambil akan langsung berkaitan dengan masalah utama yang mendesak untuk diatasi. Partisipasi juga dapat menggiring/mengarahkan masyarakat agar bertindak sesuai jadwal guna menghasilkan efisiensi. Dengan cara-cara mereka sendiri sangat memungkinkan suatu kegiatan pembangunan dilakukan sesuai kapasitasnya, sehingga mobilisasi sumber daya yang terbatas bisa dioptimalkan. Demikian pula dalam konteks pariwisata di mana upaya pengembangannya tidak dapat dipisahkan dari partisipasi. Dalam partisipasi masyarakat tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai obyek penerima segala keputusan *stakeholders* lainnya, tetapi ikut terlibat dalam pengembangannya. Adanya pelibatan masyarakat (*community involvement*) dalam pengembangan pariwisata diharapkan bukan hanya dapat menimbulkan perasaan memiliki melainkan juga sekaligus terpanggil untuk turut memelihara industri pariwisata di daerahnya.

Menurut Moeljarto ada beberapa alasan utama tentang pentingnya partisipasi masyarakat. *Pertama*, masyarakat adalah fokus utama dan tujuan akhir dari pembangunan, yang pada gilirannya akan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. *Kedua*, partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat. *Ketiga*, partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. *Keempat*, partisipasi memperluas zona (kawasan) penerimaan proyek pembangunan. Masyarakat akan lebih mempercayai program-program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan dalam semua kegiatan baik proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan menikmati hasilnya. *Kelima*, partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia. *Keenam*, partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri selaras dengan konsep *people centered development* yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan pada perbaikan nasib manusia dan tidak sebagai alat

pembangunan itu sendiri. *Ketujuh*, partisipasi merupakan cara yang efektif dalam membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan.²¹

Dalam melihat partisipasi masyarakat, menurut Cohen dan Uphoff (1979), ada tiga dimensi yang harus diperhatikan yaitu: (1) Partisipasi apa yang harus dipertimbangkan, (2) Siapa yang berpartisipasi, (3) Bagaimana partisipasi itu berlangsung. Untuk menganalisis siapa yang berpartisipasi, mereka menyarankan untuk mengidentifikasi ciri-ciri khusus seperti: (1) penduduk setempat; (2) pemimpin masyarakat baik secara formal maupun non formal; (3) pejabat pemerintah; (4) orang asing. Sedangkan untuk dimensi bagaimana partisipasi itu berlangsung, maka harus diperhatikan beberapa hal seperti: (1) Apakah inisiatif itu datang dari administrator atau penduduk setempat, (2) Apakah dorongan partisipasi itu sukarela atau paksaan, (3) Struktur partisipasinya, (4) Saluran partisipasinya, (5) Durasi partisipasinya, (6) Ruang lingkup partisipasinya, (7) Pemberian kuasa, yang meliputi bagaimana keterlibatan pengarah pada hasil yang diharapkan. Dalam mengukur partisipasi, harus digunakan indikator sikap dan perbuatan.²²

Berdasarkan berbagai studi diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan DTW di Indonesia masih rendah. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak adanya ketentuan yang jelas dan rinci tentang pelibatan masyarakat dalam pengembangan DTW. Padahal partisipasi aktif masyarakat lokal bagi terwujudnya kemanfaatan industri pariwisata bagi mereka tidak terlepas dari dukungan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya. Keterlibatan aktif masyarakat lokal tersebutlah yang berpengaruh pada kemanfaatan industri pariwisata bagi mereka di DTW.

²¹Lihat Moeljarto Tjokrowinoto, 1995, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

²²Arthur A. Cohen and Norman T. Uphoff (1979), *Feasibility and Application of Rural Development Participation*. Rural Development Committee, Center for International Studies, Cornell University, Ithaca, NY.

Dari berbagai konsepsi teoritik yang dijelaskan, untuk melihat partisipasi masyarakat dalam *community empowerment* yang di lakukan oleh industri pariwisata, penelitian ini akan menggunakan konsepsi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff.

Selain menggunakan konsep di atas, penelitian ini juga akan melihat *social carrying capacity* atau *tolerance level*. Menurut World Tourism Organisation "Tourism Carrying Capacity" adalah "The maximum number of people that may visit a tourist destination at the same time, without causing destruction of the physical, economic, socio-cultural environment and an unacceptable decrease in the quality of visitors' satisfaction". Sementara itu Middleton and Hawkins Chamberlain (1997) mendefinisikannya sebagai "the level of human activity an area can accommodate without the area deteriorating, the resident community being adversely affected or the quality of visitors experience declining"²³ Berdasarkan batasan tersebut tampak bahwa dalam konsep *carrying capacity* tersebut terdapat satu titik puncak di mana bila pariwisata tersebut terus dikembangkan maka akan menimbulkan kerugian baik pada lingkungan fisik maupun sosial ekonomi dan budaya.

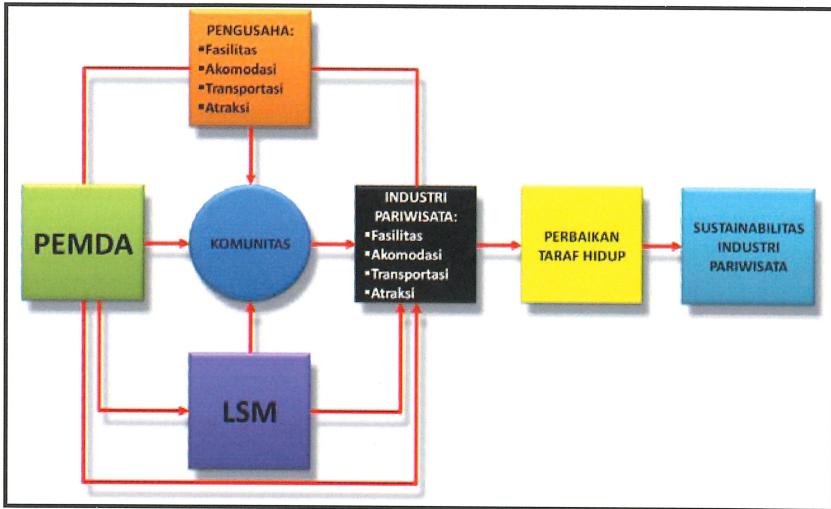
Mengacu pada konsep tersebut penggunaan konsep *carrying capacity* merupakan hal yang menarik karena adanya batasan angka sehingga akan memudahkan dalam membuat perencanaan pariwisata. Persoalannya adalah tidak adanya metode untuk menentukan *carrying capacity* yang disepakati bersama sehingga dapat diterima oleh semua orang. Oleh karena itu penentuan *carrying capacity* selalu melibatkan keputusan politis.

Untuk mengeliminasi kesulitan di atas, penelitian ini lebih melihatnya dari sisi *social carrying capacity*, sebagaimana didefinisikan oleh Middleton and Hawkins Chamberlain, khususnya yang terkait dengan pengaruh pengembangan pariwisata terhadap kondisi sosial kultural masyarakat lokal. Yang menjadi indikator adalah tinggi

²³ http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_carrying_capacity

rendahnya toleransi komunitas lokal (*local tolerance level*) terhadap pariwisata, berkurangnya kesenangan wisatawan, meningkatnya tingkat kejahatan.

Kerangka Pikir



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam kerangka *community empowerment* berdasarkan konsep *community development*. Penelitian ini difokuskan untuk melihat kemanfaatan industri pariwisata bagi komunitas lokal di DTW dari sisi elemen sosio-ekonomi dan sosio-kultural. Di antaranya, keterlibatan komunitas lokal, pemanfaatan tenaga kerja komunitas lokal, peningkatan budaya lokal, dan distribusi keuntungan di antara *stakeholders*. Adapun partisipasi dari keterlibatan komunitas lokal berperan penting dalam menciptakan kemanfaatan yang optimal dalam industri pariwisata dan pengembangannya guna mencapai sasaran pemberdayaan masyarakat lokal di DTW.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumennya

Data lapangan (primer) yang diperlukan dalam penelitian dijaring melalui metode wawancara dengan nara sumber yang dipilih secara purposif dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara yang tidak terstruktur. Adapun nara sumber tersebut berasal dari instansi pemerintah, instansi swasta/pengusaha, tokoh masyarakat dan LSM, dan elemen masyarakat lainnya. Selain itu tim peneliti juga melakukan observasi. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan penelusuran buku, makalah dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepariwisataan.

Tahun	Sasaran Penelitian	Lokasi	Sasaran Data
2011	Elemen-elemen pemberdayaan komunitas marginal lokal yang dilakukan oleh industri pariwisata yang bergerak dalam bidang akomodasi.	Provinsi Bali	Jenis-jenis industri utama pendukung pariwisata yang ada di daerah tujuan wisata; Peluang manfaat (<i>benefit</i>) yang tersedia bagi komunitas lokal dalam industri pariwisata; Kondisi pemberdayaan yang pernah dan sedang dilakukan oleh berbagai jenis industri pariwisata; Respon komunitas marginal lokal dalam menangkap peluang pemberdayaan yang ada dalam industri pariwisata; Kebijakan dan regulasi pemerintah daerah dalam mendorong industri pariwisata untuk melakukan pemberdayaan terhadap komunitas marginal lokal; Keterlibatan LSM dalam melakukan advokasi pemberdayaan komunitas marginal lokal oleh industri pariwisata.

Matrik Pengumpulan Data

No.	Sasaran Data	Target Data	Subyek Data	Pendekatan/Metode
1	Elemen-elemen pemberdayaan komunitas marginal lokal yang dilakukan oleh industri pariwisata yang bergerak dalam bidang akomodasi.	Peningkatan kapasitas masyarakat; bantuan permodalan; bimbingan teknis	Dinas Pariwisata Daerah Tujuan Wisata/Pengusaha Lokal/ dan sebagainya	Data Sekunder/ Wawancara Mendalam/ Observasi di Daerah Wisata terpilih
2	Peluang manfaat (<i>benefit</i>) yang tersedia bagi komunitas lokal dalam industri akomodasi pariwisata	Keadaan sosial-ekonomi dan sosial-budaya yang diakibatkan oleh kehadiran kegiatan industri akomodasi pariwisata	Komunitas lokal: pengusaha/pengrajin/karyawan di sektor akomodasi pariwisata, dan sebagainya	Data Sekunder/Wawancara Mendalam/ Observasi di Daerah Wisata terpilih
3	Kondisi pemberdayaan yang pernah dan sedang dilakukan oleh industri akomodasi pariwisata dan Pemerintah Daerah	Program-program pemberdayaan komunitas marginal lokal dan Koordinasi dalam implementasi	Dirjen Pariwisata/Dinas Pariwisata Daerah, Dinas Perindustrian, Disnaker, Industri Akomodasi	Sumber data sekunder/wawancara Mendalam
4	Respon komunitas marginal lokal dalam menangkap peluang pemberdayaan yang ada dalam industri akomodasi pariwisata	Banyaknya peluang kerja/usaha/aktivitas sosial ekonomi budaya yang dimasuki komunitas marginal lokal	Komunitas marginal lokal : pengusaha/pengrajin/karyawan di sektor pariwisata, dan sebagainya. Pemda/Dinas Pariwisata di daerah wisata terpilih	Wawancara Mendalam Wawancara Mendalam/ Focus Group Discussion (FGD)

No.	Sasaran Data	Target Data	Subyek Data	Pendekatan/Metode
5	Kebijakan dan regulasi Pemerintah Daerah dalam mendorong industri pariwisata untuk melakukan pemberdayaan terhadap komunitas marginal lokal	UU dan peraturan tentang OTDA, Pariwisata, dan sebagainya	Dirjen Pariwisata/Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian/ Disnaker	Sumber Data Sekunder/ Wawancara Mendalam
6	Keterlibatan LSM dalam melakukan advokasi pemberdayaan komunitas marginal lokal oleh industri pariwisata	Program-program pemberdayaan komunitas marginal lokal dan Koordinasi dalam implementasi	LSM /Pemda di daerah wisata terpilih	Wawancara Mendalam/Data Sekunder
7	Perumusan rekomendasi tentang pemberdayaan komunitas marginal lokal dalam industri pariwisata.	Hasil Penelitian	Narasumber	Wawancara Mendalam/Data Sekunder/Analisis

1.5.3 Analisis Data

Data-data primer yang bersifat kualitatif yang diperoleh di lapangan dikategorisasi untuk kemudian dianalisis secara deskriptif. Sementara data kuantitatif yang diperoleh melalui data sekunder akan digunakan untuk mendukung analisis data kualitatif.

1.5.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Provinsi Bali karena industri pariwisata di provinsi ini telah berkembang dengan baik

sehingga menjadi daerah tujuan wisata yang cukup populer dan diminati, baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Kriteria ini penting karena diasumsikan bahwa di daerah wisata yang telah berkembang cukup lama dan baik, seperti di Provinsi Bali, telah ada bentuk-bentuk upaya pemberdayaan komunitas marginal lokal oleh pelaku maupun pihak-pihak yang terkait dengan industri pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara khusus, pengumpulan data dilakukan di kabupaten Gianyar karena Gianyar dijuluki sebagai pusat seni dan budaya Bali dan sudah terkenal di Eropa sejak tahun 1926. Daerah ini juga dikenal sebagai daerah yang berada dalam wilayah Bali kuno di mana banyak ditemukan peninggalan-peninggalan yang bersifat kepurbakalaan, seperti situs-situs yang sangat menunjang kepariwisataan Bali. Sebagai obyek daerah tujuan wisata budaya, Gianyar terkenal dengan karya seni, baik tari-tarian maupun hasil kerajinannya, di mana 70% dari kesenian yang ada di Bali berasal dari Gianyar. Oleh karena pariwisata di Gianyar telah berkembang cukup lama dan baik, diharapkan telah ada bentuk-bentuk upaya *community empowerment* yang dilakukan oleh *stakeholder* industri pariwisata yang dapat dijadikan model yang dapat direplikasi di daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia.

BAB II

PROFIL DAERAH PENELITIAN

2.1. Perkembangan Akomodasi Pariwisata di Bali¹

Wisatawan manca negara mulai masuk berkunjung ke Bali sejak Bali dikuasai Belanda. Wisatawan yang datang ke Bali pun tidak hanya mereka yang bertujuan untuk melancong tetapi juga mulai banyak dikunjungi oleh para pemerhati dan penekun budaya. Implikasinya, sejak saat itu pula informasi tentang keunikan Bali mulai menyebar ke seluruh dunia internasional yang disampaikan melalui berbagai media oleh orang asing yang mengunjungi Bali. Penyebaran informasi tersebut pada gilirannya menarik semakin banyak wisatawan manca negara untuk datang ke Bali.

Dalam upaya memfasilitasi dan menampung para wisatawan yang datang ke Bali tersebut, pada tahun 1930 mulai dibangun sebuah hotel yang berlokasi di jantung kota Denpasar yakni Bali hotel. Bangunan tersebut kini masih berdiri kokoh seperti aslinya, namun namanya berganti menjadi Inna Bali Hotel. Bangunan ini bergaya arsitektur kolonial dan menjadi tonggak sejarah pariwisata Bali.

Kegiatan pariwisata yang mulai mekar ketika itu, sempat terhenti akibat terjadinya perang Dunia II antara tahun 1942-1945 yang kemudian disusul dengan makin sengitnya perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia, termasuk perjuangan yang terjadi di Bali, hingga tahun 1945. Baru kemudian pada pertengahan dasawarsa 50-an pariwisata Bali mulai ditata kembali. Seiring dengan perkembangan pariwisatanya, maka pada tahun 1963 mulai dibangun Hotel Bali Beach dengan bangunan berlantai yang sekarang bernama Inna Grand Bali Beach, yang berlokasi di pantai Sanur. Saat itu hotel ini merupakan satu -

¹Lihat Pariwisata Bali dan Perkembangan Akomodasi Wisata Bali, http://www.akomodasi.net/pariwisata_bali.php, didownload Ujud Tahajuddin, 11 Juli 2011, Jam 16.45.

satunya hunian wisata yang bertingkat di Bali. Inna Grand Bali Beach mulai beroperasi pada November 1966 dan sejak saat itu, pembangunan sarana hunian wisata pun berkembang dengan pesat di Bali. Namun demikian sarana akomodasi wisata lainnya yang berkembang kemudian hanyalah bangunan berlantai satu.

Dilihat dari sisi lokasinya, daerah pantai Sanur berkembang relatif lebih terencana karena berdampingan dengan Inna Grand Bali Beach Hotel, sedangkan kawasan pantai Kuta berkembang secara alamiah bergerak mengikuti model akomodasi setempat. Di daerah Sanur berkembang akomodasi model standar hotel, sementara jenis akomodasi yang lebih dominan berkembang di daerah Kuta adalah model *homestay* dan pension. Perkembangan secara alamiah juga terjadi di kawasan Ubud di daerah Gianyar. Akomodasi tumbuh di rumah - rumah penduduk yang tetap bertahan dengan nuansa pedesaannya.

Terkait dengan pembangunan sektor akomodasi tersebut, pada pertengahan tahun 1970 Pemerintah Daerah Bali mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur ketinggian bangunan, yakni maksimal 15 meter. Ketetapan ini ditentukan dengan mempertimbangkan faktor budaya dan tata ruang tradisional Bali agar tetap mempertahankan nilai - nilai budaya lokal yang menjadi tumpuan sektor pariwisata.

Pembangunan sarana akomodasi wisata yang berkelas internasional dimulai seiring dengan pengembangan kawasan Nusa Dua menjadi resort wisata internasional. Kawasan Nusa Dua ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata bertaraf internasional. Resort ini dikelola oleh Bali Tourism Development Corporation, yakni suatu badan bentukan pemerintah,

Seiring dengan kepariwisataan Bali yang terus berkembang maka, sarana hunian wisata pun terus bertumbuh dengan sangat pesat, terutama di daerah Badung, Denpasar dan Gianyar. Di Kabupaten Badung berkembang kawasan hunian wisata di sekitar pantai Kuta, Jimbaran dan Ungasan. Di Denpasar berkembang kawasan hunian di sekitar Sanur dan pusat kota. Sementara di daerah Gianyar berkembang kawasan hunian di daerah Ubud, Kedewatan, Payangan dan Tegalalang .

Sampai dengan saat ini, Bali telah memiliki lebih dari 35.000 kamar hotel terdiri dari kelas Pondok Wisata, hotel Melati hingga hotel berbintang lima. Bentuk hotel tersebut tampil dalam berbagai variasi, mulai dari model rumah, bentuk standar hotel, villa, bungalow dan *boutique* hotel dengan harga yang bervariasi. Keanekaragaman ini tentunya memberi nilai lebih bagi para wisatawan karena menawarkan banyak pilihan kepada para wisatawan yang berkunjung ke Bali.

Untuk mengendalikan perkembangan yang amat pesat tersebut, Pemerintah Daerah Bali kemudian menetapkan 15 kawasan di Bali sebagai daerah akomodasi wisata berikut sarana penunjangnya seperti restoran dan pusat perbelanjaan. Perkembangan kunjungan wisatawan membuat sarana wisata penunjang pariwisata tumbuh dengan pesat seperti restoran, *art shop*, pasar seni, sarana hiburan dan rekreasi.

Kemajuan dunia pariwisata Bali dapat terjadi karena, antara lain, ditopang oleh pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana akomodasinya. Pada tahun 2009 Bali memiliki 2.175 hotel dengan jumlah kamar yang tersedia yaitu mencapai 46 ribu kamar. Selain itu pada tahun tersebut di Bali terdapat 1663 restoran, dan 617 travel agent. Di samping itu guide di Bali rata-rata sudah terstandarisasi dengan baik.

Tabel 1 Daftar Jumlah Akomodasi di Provinsi Bali Tahun 2010

No	Kabupaten/ Kota	Pondok Wisata		Hotel Melati		Hotel Bintang		Total Akomodasi	
		Pondok Wisata	Kamar	Hotel Melati	Kamar	Hotel Bintang	Kamar	Jumlah Akomodasi	Total Kamar
1	Denpasar	44	244	183	4.200	23	3.095	250	7.539
2	Badung	168	781	367	9.032	98	15.836	633	25.649
3	Bangli	8	58	21	195	-	-	29	253
4	Buleleng	91	477	114	1.732	10	444	215	2.653
5	Gianyar	450	2.178	145	2.165	16	613	611	4.956
6	Jembrana	18	87	44	627	-	-	62	627
7	Klungkung	9	33	29	301	2	36	40	370
8	Karangasem	126	587	89	1.441	6	221	221	2.240
9	Tabanan	82	-	44	717	3	343	129	1.060
	Jumlah	996	4.445	1.036	20.410	158	20.588	2.190	45.347

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Direktori 2010

Tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa dari seluruh jenis akomodasi yang ada di Bali, jenis hotel melati adalah yang terbanyak dijumpai (1.036), kemudian pondok wisata (996) sedangkan hotel berbintang hanya berjumlah 158 buah. Hotel melati yang terbanyak ada di Kabupaten Badung (367) dan Denpasar (183), dengan kapasitas kamar terbanyak pula, masing-masing 9.032 kamar dan 4.200 kamar. Memang di kabupaten ini banyak tersedia hotel jenis melati karena pada umumnya wisatawan senang mendekati atau mengunjungi tempat-tempat yang ada wisata baharinya (antara lain pantai). Wisatawan akan dengan mudah menjangkau lokasi-lokasi pantai seperti Kuta, Tanjung Benoa, Sawangan Jimbrana dan Nusa Dua yang ada di Kabupaten Badung, serta Kuta yang ada di Kabupaten Denpasar. Umumnya wisatawan yang mengisi hotel jenis ini adalah wisatawan kelas ekonomi menengah ke bawah, termasuk wisatawan-wisatawan “*bag pack*”. Sementara Gianyar merupakan kabupaten terbanyak ketiga yang menyediakan hotel melati (145) dengan kapasitas kamar mencapai 2.165.

Begitu pula halnya dengan jenis hotel bintang, mayoritas terkonsentrasi di kabupaten yang sama dengan jenis hotel melati, yaitu berturut turut Badung (98), Denpasar (23) dan Gianyar (16) dengan kapasitas kamar, masing-masing 15.836 kamar, 3.095 kamar, dan 613 kamar. Wisatawan yang menempati hotel bintang ini pada umumnya adalah mereka yang tergolong menengah ke atas. Tingkat hunian di hotel berbintang (bintang 4 dan 5) ini pada musim liburan menjelang natal, – tahun baru – lebaran atau pada *peack season* lainnya sangat tinggi, bahkan biasanya wisatawan asing sudah melakukan pemesanan hotel enam bulan hingga satu tahun sebelumnya.

Sementara untuk jenis pondok wisata, terbanyak adalah di kabupaten Gianyar (450), kemudian diikuti dengan kabupaten Badung (168) dan Karangasem (126), dengan kapasitas kamar, masing-masing adalah 2.178 kamar, 781 kamar dan 587 kamar.

Tabel 2 Perkembangan Hotel Bintang di Provinsi Bali Tahun 2005–2010

No	Kabupaten/ Kota	2005		2006		2007	
		Hotel Bintang	Kamar	Hotel Bintang	Kamar	Hotel Bintang	Kamar
1	Kota Denpasar	24	2.996	24	3.169	24	3.160
	- Denpasar	2	111	2	116	92	112
	- Sanur	22	2.885	22	3.053	22	3.048
2	Badung	93	15.538	94	15.612	95	15.905
	- Kuta, Tanjung Benoa Sawangan Jimbrana	76	11.203	76	11.153	76	11.288
	- Nusa Dua	17	4.335	18	4.459	19	4.617
3	Bangli	-	-	-	-	-	-
4	Buleleng	7	259	9	349	10	271
5	Gianyar	12	507	13	523	14	563
6	Jembrana	-	-	-	-	-	-
7	Klungkung	3	42	3	42	2	36
8	Karangasem	7	293	7	293	6	271
9	Tabanan	2	305	2	305	2	225
	Jumlah	148	19.940	152	20.293	153	20.531

No	Kabupaten/ Kota	2008		2009		2010	
		Hotel Bintang	Kamar	Hotel Bintang	Kamar	Hotel Bintang	Kamar
1	Kota Denpasar	23	3138	23	3.095	23	3.095
	- Denpasar	2	112	2	113	2	113
	- Sanur	21	3.026	21	2.982	21	2.982
2	Badung	96		98	16.360	98	15.836
	- Kuta, Tanjung Benoa Sawangan Jimbrana	78	11.438	79	11.609	78	11.229
	- Nusa Dua	18	4.578	19	4.751	20	4.607
3	Bangli	-	-	-	-	-	-
4	Buleleng	11	496	11	511	10	444
5	Gianyar	16	597	16	592	16	613
6	Jembrana	-	-	-	-	-	-
7	Klungkung	2	36	2	36	2	36
8	Karangasem	5	211	5	211	6	221
9	Tabanan	2	225	2	313	3	343
	Jumlah	155	2.719	157	21.118	158	20.588

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Direktori 2010.

Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa perkembangan hotel berbintang di Bali selama enam tahun (2005-2010) mengalami kenaikan seperti di Badung dan Gianyar, terjadi penambahan jumlah hotel berkisar empat sampai lima dengan jumlah kamar yang cukup memadai. Begitu pula di Tabanan juga mengalami kenaikan jumlah hotel, kendati hanya satu di tahun 2010. Sementara di kawasan Nusa Dua, Badung terjadi pengurangan atau penurunan jumlah hotel pada tahun 2008 dan kemudian pada tahun 2009 hingga 2010 mengalami peningkatan jumlah kembali. Ada pula yang mengalami penurunan kendati hanya satu hotel saja, seperti di Klungkung dan Karangasem, namun khususnya Karangasem sempat mengalami fluktuasi. Sementara di Buleleng yang semula memiliki 7 hotel pada tahun 2005 kemudian mengalami puncak kenaikan menjadi 11 hotel pada tahun 2009 dan mengalami penurunan jumlah menjadi 10 hotel pada tahun 2010. Kemungkinan terjadinya penurunan jumlah hotel tersebut karena manajemennya mengalami kebangkrutan atau sebab lainnya.

Tabel 3 Perkembangan Hotel Melati di Provinsi Bali Tahun 2005–2010

No	Kabupaten/ Kota	2005		2006		2007	
		Hotel Melati	Kamar	Hotel Melati	Kamar	Hotel Melati	Kamar
1	Denpasar	188	3.212	195	3.339	197	3.728
2	Badung	255	6.105	277	6.741	343	7.780
3	Bangli	26	219	26	219	27	230
4	Buleleng	67	1.164	67	1.164	92	1.461
5	Gianyar	133	1.902	164	2.315	126	1.867
6	Jembrana	38	503	38	503	42	602
7	Klungkung	79	1.329	114	1.645	82	1.235
8	Karangasem	26	255	26	255	24	233
9	Tabanan	37	643	36	616	28	381
	Jumlah	849	15.332	943	16.797	961	17.517

No	Kabupaten/ Kota	2008		2009		2010	
		Hotel Melati	Kamar	Hotel Melati	Kamar	Hotel Melati	Kamar
1	Denpasar	180	4.265	183	4.200	183	4.200
2	Badung	363	9.223	366	9.246	367	9.032
3	Bangli	17	185	21	195	21	195

No	Kabupaten/ Kota	2008		2009		2010	
		Hotel Melati	Kamar	Hotel Melati	Kamar	Hotel Melati	Kamar
4	Buleleng	94	1.485	113	1.732	114	1.732
5	Gianyar	133	1.982	142	2.168	145	2.165
6	Jembrana	64	690	60	687	44	627
7	Klungkung	86	1.275	90	1.467	89	1.441
8	Karangasem	28	266	28	295	29	301
9	Tabanan	34	546	36	526	44	717
	Jumlah	999	19.917	1.039	20.516	1.036	20.410

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Direktori 2010.

Sementara itu untuk hotel melati perkembangan selama enam tahun pada umumnya mengalami kenaikan jumlah, seperti di Kabupaten : Karangasem (3), Jembrana (6), Tabanan (7), Gianyar (12). Bahkan di Kabupaten Badung dan Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan yang sangat signifikan, masing-masing mencapai 112 dan 47, yang terbilang sebagai lonjakan bombastis. Lonjakan kenaikan jumlah hotel tersebut terjadi pada tahun 2007 seperti terlihat pada tabel 3. Kebalikannya, justru di Kabupaten Denpasar dan Bangli terjadi penurunan jumlah hingga lima hotel.

Bila dicermati maka pada tahun 2007 sebenarnya telah terjadi sekaligus kenaikan dan penurunan jumlah hotel secara drastis. Kenaikan jumlah hotel dialami oleh Kabupaten Badung seperti yang telah disinggung di atas (66), Kabupaten Buleleng (25), Denpasar (2) dan Bangli (1). Sedangkan penurunan jumlah hotel dialami oleh Kabupaten Gianyar (38), Klungkung (32) dan Tabanan (9). Tidak teridentifikasi penyebab terjadinya kenaikan dan penurunan jumlah hotel secara drastis di beberapa kabupaten tersebut, sekalipun apakah penyebabnya terkait dengan kebijakan politik daerah maupun terkait dengan hal-hal yang lain.

Tampaknya setelah kejadian bom Bali di tahun 2005, kehidupan pariwisata Bali mulai membaik pada tahun berikutnya dan ditengarai terjadi peningkatan jumlah wisatawan seiring dengan menjamurnya pelaku usaha pribumi dan WNA yang menetap di Bali yang tertarik untuk bisnis hotel jenis/kelas melati. Bisnis hotel melati memang dirasakan sangat menjanjikan, apalagi jika pada musim liburan atau *peak season* para wisatawan yang datang secara mendadak, tanpa

melalui pemesanan terlebih dahulu tidak mendapatkan tempat. Oleh karena itu maka hotel-hotel jenis inilah yang akan menjadi alternatifnya dan akan diserbu oleh wisatawan untuk menginap.

Tabel 4 Perkembangan Pondok Wisata di Provinsi Bali Tahun 2005–2010

No	Kabupaten/ Kota	2005		2006		2007	
		Pondok Wisata	Kamar	Pondok Wisata	Kamar	Pondok Wisata	Kamar
1	Denpasar	50	263	50	263	35	255
2	Badung	81	377	140	674	163	759
3	Bangli	8	38	10	49	7	44
4	Buleleng	28	132	28	132	81	419
5	Gianyar	128	580	478	1.679	407	1.988
6	Jembrana	28	153	28	168	22	108
7	Klungkung	57	272	132	563	95	442
8	Karangasem	9	40	9	40	9	44
9	Tabanan	51	244	51	244	40	-
	Jumlah	440	2.099	926	3.812	859	4.059

NO	KABUPATEN/ KOTA	2008		2009		2010	
		PONDOK WISATA	KAMAR	PONDOK WISATA	KAMAR	PONDOK WISATA	KAMAR
1	Denpasar	41	252	44	244	44	244
2	Badung	163	759	168	781	168	781
3	Bangli	7	44	7	44	8	58
4	Buleleng	88	438	94	497	91	477
5	Gianyar	430	2.103	450	2.179	450	2.173
6	Jembrana	-	-	-	-	18	87
7	Klungkung	120	572	127	591	126	587
8	Karangasem	9	44	9	44	9	33
9	Tabanan	67	-	82	-	82	-
	Jumlah	925	4.212	981	4.380	996	4.440

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Direktori 2010.

Perkembangan pondok wisata di Bali juga mengalami kemajuan seiring banyaknya wisatawan yang lebih menyenangi untuk menginap di akomodasi jenis ini. Banyak pembangunan pondok wisata dengan konsep nuansa *cottage* dan villa yang asri terdiri dari beberapa kamar, dan dilengkapi dengan *pantry* dan ruangan keluarga sehingga memberikan kepuasan tersendiri. Apalagi jenis podok wisata ini memberikan privasi lebih dibandingkan menginap di hotel. Wisatawan

yang cenderung memilih pondok wisata kemungkinan adalah mereka yang memiliki keluarga besar atau datang dengan rombongan kantor dan sebagainya.

Peningkatan jumlah pondok wisata terjadi di lima kabupaten, di Bali. Sampai dengan tahun 2010, masing-masing kabupaten yang mengalami penambahan, yaitu: Denpasar (6), Jembrana (10), Buleleng (63), Klungkung (69) dan Gianyar (322). Dari data ini menunjukkan bahwa Gianyar merupakan kabupaten yang mengalami lonjakan kenaikan pondok wisata yang sangat tinggi, hampir lima kali jumlah kenaikan yang terjadi di Klungkung. Sementara Kabupaten Bangli dan Karangasem tetap stabil jumlah pondok wisatanya, tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Pesatnya kenaikan jumlah pondok wisata di Kabupaten Gianyar dimungkinkan karena Gianyar merupakan pusat seni dan budaya Bali, di mana sangat banyak obyek wisata budaya yang tersebar di sini. Oleh karena itu wisatawan ingin dekat lokasi menginapnya dengan obyek wisata tersebut, sehingga kebutuhan akan penginapan pun semakin tinggi pula.

Jika dicermati, peningkatan akumulasi jumlah pondok wisata di kelima kabupaten tersebut selama kurun waktu enam tahun, sebenarnya mulai terjadi pada tahun 2006. Contohnya Gianyar, pada tahun 2005 jumlah pondok wisatanya hanya 128 dan setahun kemudian (2006) telah berkembang menjadi 478 pondok wisata, yang berarti telah terjadi peningkatan sebesar 350, suatu jumlah yang bombastis. Namun yang terjadi pada tahun 2007, banyak pondok wisata di Gianyar yang tutup (± 71) karena mengalami kebangkrutan, sebagai akibat kelemahan manajemennya. Sedangkan di Kabupaten Tabanan hanya sekali, yaitu pada tahun 2007 mengalami penurunan jumlah pondok wisata (11) dan pada tahun 2008 hingga 2009 mengalami kenaikan berturut-turut, yaitu 27 dan 15.

Tabel 5 Perkembangan Restoran/Rumah Makan di Provinsi Bali Tahun 2005–2010

No	Kabupaten/ Kota	2005		2006		2007	
		Rest/Rm	Seat	Rest/Rm	Seat	Rest/Rm	Seat
1	Denpasar	236	16.776	236	24.448	255	14.282
2	Badung	425	32.310	518	34.345	580	39.515
3	Bangli	64	6.016	64	5.950	43	3.811
4	Buleleng	24	1.290	24	1.310	62	2.643
5	Gianyar	101	6.616	237	11.222	237	9.724
6	Jembrana	28	320	28	320	28	1.213
7	Klungkung	24	1.655	105	7.315	96	3.348
8	Karangasem	-	-	-	-	18	531
9	Tabanan	52	4.017	52	4.017	45	-
	Jumlah	954	69.000	1.264	88.927	1.364	75.067

No	Kabupaten/ Kota	2008		2009		2010	
		Rest/Rm	Seat	Rest/Rm	Seat	Rest/Rm	Seat
1	Denpasar	333	17.630	370	19.381	376	19.623
2	Badung	635	42.558	635	42.558	629	42.076
3	Bangli	43	3.811	43	3.811	40	3.001
4	Buleleng	63	2.670	63	2.670	53	2.145
5	Gianyar	243	9.848	244	9.876	242	9.844
6	Jembrana	133	-	133	-	134	-
7	Klungkung	99	3.407	99	3.407	95	3.222
8	Karangasem	28	960	28	960	37	1.168
9	Tabanan	78	-	78	-	79	-
	Jumlah	1.655	80.884	1.693	82.663	1.685	81.07953

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Direktori 2010

Dari data yang diperoleh melalui Dinas Pariwisata menunjukkan bahwa tujuh dari sembilan kabupaten di Bali, yaitu Denpasar, Badung, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Klungkung, dan Karangasem, dalam kurun waktu enam tahun (2005-2010) cenderung mengalami kenaikan akumulasi jumlah restoran/ rumah makan. Di kabupaten Badung banyak berdiri usaha yang bergerak di di bidang ini. jika diambil rata-rata per tahunnya kenaikannya mencapai sekitar 34 restoran/ rumah makan. Namun stabilitas kenaikan hanya terjadi pada tahun 2006 sampai dengan 2008, sedangkan pada tahun 2010 justru terjadi penurunan, yaitu hanya lima. Sama halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Badung, pada tahun

2010 di Kabupaten Buleleng, Gianyar dan Klungkung juga terjadi penurunan jika dibandingkan dengan kondisi jumlah restoran /rumah makan pada tahun sebelumnya (2009).

Sementara itu kabupaten Karangasem relatif baru tahun 2007 banyak berdiri restoran/ rumah makan dan dalam perkembangannya di tahun 2008 sempat mengalami peningkatan jumlah (10). Kondisinya tidak berubah di tahun 2009 dan kembali meningkat di tahun 2010 hingga 19 jumlahnya.

Terkait dengan perkembangan restoran/ rumah makan yang ada di Bali, ternyata kendati tahun 2005 terjadi peristiwa bom Bali, tidak menimbulkan kecemasan para pelaku usaha jenis ini. Tabel 5 di atas memperlihatkan bahwa di tahun 2006 justru semakin banyak restoran/rumah makan bermunculan di Kabupaten Gianyar, Klungkung dan Badung sehingga jumlahnya semakin banyak. Munculnya kreatifitas para pelaku usaha jenis ini yang berusaha menarik wisatawan melalui berbagai sajian menu, mulai yang bercirikan khas budaya Bali hingga menu internasional akan menambah maraknya pertumbuhan restoran/ rumah makan di Bali.

Tabel 6 Perkembangan Daya Tarik Wisata di Bali Tahun 2005–2010

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Denpasar	24	24	25	24	34	16
2	Badung	35	35	37	37	38	11
3	Bangli	35	35	37	10	10	9
4	Buleleng	31	31	31	39	39	20
5	Gianyar	44	44	47	66	64	36
6	Jembrana	16	16	16	18	18	8
7	Karangasem	20	20	21	16	15	11
8	Klungkung	20	20	21	31	28	21
9	Tabanan	30	30	31	29	28	17
	Jumlah	225	225	225	270	264	149

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Direktori 2010.

2.2 Profil Daerah Kabupaten Gianyar

Berdasarkan data tahun 2010 yang bersumber dari BPS Kabupaten Gianyar, Kabupaten Gianyar dengan luas wilayah 36.800 hektar atau 6,53% dari seluruh luas Pulau Bali, terdiri dari tujuh kecamatan yaitu Sukawati, Blahbatu, Gianyar, Tampak Siring, Ubud, Tegallalang, dan Payangan. Penduduk Kabupaten Gianyar mencapai 421.067 jiwa (hasil sensus 2005), dengan perbandingan yang cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Salah satu indikator suksesnya tingkat pendidikan di Kabupaten Gianyar dapat dilihat dari ketersediaan sekolah dan guru. Kabupaten Gianyar memiliki cukup banyak gedung sekolah; untuk TK saja sudah mencapai 110 buah gedung, sementara SD sebanyak 289 buah, SLTP 44 buah, SMU mencapai 18 buah, dan SMK lebih banyak lagi yaitu 24 gedung sekolah, dan semua sekolah itu tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah keseluruhan murid dari semua tingkatan mencapai 87.407 murid, dan pada 2009 jumlah guru dari semua tingkat sebanyak 6.504 orang, dengan rasio perbandingan antara murid dan guru adalah sebagai berikut, SD 16:1; SLTP 13:1; SMU 11:1, dan SMK 9:1, perbandingan ini menunjukkan bahwa ketersediaan guru di Kabupaten Gianyar sudah cukup memadai.

Jumlah angkatan kerja berdasarkan data yang didapat dari hasil survei angkatan kerja nasional pada tahun 2007 mencapai 263.575 jiwa dan mengalami kenaikan pada 2008-2009 menjadi 273.316. Sementara angka pengangguran di kabupaten Gianyar pada tahun 2009 tercatat hanya 2,91 dari seluruh jumlah penduduk.

Melalui pendekatan tenaga kerja, terdapat 96 perusahaan industri besar/średang (data didapat akhir tahun 2009) yang beroperasi di Gianyar. Namun industri sedang atau besar terutama sub bidang industri kayu (patung) sangat labil karena tergantung dari pesanan sehingga jumlah tenaga kerjanya pun sering berubah-ubah. Padahal penyerapan tenaga kerja pada sektor industri ini sebanyak 3.541 pekerja.

Sedangkan melalui pendekatan modal usaha dan investasi berdasarkan data per 2009 yang di data Kandep Perindag Gianyar terdapat 22.548 unit usaha sub sektor industri kecil/kerajinan dengan jumlah tenaga kerja mencapai 61.316 orang.

Mata pencarian masyarakat Gianyar cukup beragam. Menurut data per 2009 lapangan kerja yang paling populer digeluti masyarakat Gianyar adalah industri pengolahan (28,11%), disusul di tempat kedua oleh pertanian, dan sekitar 25,02% dari jumlah penduduk Gianyar menjadi buruh tani. Dipengaruhi oleh sektor pariwisata, perdagangan dan usaha rumah makan juga cukup diminati penduduk ini terbukti 22,41 persen dari jumlah penduduk menggeluti usaha tersebut, sisanya mencari peruntungan di sektor jasa kemasyarakatan sebesar 8.88% dan lainnya sebanyak 15.58%.

Seperti wilayah lainnya di Bali, mayoritas penduduk kabupaten Gianyar memeluk agama Hindu, yaitu sebanyak 417.495 jiwa, dan Islam menjadi agama kedua terbesar dengan jumlah pemeluk mencapai 7.231, disusul Protestan dan Budha yang masing-masing memiliki 768 umat, dan terakhir Katholik sebanyak 554 pengikut.

Selain merupakan warisan nilai-nilai lokal budaya setempat, keberadaan lembaga adat sangat penting demi kelestarian budaya setempat khususnya budaya hindu bali, oleh karena itu lembaga-lembaga adat masih dipertahankan keberadaannya oleh pemerintah kabupaten hal ini terbukti dari jumlah desa adat yang mencapai 271 buah, banjar adat 569 buah dan organisasi subak (sawah dan tanah kering) mencapai 554 buah.

2.2.1 Obyek Wisata di Gianyar

Dari 51 obyek wisata yang ada di Gianyar, delapan di antaranya ditangani oleh Pemda, yang juga bekerja sama dengan desa adat setempat. Sedangkan obyek wisata lainnya, ada yang ditangani sendiri oleh desa setempat tanpa melibatkan pemerintah,; ada pula obyek wisata yang ditangani oleh swasta, yaitu obyek wisata yang besar-besar seperti, antara lain, Bali *bird park*, taman Safari Medahan, penyediaan

dan persewaan gajah tunggang yang dikelola oleh orang Jerman. Kendati tidak seluruh obyek wisata di Gianyar ditangani oleh pemerintah, namun pemerintah tetap dapat memantau perkembangannya dan tetap memberikan pembinaan-pembinaan. Dalam hal-hal tertentu, bila perlu, Pemerintah Daerah mengajukan kepada kementerian untuk diberi kewenangan dalam pengambil-alihan pariwisata yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat.

Dinas Pariwisata juga mengembangkan *echo tourism* yang berbasis pada *agro tourism* di daerah Payangan, di mana wisatawan kelak dapat menikmati indahnya hamparan hijau persawahan tanah sering yang menyatu dengan sistem subak dengan melalui jalan setapak yang akan disediakan. Dengan *eco tourism* ini diharapkan wisatawan dapat menikmati indahnya alam sekaligus budaya yang mendukungnya. Wisatawan dapat melihat pemandangan alam pedesaan, secara langsung melihat apa yang dilakukan petani di areal persawahan pada saat membajak sawah dengan kerbau, dan mereka dapat meneruskan perjalanannya melalui jalan setapak melihat menjangkan-menjangkan kecil (sebesar anjing), merupakan jenis hewan langka dunia dan satu-satunya ada tersebar ratusan jumlahnya di desa sebelah *agro tourism*.²

2.3 Profil Kecamatan Gianyar

Hampir sama dengan wilayah lainnya di pulau Bali, kabupaten ini juga memiliki potensi wisata, yaitu keindahan alam dan seni dan budaya yang bersumber dari agama Hindu Bali. Sejumlah seni sakral Hindu memiliki kelompok-kelompok tersendiri yang berada beberapa kecamatan, terdapat 1 Gambuh Batuan Sukawati, 26 kelompok Sekaa Kidung Pesantian, 16 Sekaa Kidung Bona, dan 25 Sekaa Kidung Pesantian Gianyar.

Salah satu kecamatan yang menjadi fokus penelitian di Kabupaten Gianyar adalah Kecamatan Gianyar yang merupakan

² Selama ini di daerah Bali, sudah ada suaka satwanya, yang dilindungi oleh awig-awig adat, sama halnya dengan hukum adat yang tidak bisa dibantah keberadaannya.

kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Sukawati. Di Kecamatan Gianyar dengan luas 50.59 km² terdapat 74.523 jiwa yang terdiri dari 17.643 KK.

Pendidikan dasar menjadi fokus penting Pemerintah Daerah Gianyar untuk mengurangi jumlah penduduk buta huruf. Kecamatan ini merupakan wilayah dengan jumlah sekolah dasar paling banyak sekabupaten Gianyar, yakni 17 gedung sekolah yang terdiri dari 349 ruang kelas sekolah dasar dan mampu menampung murid sebanyak 9.260 murid.

Di Kecamatan Gianyar, keberadaan lembaga adat masih menjadi bagian hidup masyarakat khususnya yang beragama Hindu Bali, lembaga adat ini sangat mempengaruhi jalannya aktivitas sosial masyarakat setempat, di kecamatan tersebut terdapat 41 desa adat, 108 buah banjar adat dan 94 kelompok subak yeh. Selain itu tingkat toleransi masyarakat terhadap keberagaman juga sudah sangat baik hal ini terbukti di kecamatan tersebut terdapat 13 tempat pengajian dan tercatat 65 orang guru pengajian.

Luas seluruh pesedahan sawah di kabupaten Gianyar mencapai 13.966,04 hektar dan pesedahan darat mencapai 15.250,68 hektar. Pertanian yang terdapat di Kabupaten Gianyar selain tanah pertanian sawah juga terdapat tanah pertanian kering. Di Kecamatan Gianyar terdapat 2.542 hektar lahan pertanian sawah yang menggunakan pengairan setengah teknis dan lahan pertanian kering (tegalan atau kebun) mencapai 1030 hektar.

Pada tahun 2009, produksi padi kabupaten Gianyar mencapai 182.758, 52 ton, dan kecamatan Gianyar menjadi penyumbang terbesar dengan hasil produksi padi sebanyak 35.928,22. Selain padi Kabupaten Gianyar juga menghasilkan jagung, ubi kayu, kacang kedelai, dan buah-buahan seperti melon. Melon ini merupakan komoditas yang baru dikembangkan sejak 1994 dan sangat berpotensi untuk dikembangkan, namun hasil panennya masih fluktuatif.

Selain menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan, penduduk di kecamatan Gianyar juga berusaha di bidang industri. Di sana terdapat 28 usaha industri hasil pertanian dan kehutanan, lima unit industri logam mesin dan kimia, lima unit aneka industri, 23 unit industri tekstil. Kabupaten Gianyar termasuk kabupaten yang maju, seluruh desa sudah dapat merasakan energi listrik untuk mendukung kehidupan penduduk sehari-hari, termasuk penduduk di 17 desa di Kecamatan Gianyar. Selain listrik, aksesibilitas di kabupaten Gianyar juga sudah cukup terjamin, sampai akhir 2009 jalan yang sudah diaspal mencapai 529.538 km dan juga sudah didukung dengan sarana dan prasarana transportasi lainnya yang cukup memadai (armada angkutan dan jembatan).

BAB III

PELUANG MANFAAT SOSIAL EKONOMI INDUSTRI AKOMODASI PARIWISATA BAGI KOMUNITAS LOKAL

3.1 Peluang Manfaat Sosial Ekonomi

Dari sudut pandang ketenagakerjaan, peluang ekonomi dari berkembangnya industri akomodasi yang terbuka bagi masyarakat relatif banyak. Dengan berkembangnya akomodasi ada *multiplier effect* seperti ada kebutuhan akan restoran, jasa pariwisata, obyek pariwisata, daya tarik wisata, jasa pariwisata seperti biro perjalanan, pramuwisata. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi baik bekerja langsung di hotel atau berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi turunannya di atas. Misalnya, tenaga kerja lokal dapat bekerja sebagai supir, sebagai guide, mensupply bahan kebutuhan restoran hotel, dan sebagainya. Dengan demikian, sektor akomodasi ini sebenarnya menjadi lokomotif untuk memberdayakan masyarakat.

Trend generasi muda sekarang dalam mencari kerja mengarah kepada kerja di kapal pesiar, seperti untuk tenaga untuk *waiter*, *cooker* dan tukang cuci piring, dan sebagainya. Tetapi yang mengherankan mereka tidak mau mengisi bila ada lowongan untuk supervisor. Alasan, mereka bekerja itu untuk mencari uang, bukan cari jabatan. Bila jadi supervisor hanya memperoleh gajinya tetap, tidak mendapat tip, tetapi kalau sebagai pelayan mereka mendapat tip. Jadi penghasilan dari tip itu tampaknya lebih besar dibanding gaji tetapnya. Hal ini juga mengindikasikan bahwa generasi muda lebih peduli dengan pemenuhan kebutuhannya daripada kebutuhan lainnya.

Dengan adanya perkembangan industri akomodasi di Bali, tentunya juga ada peluang ekonomi yang tercipta bagi masyarakat

seperti peluang di bidang pangan, di bidang tekstil, dan sebagainya. Dalam kaitan ini, di kawasan-kawasan akomodasi pariwisata tampak sekali masyarakat sekitarnya turut menikmati perkembangan yang terjadi, seperti UKM di bidang penjualan makanan, di bidang pasar seni, dan di bidang seni budayanya. Dalam hal ini sektor akomodasi sebenarnya secara tidak langsung turut memberdayakan komunitas yang ada di sekitarnya dengan cara memberi peluang kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di hotel atau membuka gerai kerajinan di hotelnya

Masalahnya, kadang-kala pengrajin tersebut belum siap, karena *supply* ke hotel memerlukan kontinuitas, kualitas, dan standard yang belum mampu dipenuhi oleh sebagian pengrajin. Hal ini diperparah oleh kebijakan hotel yang kadang melakukan pembayaran di belakang yang mundurnya kadang-kadang 3 - 4 bulan. Bagi pengrajin pembayaran mundur ini dirasakan terlalu lama dan bisa mematikan usaha pengrajin tersebut. Akibatnya pengrajin yang bersangkutan mengundurkan diri tidak mau lagi kerja sama dengan hotel yang bersangkutan. Dengan adanya kekosongan tersebut akhirnya memberi peluang masuk kepada pengrajin yang modalnya kuat. Implikasinya, bukan pengrajin asli yang masuk menjadi pengepul di hotel tetapi pengusaha trading besar yang masuk.

Padahal sekitar tahun 1980-an pengrajin bisa masuk langsung dalam arti berhubungan langsung dengan hotel, baik untuk memenuhi kebutuhan alat restorannya, seperti tisu sampai vas bunga, sampai untuk kebutuhan sandal hotel. Dalam konteks *community empowerment* seharusnya kerja sama seperti itu terus berlanjut. Tetapi dengan perkembangan jaman yang sulit diprediksi, kadang ada juga manajemen hotel yang setelah sekian lama berhubungan dengan pengrajin dan tidak mendapat apa-apa selain repot mengurusnya, merasa bahwa lebih baik berhubungan langsung dengan pengusaha besar karena pasti ada pemasukan untuk management. Informan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menduga bahwa hal seperti itu besar pengaruhnya, mungkin 80% nya ada yang memiliki pikiran seperti itu. Realitas tersebut tidak bisa dipungkiri.

Bagi pengrajin, meskipun terjadi pemutusan hubungan kerja sama dengan hotel, mereka tetap bisa *survive* karena *outlet*nya tidak terpaku pada satu sumber saja. Pengrajin berani berhenti kerja sama dengan hotel, biasanya karena dia sudah punya peluang usaha lain. Misalnya dia bertemu langsung dengan wisatawan yang sedang jalan-jalan kemudian memesan barangnya, atau dia mendapat langganan pembeli dari pertemuan di pameran, dan sebagainya.

Dalam upaya memberdayakan dirinya pengrajin membentuk kelompok pengrajin, meskipun tetap ada yang bergerak perorangan. Menurut informan Disperindag, tampaknya pengrajin mengalami kesulitan bekerja dalam kelompok karena bagaimana pun tetap ada persaingan di antara pengrajin tersebut, dan itu memang sulit diduga. Bahkan semenjak berkembang teknologi informasi (IT), kebanyakan pengrajin bergerak perorangan karena dia bisa mengembangkan sendiri usahanya melalui *website*.

Potensi untuk memberdayakan masyarakat di Bali sangat besar dengan banyaknya hotel berbintang. Kalau saja mereka bisa memanfaatkan potensi lokal di Bali, termasuk hasil kerajinan dan pertanian, maka kegiatan dalam upaya memberdayakan akan memberikan hasil yang luar biasa. Tapi sayangnya hal itu tidak terjadi karena, konon, sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan buah-buahan saja hotel sudah mendatangkannya dari luar. Demikian juga kebutuhan interiornya yang kebanyakan didatangkan dari luar.

Dalam rangka mengatasi persoalan itu, sebenarnya *community empowerment* hanya perlu kebijakan, misalnya kebijakan terkait dengan mekanisme. Untuk itu perlu dibuat kebijakan untuk menggunakan produk dalam negeri. Berdasarkan kebijakan tersebut kemudian dibuat mekanisme yang mengatur penyediaan bibit, musim dan pola tanam, kontrol kualitas produksi, distribusi dan pemasaran, unsur yang bertanggung jawab menanganinya, dan sebagainya.

Dalam rangka *community empowerment* yang dikaitkan dengan sektor akomodasi seperti di atas, pihak Pemerintah Daerah sudah tiga kali rapat dengan PT BTDC untuk menajagi kemungkinan

untuk melakukan kerja sama. Dalam membangun kerja sama dengan PT BTDC ini melibatkan seluruh instansi terkait yang ada di jajaran Pemerintah Daerah (Pemda), seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, supaya dapat menggerakkan dan memanage masyarakat agar bisa masuk melakukan kerja sama tersebut. Akan tetapi koordinasinya hanya dilakukan secara insidental. Harapannya bila kerja sama tersebut bisa direalisasikan akan diformalkan melalui pembuatan perda (peraturan daerah). Namun, untuk itu Pemda menghadapi tantangan untuk mengupayakan bagaimana menjamin adanya kontinuitas dalam hal kuantitas produksi dan standar kualitas produk yang dihasilkan para pengrajin. Misalnya kesanggupan pemasok buah-buahan dari pertanian petani lokal. Jangan sampai sesudah terbentuknya lembaga kerja sama ternyata *supply*nya tidak bisa kontinyu. Apalagi di Bali ini banyak acara ritualnya yang mungkin saja menghambat dalam pengiriman produknya.

3.2 Respons Masyarakat Terhadap Perkembangan Industri Akomodasi

Menurut informan, respons masyarakat melihat perkembangan industri pariwisata di Bali sangat bagus. Misalnya di Nusa Dua, dengan berkembangnya akomodasi perhotelan mendorong masyarakat yang bisa berbisnis seperti membangun toko, sementara untuk yang tidak bisa berbisnis mereka bekerja disitu atau terpaksa ke luar. Tetapi, bagi mereka yang ke luar dari area itu tidak menjadi masalah karena sebelumnya sudah diinformasikan bahwa lokasi tersebut adalah lokasi pariwisata. Sementara ini tidak ada masyarakat yang menolak ketika daerahnya dibangun hotel, karena sedini mungkin pihak hotel sudah menyosialisasikan dengan tokoh masyarakat setempat, kepala desa, dan camatnya. Dengan demikian, perkembangan akomodasi pariwisata tersebut tidak berdampak pada terjadinya konflik dengan masyarakat karena sudah diatur dari awal. Kecuali kalau sudah dilarang membangun karena misalnya dekat

pura, tetapi pihak hotel terus membangun mungkin saja terjadi konflik.

Tampaknya masyarakat Bali sudah memiliki kemampuan adaptasi yang sangat tinggi karena, tampaknya, pariwisata di Bali sudah berkembang lama dan masyarakat pun mengandalkan kehidupan ekonominya dari pertumbuhan pariwisata. Dengan begitu terjadi harmoni antara kehidupan masyarakat dengan kehidupan pariwisata. Sebagai contoh, di Kuta para wisatawan biasanya menikmati wisatanya dengan berdiskotik atau keramaian lainnya, sementara masyarakat tetap membuat dan melaksanakan upacara ritualnya tanpa merasa terusik oleh kehadiran dan kegiatan wisatawan tersebut.

Memang pada tahap-tahap awal perkembangan pariwisata Bali banyak kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang secara kultural terkontaminasi oleh budaya yang dibawa wisatawan asing. Misalnya mereka terbawa bergaya hidup hipies. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi pengaruh seperti itu. Kalaupun ada yang terpengaruh kultur asing, mereka bukan orang asli Bali. Menurut informan dari Disnaker, memang orang muda (*truna-truni*) di Bali diarahkan untuk menerima secara positif budaya-budaya yang masuk dari luar, kemudian orang tuanya bertugas untuk memfilter itu.

Yang juga menarik dari deskripsi di atas adalah bahwa aspek perencanaan yang kemudian disosialisasikan secara intensif kepada masyarakat tempatan dapat menciptakan kelancaran dalam pengembangan suatu pembangunan (dalam hal ini akomodasi). Apalagi bila masyarakat lokal diberi peluang untuk dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi pariwisata yang ada di lingkungannya.

Dalam konteks keamanan daerahnya masyarakat memberdayakan desa adatnya. Sebagai contoh, dulu sekitar tujuh atau delapan tahun yang lalu banyak pedagang asongan yang menghalangi jalan sehingga orang tidak bisa jalan, mengganggu kenyamanan. Kemudian, setelah aparat lepas tangan tidak bisa menertibkan

mereka, pedagang asongan itu diperangi habis oleh desa adat sehingga sekarang ini sudah tidak ada lagi pedagang asongan. Demikian pula pencuri, pencopet, disikat habis oleh desa adatnya. Atau kalau ada toko yang diperingatkan untuk dibongkar ternyata tidak juga dibongkar seperti yang telah ditentukan, maka dibakar dan semua barangnya diambil. Tetapi kalau kios resmi tidak masalah. Kalau ada yang mau bergolak semua desa adat mengeluarkan semua banjanya, sehingga pendatang tidak bisa bertindak macam-macam. Akhirnya sekarang daerah wisata di Bali aman dan agak bersih dan tertata.

BAB IV

KONDISI, BENTUK-BENTUK PROGRAM PEMBERDAYAAN PARIWISATA KOMUNITAS MARJINAL LOKAL YANG PERNAH DAN SEDANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH, SERTA RESPONS MASYARAKAT

4.1 *Community Empowerment* Kementerian Pariwisata Melalui PNPM Mandiri

Dalam rangka memberdayakan masyarakat di sektor pariwisata Kementerian Pariwisata melakukannya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata. Kebijakannya diturunkan melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata

Adapun tujuan utama dari PNPM Mandiri Pariwisata adalah meningkatkan kemampuan, menciptakan lapangan kerja, dan usaha masyarakat di sektor pariwisata yang secara khusus dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya;
- (2) Meningkatkan modal masyarakat seperti kesadaran kritis, potensi sosial dan budaya serta kearifan lokal;
- (3) Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*);

- (4) Meningkatkan akses permodalan, inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat; dan
- (5) Membangun kemitraan lintas sektor untuk menunjang pembangunan kepariwisataan di Desa Wisata.

Sedangkan yang menjadi sasaran dari kegiatan ini adalah:

- (1) Meningkatkan kapasitas Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di desa/kelurahan dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat dalam bidang kepariwisataan;
- (2) Tersedianya dokumen perencanaan desa/kelurahan (RPJM desa/kelurahan, PJM Nangkis atau sebutan yang lainnya) yang membuat program penanggulangan kemiskinan melalui sektor pariwisata;
- (3) Meningkatnya kapasitas kemampuan berusaha dan berkarya masyarakat di Desa Wisata dan sekitarnya, yang mencakup wilayah pedesaan atau komunitas masyarakat yang memiliki hubungan atau keterkaitan fungsi dan peran (sebagai objek pendukung, pemasok bahan baku, pemasok logistik, dan sebagainya), sehingga masyarakat miskin yang berdomisili di sekitar daya tarik wisata atau pusat-pusat kegiatan pariwisata dan budaya tersebut dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- (4) Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*); dan
- (5) Terwujudnya kemitraan atau kerja sama LKM dengan pemangku kepentingan untuk menunjang pembangunan kepariwisataan di Desa Wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.1.1 Pengertian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

- (1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- (2) PNPM Mandiri Pariwisata adalah bagian dari PNPM Mandiri yang pelaksanaannya melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dan pemberian Bantuan Desa Wisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan kepariwisataan di Desa Wisata.
- (3) Pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.
- (4) Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
- (5) Gugusan (*cluster*) Pariwisata adalah desa dan masyarakat yang memiliki keterkaitan atau dampak langsung, tak langsung maupun ikutan dengan aktivitas kepariwisataan di suatu daerah/destinasi.
- (6) Bantuan Desa Wisata adalah bantuan langsung masyarakat yang merupakan dana *stimulant* keswadayaan yang diberikan kepada kelompok kelompok masyarakat Desa Wisata untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.
- (7) Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LKM adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat di setiap desa/kelurahan, yang berfungsi secara kolektif dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dana kegiatan PNPM Mandiri desa/kelurahan dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan.

- (8) Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (9) Masyarakat miskin adalah masyarakat yang secara ekonomis pendapatan per kapitanya per tahun berada di bawah standar minimum pendapatan per kapita nasional dan infrastruktur desa yang sangat terbatas.
- (10) Kemitraan adalah hubungan saling ketergantungan yang menguntungkan dari pelaku usaha. Dalam hubungan tersebut kedua belah pihak memiliki kedudukan yang setara, tidak saling merendahkan, dan memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang sama.
- (11) Rencana Usulan Kegiatan (RUK) adalah rencana kegiatan dalam rangka pengembangan usaha pariwisata di Desa Wisata yang diusulkan oleh kelompok masyarakat.

4.1.2 Pendekatan dan Strategi

4.1.2.1. Pendekatan

Program PNPM Mandiri Pariwisata dilaksanakan dengan pendekatan:

- (a) Pemberdayaan Masyarakat
Seluruh proses implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan) melibatkan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan.
- (b) Keberpihakan kepada yang miskin
Orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil ditujukan kepada masyarakat miskin.
- (c) Desentralisasi
Memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pembangunan kepariwisataan di desanya dengan menggunakan sumber dana dari pemerintah pusat.

- (d) Partisipatif
Masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari perempuan.
- (e) Keadilan dan Kesetaraan Gender
Masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan hak yang sama dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata. PNPM Mandiri Pariwisata harus menjadi pendorong peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam bidang kepariwisataan serta menumbuhkembangkan ekonomi kreatif pendukung bidang kepariwisataan.
- (f) Keswadayaan
Masyarakat menjadi aktor utama dalam keberhasilan pembangunan, melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan kegiatan.
- (g) Keterpaduan program pembangunan
Penguatan Kapasitas Kelembagaan
- (h) Meningkatkan kemampuan LKM dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
- (i) Pembangunan Pariwisata yang terintegrasi
Dalam pembangunan pariwisata melibatkan sektor lain yang terkait.
- (j) Pembangunan pariwisata berkelanjutan
Dalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelestarian dan pengembangan program pada waktu-waktu yang akan datang. Dengan demikian pasca pelaksanaan program, masyarakat dan instansi terkait masih dapat memanfaatkan, mengembangkan dan mendayagunakannya untuk kesejahteraan.

4.1.2.2. Strategi

PNPM Mandiri Pariwisata difokuskan pada pemberdayaan masyarakat Desa Wisata yang menjadi bagian dari gugusan (*cluster*)

pariwisata tertentu. Pendekatan gugusan (*cluster*) menggambarkan konsentrasi geografis dan integrasi fungsional dari komponen mata rantai usaha yang saling terkait dalam suatu bidang pengembangan tertentu. Aspek utama dari konsep pengembangan berbasis gugusan (*cluster*) adalah kedekatan geografis dari sektor-sektor usaha terkait yang secara sinergis saling bekerja sama dalam meningkatkan daya saing produk dan usaha. Dalam konteks pengembangan pariwisata, konsep pengembangan berbasis gugusan (*cluster*) dapat diadopsi untuk mendukung dan meningkatkan daya saing dan distribusi manfaat pengembangan suatu daya tarik wisata atau kantong-kantong pariwisata terhadap wilayah terkait atau penyangganya.

Desa atau komunitas masyarakat di sekitar pusat kegiatan pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan kegiatan pariwisata yang terjadi di suatu wilayah. Desa dengan potensi yang dimilikinya, baik berupa keunikan, lingkungan alam, budaya, potensi ekonomi dan pertanian dapat memperkuat pengembangan kegiatan pariwisata yang sudah berlangsung. Desa tersebut dapat berperan sebagai pendukung daya tarik wisata dan sebagai sumber pasokan komponen-komponen tertentu yang diperlukan untuk kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, pendekatan strategis yang dilakukan adalah pendekatan secara fisik maupun nonfisik. Pendekatan fisik merupakan metode umum dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus seperti meningkatkan akses dan keterkaitan antarpusat pengembangan. Sedangkan pendekatan nonfisik merupakan metode khusus dengan mengembangkan budaya daerah dan kearifan lokal.

4.1.2.3 Pendekatan Fisik Dilakukan Melalui:

- (a) Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan akses dan jaringan keterkaitan antara desa penyangga dengan pusat kegiatan pariwisata seperti daya tarik wisata, hotel/resort;

- (b) Mengonservasi sejumlah bangunan yang memiliki nilai seni, budaya, sejarah, arsitektur lokal yang tinggi dengan tetap mempertahankan nilai keasliannya;
- (c) Mengubah fungsi bangunan menjadi sesuatu yang berkontribusi pada pengembangan kegiatan kepariwisataan;
- (d) Mengembangkan bentuk-bentuk penginapan di dalam wilayah Desa Wisata yang dioperasikan oleh penduduk desa; dan
- (e) Mengembangkan usaha-usaha terkait dengan jasa kepariwisataan.

4.1.2.4 Pendekatan Nonfisik Dilakukan Melalui:

- (a) Pelestarian kearifan lokal, budaya, dan kekhasan daerah; dan
- (b) Pelatihan-pelatihan manajemen pariwisata, kuliner, kerajinan, bahasa, dan lain-lain.

Dalam kerangka program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan Desa Wisata, mengacu pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Model pendekatan yang dikembangkan meliputi tiga gugusan (*cluster*) sebagai berikut:

(a) Model Gugusan (*Cluster*) Daya Tarik Wisata-Desa Terkait

Model gugusan (*cluster*) Daya Tarik Wisata-Desa Terkait merupakan model pengembangan yang menempatkan daya tarik wisata sebagai pusat pengembangan, sedangkan desa-desa atau masyarakat di sekitarnya menjadi penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata.

Contoh: Kawasan Candi Borobudur memiliki posisi strategis sebagai pusat dan penggerak kegiatan pariwisata yang mampu mendistribusikan manfaat ekonomi bagi desa-desa sekitarnya.

(b) Model Gugusan (*Cluster*) Desa Wisata–Desa Terkait

Model gugusan (*cluster*) Desa Wisata–Desa Terkait merupakan model pengembangan yang menempatkan Desa Wisata sebagai pusat pengembangan dan penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata, sedangkan desa-desa atau masyarakat di sekitarnya

menjadi pendukung, sekaligus penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata.

Contoh: Desa Wisata Kasongan, Yogyakarta memiliki posisi strategis sebagai pusat penggerak kegiatan pariwisata yang mampu mendistribusikan manfaat ekonomi bagi desa-desa sekitarnya.

(c) Model Gugusan (*Cluster*) Usaha Pariwisata–Desa Terkait

Model gugusan (*cluster*) Usaha Pariwisata–Desa Terkait merupakan model pengembangan desa-desa yang berada di sekitar lokasi usaha pariwisata seperti hotel, resort, dan kuliner, yang memiliki keterkaitan fungsi secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks ini, fasilitas atau usaha pariwisata tersebut memiliki posisi strategis sebagai pusat dan penggerak pengembangan yang mampu mendistribusikan manfaat ekonomi bagi desa-desa sekitarnya.

4.1.3 Kelompok sasaran dan Penerima Manfaat PNPM Mandiri Pariwisata

4.1.3.1. Kelompok Sasaran PNPM Mandiri Pariwisata

Kelompok sasaran PNPM Mandiri Pariwisata, yaitu pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat. Bantuan untuk kelompok sasaran diuraikan sebagai berikut:

(a) Masyarakat

Sasaran PNPM Mandiri Pariwisata di masyarakat meliputi masyarakat desa, LKM dan kelompok masyarakat. Bentuk bantuan yang diberikan berupa Bantuan Desa Wisata, peningkatan kapasitas dan pendampingan.

(b) Pemerintah Daerah dan Swasta

Sasaran PNPM Mandiri Pariwisata ditujukan pada Pemerintah Daerah dan swasta meliputi Perangkat Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/kota, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Propinsi dan Kabupaten/Kota. Bentuk bantuan yang diberikan berupa peningkatan kapasitas.

4.1.3.2. Penerima Manfaat PNPM Mandiri Pariwisata

Penerima manfaat langsung dana Bantuan Desa Wisata yang disediakan melalui PNPM Mandiri Pariwisata adalah masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi, disepakati, dan ditetapkan bersama oleh masyarakat desa/kelurahan melalui proses musyawarah warga.

4.1.4 Bantuan Program PNPM Mandiri Pariwisata

4.1.4.1. Bantuan untuk Masyarakat

Masyarakat mendapatkan bantuan program PNPM Mandiri Pariwisata berupa peningkatan kapasitas, bantuan pendampingan, dan bantuan dana.

- (a) Peningkatan Kapasitas dan Bantuan Pendampingan
Peningkatan kapasitas dan bantuan pendampingan PNPM Mandiri Pariwisata diberikan dalam bentuk penugasan konsultan, tim teknis dan fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu merencanakan dan melaksanakan program PNPM Mandiri Pariwisata di desa/kelurahan masing-masing.
- (b) Bantuan Dana Desa Wisata
Bantuan dana diberikan dalam bentuk Bantuan Desa Wisata, bersifat *stimulant* dan disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata yang telah direncanakan. Penggunaan dana Bantuan Desa Wisata yang disalurkan melalui LKM kepada pelaku pariwisata di Desa Wisata diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan kolektif yang menyentuh langsung masyarakat miskin. Dana Bantuan Desa Wisata merupakan dana publik, sehingga nilai alokasi dana Bantuan Desa Wisata tiap desa/kelurahan harus diinformasikan secara luas dan transparan kepada masyarakat.

4.1.4.2. Bantuan untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Swasta Lainnya

Bantuan peningkatan kapasitas pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan swasta lainnya pada dasarnya merupakan kegiatan yang berorientasi pada upaya membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Bantuan peningkatan kapasitas diberikan dalam bentuk:

- (a) Pelatihan (*coaching*) perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan, terintegrasi dan berbasis masyarakat. Pelatihan (*coaching*) akan dilakukan untuk pemerintahan kabupaten/kota yang difasilitasi oleh konsultan manajemen; dan
- (b) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM). Pemerintah kabupaten/kota harus membangun media pengaduan masyarakat untuk menampung berbagai keluhan masyarakat. Tujuannya agar terbangun kontrol sosial warga dalam memonitor seluruh pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata sehingga segala bentuk penyimpangan dapat dikurangi serta diantisipasi sejak dini oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.¹

4.2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui PNPM Mandiri dan Respons Dinas Pariwisata

Secara keseluruhan jumlah desa di Bali yang sudah mendapat bantuan PNPM Mandiri meliputi 40 desa, yakni pada 2011 sebanyak 31 desa; tahun 2009 sebanyak 10 desa, dan tahun 2010 sebanyak 14 desa. Namun demikian bila ditotal jumlahnya desa yang mendapat bantuan PNPM mandiri tersebut bukan 31 + 10 + 14 desa, karena ada beberapa desa yang mendapat bantuan dari PNPM lebih dari 1 kali. Tapi umumnya mendapat bantuan dua kali sehingga jumlah keseluruhan yang

¹Lihat Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Melalui Desa Wisata (Sekretariat PNPM Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata)

telah mendapat PNPM mandiri sebanyak 40 desa. Secara kebetulan, sembilan desa di antaranya juga mendapat bantuan non-PNPM dari Dinas Pariwisata. Namun Karena pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata provinsi belum ada yang seperti dilakukan PNPM, maka kegiatannya dapat bersinergi. Artinya, di satu sisi PNPM memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, di sisi lain Dinas Pariwisata memberikan pemberdayaan masyarakatnya melalui peningkatan kapasitas masyarakat yang terkait dengan kegiatan pariwisata dengan pendanaan dari APBD.

Sejauh ini Dinas Pariwisata belum mengetahui peningkatan ekonomi masyarakat dari program PNPM karena program dan konsultannya turun langsung dari pusat. Bantuannya pun berbeda-beda di tiap desanya tergantung kebutuhannya. Namun keinginan pusat umumnya lebih besar ke pemberdayaannya. Bila dipersentasekan rasio pembagiannya adalah 40–60, yakni 40 untuk infrastruktur dan 60 untuk pemberdayaan, meskipun ada juga yang 60 untuk infrastruktur 40 untuk pemberdayaan karena tergantung kebutuhan.

Persoalannya, meskipun pada tataran implementasi di lapangan ada yang bisa bersinergi, namun kadang kala program Kementerian (PNPM) tersebut tidak selaras dengan program Dinas Pariwisata. Misalnya, ketika kementerian memberikan bantuan PNPM Mandiri, kadang kala programnya dilakukan langsung ke desa tanpa koordinasi dengan Dinas Pariwisata. Akibatnya Dinas Pariwisata kesulitan melakukan monitoringnya, termasuk monitoring proposal yang diajukan oleh desa itu. Pihak Dinas Pariwisata tidak diberi-tahukan tujuan dari penggunaan dananya, karena proposal dan implementasinya langsung ke desa. Padahal walaupun Dinas Pariwisata tidak diberi tugas secara khusus dan tidak diberikan dana, tetapi karena yang diberi bantuan adalah masyarakat Bali, maka Dinas Pariwisata harus juga melakukan monitoring. Untuk mengatasi persoalan itu, pihak daerah merasa perlu ada pembenahan dalam sistem pemberian bantuan PNPM mandiri tersebut yang melibatkan daerah. Karena bagaimanapun daerah harus tahu apakah program yang diberikan pusat sudah tepat atau belum,

mengingat yang paling tahu mengenai kondisi daerah kabupaten adalah bupati, atau kepala desa bila di desa, atau dinas propinsi.

Menurut informan, memang dalam memberikan bantuan kepada Desa Wisata dapat dikatakan sudah tepat, dalam artian program PNPM itu tepat ke masyarakat desa. Tetapi dalam memberi bantuan kepada desa-desa tersebut, kadang terjadi desa yang lebih berpotensi justru tidak mendapat bantuan, sementara yang tidak berpotensi yang mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, pelibatan instansi daerah dalam proses pemberian bantuan program PNPM menjadi penting, karena yang lebih tahu tentang potensi desa adalah pihak propinsi dan kabupaten. Sebagai contoh, ada dua kasus di kabupaten Bangli yakni desa Trunyan dan Songan yang PNPMnya dihentikan karena mungkin salah sasaran. Dalam hal ini pihak pusat ingin membantu masyarakat di sana walaupun masyarakatnya belum siap atau mungkin mereka tidak paham pengelolaannya. Dalam hal ini dana bantuan PNPMnya sudah diturunkan dari pusat, tetapi ternyata masyarakatnya tidak mau/sukar untuk diarahkan, misalnya harus membuat MCK atau membuat saluran air atau yang lain. Akibatnya dana yang ada tidak dipakai sehingga mubazir, padahal bantuan dana yang sudah diturunkan tersebut harus digunakan. Oleh karena itu, pada tahun berikutnya desa tersebut tidak mendapat bantuan lagi.

Contoh lainnya, desa-desa di kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng paling banyak mendapat PNPM Mandiri, sehingga Dinas Pariwisata diprotes oleh kabupaten lain karena dianggap tidak adil. Padahal semua usulan kabupaten sudah diusulkan dan diperjuangkan oleh propinsi, tetapi pihak propinsi tidak memiliki kewenangan untuk menentukan, karena kewenangannya hanya sebatas mengusulkan saja. Yang berhak untuk menentukan adalah tingkat pusat atau keputusan mutlak ada di pusat.

Memang mungkin karena untuk mendapatkan bantuan PNPM tersebut menggunakan ukuran/kriteria luas wilayah, maka kabupaten Buleleng yang wilayahnya luas mendapat bantuan PNPM lebih banyak dari kabupaten lainnya. Tetapi bagi pihak propinsi, perlu ada kebijakan

jangan sampai kabupaten lain tidak mendapatkan, karena ketika muncul protes seperti itu, pihak propinsi kesulitan menjawabnya. Implikasinya berkembang dugaan bahwa kabupaten tersebut mendapat banyak bantuan PNPM karena *incumbent* Menteri Kebudayaan dan Pariwisata berasal dari sana.

4.3 Respons Pengusaha Akomodasi Terhadap PNPM Mandiri

Bagi pengusaha akomodasi adanya program pemerintah, seperti PNPM Mandiri di desa Bedulu sebetulnya bagus, karena pemerintah memang pintar berencana. Tetapi yang terkadang memprihatinkan karena sebagian uang bantuan PNPM tersebut hanya tersimpan di bank, tidak digunakan untuk melakukan kegiatan. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak mengajarkan tentang *know how* bagaimana melakukan itu. Dalam pengisian laporan pun isinya tidak menggambarkan kegiatannya. Orang yang dibantu hanya membuat laporan yang isinya, misal akan menggunakan 4 juta untuk membuat baliho, atau membuat tong sampah. Padahal dia tidak tahu bagaimana cara membuat baliho, ukurannya berapa kali berapa, harganya berapa, ditempatkan di mana. Seharusnya pengetahuan semacam itu yang perlu diajarkan. Pemerintah, dalam hal ini, seolah-olah hanya memberi uang lalu mengirimkan konsultannya. Padahal harusnya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pertama, ada petunjuk yang jelas tentang penggunaan uang tersebut seperti untuk dipakai kegiatan tertentu, sesuai dengan programnya. Kedua, yang penting diajarkan bagaimana cara menyambut tamu yang datang yang mengekspresikan *hospitality*, bagaimana melayani tamu, *table manner*, mengatur tempat tidur, dan sebagainya. Sejauh ini pelaksana program pemerintah tidak mengajarkan hal semacam itu. Memang diakui oleh informan bahwa ada fasilitatornya, tetapi yang diajarkan hal lain. Jadi sebenarnya program pemerintah tersebut bagus, hanya saja lemah dalam implementasinya. Yang penting dalam melakukan *community empowerment* adalah mengetahui bagian mana yang harus diberikan *support*. Untuk itu tentunya dibutuhkan fasilitator yang memiliki *technical skill* dalam hal itu.

Paparan di atas baik menyangkut respons Dinas Pariwisata maupun pengusaha terhadap pemberdayaan masyarakat melalui PNPM mandiri menunjukkan bahwa program PNPM merupakan program bantuan pusat yang bagus dan akan bermanfaat bagi daerah. Persoalannya muncul terkait koordinasi antarpusat dan daerah baik menyangkut sistem distribusi program maupun pemilihan fasilitator yang mendampingi pelaksanaan program di daerah. Hal ini tentunya harus menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat untuk memperbaiki sistem pemberian dan pelaksanaan PNPM mandiri di daerah sehingga lebih efisien dan efektif.

4.4 Upaya *Community Empowerment* Pemerintah Daerah Provinsi Bali

Dalam kebijakannya, Pemerintah Daerah provinsi Bali pada dasarnya melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, bantuan modal, *capacity building*, *knowledge*, *skill*, perdagangan, pertanian, tata kelola, tenaga kerja, kerajinan, penguatan sosial-budaya, dan penciptaan peluang usaha baru yang diarahkan untuk pengentasan kemiskinan

Dalam konteks *community empowerment*, ada gagasan gubernur Bali yang menarik untuk dikaji yang berjudul "Indahnya Berbagi". Dalam rangka pengentasan kemiskinan, mulai tahun lalu (2010), masing-masing SKPD diberi angka kemiskinan yang harus ditangani oleh SKPD yang bersangkutan. Setiap SKPD dibebankan untuk menangani satu daerah dan sudah ditentukan daerahnya. Derivasi dalam kebijakan programnya, setiap pejabat di setiap instansi diwajibkan untuk membantu KK miskin dengan menggunakan uang pribadi. Mereka yang diwajibkan adalah pejabat eselon dua menangani 3 KK miskin, eselon tiga 2 KK miskin, dan eselon 4 menangani 1 KK miskin. Meskipun yang diwajibkan adalah pejabat struktural yang memegang jabatan, namun dalam implementasinya ada juga pegawai, seperti pegawai Dinas Pariwisata, yang turut berpartisipasi membuat program pengentasan kemiskinan dengan dana dari uang pribadi yang disisihkan dari gajinya.

Sebagai ilustrasi, untuk ikut mengentaskan kemiskinan tersebut Dinas Pariwisata mendapat kewajiban di Kecamatan Tegapulah, yakni di daerah Julah dan Pacung. Angka kemiskinan yang ada di daerah itu mendekati 1000 KK, namun sementara ini KK miskin yang bisa tangani Dinas Pariwisata baru 27 KK. Untuk menambah kuantitas masyarakat miskin yang ditangani, sebetulnya Dinas Pariwisata mempunyai stake holder BTB dengan sembilan anggotanya yang potensial diminta bantuannya. Namun sekarang ini Dinas Pariwisata belum berani mengajak mereka karena ingin mengerjakan sendiri dulu. Mungkin kalau sudah ada bukti kemajuannya, baru progres reportnya akan dilayangkan kepada *stakeholders* tersebut dan menghimbau mereka agar mau bergabung dengan dinas ini mengentaskan kemiskinan masyarakat desa.

Biasanya satu atau dua bulan sekali pada hari jumat, setelah olah raga, aparat Dinas Pariwisata turun ke wilayah binaannya yang merupakan daerah terpencil. Bantuan yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya, ada yang difasilitasi untuk sekolahnya, ada yang dibelikan ternak, ada yang dibedah rumahnya, ada dibuatkan jamban bagi yang tidak punya jamban, ada yang dibelikan jaring kalau dia nelayan yang tidak punya jaring, dan sebagainya. Kendalanya, kadang ketika akan memberi bantuan untuk merenovasi rumahnya ada juga yang tidak mau, karena, misalnya, tanah di mana rumah dia berada ternyata milik orang kaya dan dia tinggal di sana hanya selaku pekerjanya. Pihak pemilik tanah tidak mengizinkan rumahnya direnovasi. Dalam hal seperti itu Dinas Pariwisata mengalihkan jenis bantuannya, misalnya, menjadi bantu biaya sekolah anak-anaknya. Jadi besaran bantuannya tidak ditentukan karena tergantung dari kebutuhan dari keluarga asuh tersebut.

Dalam melakukan bantuan tersebut tidak harus semuanya didanai dari pribadi karena bisa juga memanfaatkan program bantuan yang ada di SKPD lain. Misalnya, dalam bantuan bedah rumah, maka Dinas Pariwisata bisa melakukan *cross check* ke Dinas Sosial untuk mengetahui ada tidaknya program bedah rumah di desa ini. Kalau misalnya ada, maka hanya perlu menyelaraskan saja dengan mengarahkan Dinas Sosial agar melakukan bedah rumahnya di KK terpilih. Demikian juga mengenai program bea siswa, mungkin bisa di

cross check lagi di Dinas Dispora, dan sebagainya. Model seperti ini bisa direalisasikan, misalnya baru-baru ini Dinas Pariwisata bisa membantu dana bea siswa 18 juta rupiah untuk KK di desa itu dengan memanfaatkan program beasiswa dari Diknas, kemudian untuk *life skill* sekitar 25 juta rupiah. Jadi di sini aparat Dinas Pariwisata berperan sebagai fasilitator. Hal seperti ini juga bisa dilakukan karena ada koordinasi dengan dinas lain yang dilakukan setiap tiga bulan sekali di mana ada paparan SKPD tri wulan. Dalam koordinasi ini juga mengundang Bapeda kabupaten/kota jangan ada program yang *overlapping* antara dinas propinsi dan dinas kabupaten/kota

Seperti telah diungkapkan pada kerangka teoritis, pelaksanaan *community empowerment* memerlukan proses dan komitmen dari para pemangku kepentingan. Dalam konteks itu, deskripsi di atas memperlihatkan bahwa Pemda Bali yang merupakan salah satu *stakeholder* kepariwisataan Bali telah memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan *community empowerment*. Melalui instansi yang ada di bawahnya Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk melaksanakan berbagai program kemiskinan. Bahkan langkah yang dilakukannya sudah melintas ke luar jalur kedinasan di mana pejabat yang menduduki jabatan struktural diberi kewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat miskin dengan menggunakan uang pribadi. Artinya dalam hal ini pejabat dalam kapasitas pribadinya sebagai masyarakat (PNS) didorong paksa untuk bahu membahu dengan pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Yang menarik adalah bahwa kebijakan tersebut justru mendapat sambutan positif dari pegawai non struktural untuk turut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat tersebut. Selain itu mereka pun memiliki peluang untuk memanfaatkan program, baik yang ada di instansinya maupun instansi lainnya dengan cara melakukan *cross check* program dan mengarahkan target sasaran program yang ada di wilayah pemberdayaannya. Dengan adanya peluang tersebut maka tentunya akan menciptakan sinergi yang efektif dalam memberdayakan masyarakat baik di dalam instansinya maupun antarinstansi Pemerintah Daerah yang berimplikasi pada akselerasi pemberdayaan masyarakat marginal. Persoalannya bila ditinjau dari sisi

community empowerment, program yang dijalankan dalam ”Indahnya Berbagi” ini tidak terfokus pada upaya pemberdayaan kemandirian masyarakat. Upaya yang dilakukan masih bercampur antara *community empowerment* dan *charity*.

4.5 Community Empowerment Dinas Pariwisata Provinsi Bali

4.5.1 Program Pemberdayaan Dinas Pariwisata Melalui Pengembangan Desa Wisata

Dalam konteks *community empowerment*, Dinas Pariwisata provinsi Bali melakukan pengembangan Desa Wisata yang dilakukan melalui pemberdayaan. Implementasinya, setiap tahun Dinas Pariwisata meminta kabupaten untuk mengusulkan desa untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata. Oleh Dinas Pariwisata propinsi usulan tersebut kemudian disampaikan ke pusat untuk mendapat persetujuan. Kalau usulan tersebut disetujui, maka ketika persetujuannya keluar juga mendapat dana pendukung dari pusat.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang pariwisata provinsi Bali mendapat bantuan dari pusat dalam bentuk alokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan itu Dinas Pariwisata provinsi Bali, antara lain, melakukan kegiatan loka-karya di beberapa desa yang sebelumnya sudah dilakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh perguruan tinggi yakni UNUD yang sudah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata propinsi Bali sejak tahun 2004 dan melakukan penelitian di 58 desa. Loka-karya tersebut adalah mengujihasil kajian penelitian dari perguruan tinggi tersebut. Kerja sama penelitian ini dilakukan dalam jangka panjang karena adanya keterbatasan APBD, sehingga kegiatan penelitiannya harus dilakukan bertahap. Penelitian ini mencoba menggali potensi dan kapasitas masyarakatnya dalam memahami pariwisata di daerahnya. Sejauh ini ada 28 desa yang sudah dikaji potensinya. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa desa-desa tersebut mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi Daya Tarik Wisata Bali.

Dari 28 desa yang telah dikaji rencananya akan diloka-karyakan semua karena berdasarkan penelitian tersebut semuanya potensial. Dalam lokakarya tersebut akan digali keinginan masyarakatnya, sehingga setelah lokakarya mungkin bisa mengembangkan fasilitasnya. Misalnya, untuk desa yang kurang fasilitasnya maka dibantu pembangunan fasilitasnya seperti membangun jalan *trekking*, sarana dan prasarana kesehatan seperti toilet, dan sebagainya.

Loka karya ini dihadiri oleh peneliti dan Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali sebagai nara sumber, Kepala Dinas Pariwisata kabupaten yang bersangkutan, Bappeda kabupaten sebagai pembuat perencanaan. Dalam loka karya ini pihak kabupaten sebagai pembicara, sedangkan pesertanya tiga orang aparat kecamatan sebagai wakil dari kecamatan, tiga orang aparat desa, perbekel (kepala desa adat) beserta jajarannya, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh yang peduli kepada pariwisata, selebihnya sekitar 34 orang adalah masyarakat desa yang diperkirakan mempunyai potensi untuk diajak membangun pariwisata.

Dalam operasionalnya pengembangan Desa Wisata tersebut dimulai dari memberikan bimbingan kepada desa yang bersangkutan, menggali potensi yang mereka miliki, aksesibilitasnya, SDMnya, dan persetujuan dari masyarakat lokal. Setelah itu, ditindaklanjuti dengan mengadakan seminar-seminar dan lokakarya yang diselenggarakan langsung di desa itu untuk membahas apa yang mau mereka kembangkan. Baru kemudian, Dinas Pariwisata membimbing mereka, misalnya dengan memberikan bantuan dana PNPM mandiri dari kementerian.

Sampai dengan tahun 2010 Dinas Pariwisata propinsi sudah menggarap tiga desa sebagai Desa Wisata. Kemudian pada tahun 2011 Dinas Pariwisata memiliki tiga desa yang akan dikembangkan yang kemudian diloka-karyakan di tiga desa tersebut pada bulan Mei. Direncanakan sampai akhir tahun 2011 ada sembilan desa yang potensi desanya akan digali dan dikembangkan melalui loka karya, termasuk mencari cara agar masyarakatnya dapat secara aktif ikut dalam kegiatan pariwisata.

Keinginan mereka untuk diakomodasikan dalam format usulan program itu sangat relatif karena usul dan keinginan dari mereka cukup banyak. Sebenarnya proposal yang disampaikan dalam loka-karya banyak sekali yang relevan untuk digarap, tetapi karena keterbatasan yang ada, terutama anggaran, maka keinginan mereka tidak dapat dipenuhi semuanya. Sehingga pemilihan harus dilakukan secara selektif. Artinya kalau usulan tersebut memang realistis dan memang menjadi program bidang pengembangan pariwisata dari Dinas Pariwisata, maka akan diakomodasi. Kalau mereka sudah siap sisi SDM dsbnya, maka Dinas Pariwisata baik tingkat propinsi maupun kabupaten akan memfasilitasinya.

Dilihat dari sisi implementasinya, selama ini program pemberdayaan yang sudah jalan baru di enam desa tersebut. Pihak Dinas Pariwisata menyatakan program ini berjalan relatif bagus. Artinya loka karya yang dilakukan dan ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan terbukti memberikan motivasi kepada masyarakat desa sehingga menimbulkan semangat baru. Bahkan ada beberapa tokoh yang tertarik dengan pariwisata di desa itu yang telah melakukan langkah-langkah seperti misalnya membuat brosur, kemudian dimasukkan ke dalam websitenya dan berhasil meningkatkan kunjungan wisata ke desa tersebut.

Dalam mengimplementasikan program pemberdayaan ini yang diandalkan adalah "pokdarwis" (kelompok sadar wisata), yang sudah lama terbentuk dan kelompok itu mereka bentuk sendiri. Pokdarwis ini telah terbentuk di banyak desa. Desa-desa yang sudah maju tidak lagi diberi bantuan pemberdayaan. Desa yang difasilitasi Dinas Pariwisata difokuskan pada desa yang baru yang memiliki semangat dan mau maju. Hasil dari pemberdayaan yang dilakukan, setelah dievaluasi, cukup positif yang ditandai oleh adanya peningkatan kunjungan dalam wisatawan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam memberdayakan masyarakat adalah rendahnya keterampilan yang diperlukan di bidang pariwisata karena mungkin yang dibutuhkan adalah keterampilan yang

agak spesifik. Misalnya bagaimana memberikan pelayanan, tingkat kebersihan dan sapta pesona. Meskipun ada sedikit kesulitan tetapi Dinas Pariwisata menganggap hal itu sebagai tantangan yang memang harus diatasi. Sementara kendala lainnya utamanya terkait dengan pemasaran produk yang ada di sana.

Dilihat dari bentuk pemberdayaannya, sejauh ini pemberdayaan di bidang pariwisata belum ada model ekonomi seperti dana bergulir. Pemberdayaan yang dilakukan umumnya dalam bentuk pelatihan-pelatihan, seperti untuk meningkatkan keterampilan kerajinan. Sebagai contoh, bila ada satu desa yang mempunyai potensi bidang kerajinan, kemudian kualitasnya belum memenuhi seperti yang diinginkan wisatawan maka diberikan pelatihan ketrampilan pembuatan kerajinan. Sayangnya Tidak pernah dibuat program uji coba mengenai pelatihan untuk usaha yang dapat memperlihatkan efektivitas dari pelatihan tersebut. Bahkan yang dilakukan PNPM di enam desa pun berbentuk kursus-kursus, belum ada kegiatan yang berbentuk seperti dana bergulir.

Bila dilihat dari partisipasi masyarakatnya, dari pengalaman melaksanakan loka karya di enam desa menunjukkan bahwa respons masyarakat cukup bagus, dalam artian mereka yang diundang hadir semua. Dalam loka karya tersebut terungkap bahwa pada umumnya desa mereka kesulitan dalam penyediaan sarana dan prasarana dan kualitas SDM pariwisatanya, sehingga mereka menginginkan agar desa yang bersangkutan dibantu. Selain itu karena bisnis pariwisata mengutamakan *service*, mereka pun ingin dibantu membenahi bagaimana memberikan pelayanan (*service*) yang baik tersebut.

Sejauh ini tidak ada kendala berupa penolakan masyarakat untuk mengembangkan pariwisata di desanya. Hal itu terjadi karena walaupun desa itu sudah berkembang menjadi Desa Wisata, tokoh masyarakat setempat tidak melihat adanya pengaruh buruk perkembangan pariwisata kepada anak muda di desa yang bersangkutan. Memang mungkin ada beberapa sisi negatifnya, tetapi karena masyarakat kuat membentengi diri mereka terhadap pengaruh-pengaruh negatif, maka dampak negatifnya menjadi tidak ada. Oleh karena itu, tidak ada anggota

masyarakat yang menolak karena mereka sadar bahwa, di samping pertanian, di Bali hanya pariwisata yang dapat diandalkan untuk menopang kehidupan ekonomi mereka. Mereka umumnya ingin merasakan kemajuan ekonomi seperti yang dinikmati masyarakat Bali bagian selatan seperti Ubud. Oleh karena itu, yang terjadi, Dinas Pariwisata justru banyak menerima proposal di luar 28 desa yang sudah dikaji. Mereka mengajukan proposal tersebut karena memang desa yang bersangkutan memiliki potensi, hanya saja karena adanya keterbatasan pemerintah maka proposal tersebut belum dapat direspons.

4.5.2 Program Pemberdayaan Dinas Pariwisata Melalui Bimbingan Teknis (Bintek)

Di Bali ada dua jenis desa yaitu desa dinas dan desa *Pakraman* (adat) yang memiliki peran berbeda. Desa dinas urusannya terkait dengan masalah administrasi kependudukan, sementara desa Pakraman batasan urusannya tidak administratif melainkan mengatur ketentuan-ketentuan mengenai yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di desa itu, kemudian juga mengatur tentang upacara adat dan agama. Namun bisa juga terjadi penggabungan kegiatan kedua jenis desa tersebut.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata, khususnya yang terkait dengan sektor akomodasi wisata, Bintek Dinas Pariwisata provinsi Bali memberikan pembekalan untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman kepada tenaga kerja yang bergerak di bidang pariwisata. Gagasan untuk memberikan bimbingan teknis tersebut muncul karena ada pada Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dinas. Secara kelembagaan Dinas Pariwisata memiliki berbagai bidang yang salah satu bidangnya adalah sumber daya pariwisata. Salah satu tugas pokok dari bidang tersebut adalah memberdayakan masyarakat yang secara struktural operasionalnya dilakukan oleh salah satu seksi di bidang sumber daya pariwisata yaitu seksi Diklat (Pendidikan dan Latihan) tenaga pariwisata. Untuk melaksanakan Tupoksi seksi tersebut, implementasinya dilakukan melalui Bintek (bimbingan teknis). Dalam melakukan pemberdayaan ini orientasi dari bintek tersebut adalah

meningkatkan tenaga teknis. Dalam pelaksanaannya Bintek ini dibatasi waktunya hanya boleh lebih dari tiga hari, karena kalau lebih dari tiga hari maka harus dilaksanakan oleh badan diklat. Padahal badan diklat beban pekerjaannya sudah banyak sehingga tidak mungkin akan mengambil alih penyelenggaraan bintek ini.

Pembekalan melalui bintek ini diberikan baik kepada pengelola maupun kepada penjaga DTW (Daya Tarik Wisata) yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Bali, karena biasanya setiap DTW memiliki pengelola dan penjaga sendiri. Pengelola DTW biasanya berasal dari desa Pakraman (desa adat) atau dari swasta.

Secara operasional implementasi pemberdayaan masyarakat pariwisata tersebut dilakukan dengan cara jempot bola ke kabupaten/kota. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya provinsi tidak mempunyai DTW. Sesuai dengan kewenangannya, yang mempunyai DTW adalah kabupaten/kota. Oleh karena itu, yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah semua kabupaten kota. Artinya peserta bintek tersebut adalah administrasi kabupaten/kota dan kabupaten/kota pulalah yang menentukan mana yang di prioritaskan.

Upaya pemberdayaan melalui bintek ini harusnya merupakan langkah penting, namun setelah di cek kepada dinas terkait di kabupaten/kota, ternyata mereka sama sekali belum pernah melaksanakan bimbingan teknis (bintek), baik kepada para pengelola atau pun penjaga DTW. Sejauh ini yang dilakukan kabupaten/kota hanya berupa pembinaan biasa dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi/lapangan. Artinya pihak Kabupaten/Kota hanya memberikan arahan-arahan atau hanya sekedar datang saja ke lokasi DTW. Atas dasar itu Dinas Pariwisata Provinsi Bali melakukan bimbingan teknis yang dilakukan dengan cara mengundang peserta yang akan diberi bimbingan teknis dari kabupaten/kota dan didanai dari APBD Propinsi, kemudian memfokuskan mereka di satu tempat di provinsi. Bintek ini dilakukan satu tahun sekali dengan masing angkatan berjumlah 45 orang di mana setiap kabupaten/kota diberi jatah untuk mengirimkan 5 orang peserta.

Dalam melaksanakan bintek ini pihak Dinas Pariwisata provinsi Bali bekerja sama dengan Perguruan Tinggi seperti Universitas Udayana (UNUD), Sekolah Tinggi Pariwisata (STP), Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI). Adapun materi bimbingan yang diberikan, antara lain, mengenai kebijakan pengembangan pariwisata Bali, tehnik memandu wisatawan, pengetahuan tentang sadar wisata dan sapta pesona, sejarah obyek pariwisata Bali, dan tehnik pemasaran yakni bagaimana memasarkan produk pariwisata. Di dalam Bintek Pramuwisata, materi pelajaran yang diberikan, antara lain sejarah obyek pariwisata yang ada di provinsi Bali. Dari itu paling tidak mereka harus tahu sejarah DTW tempatnya beroperasi atau yang dikelolanya. Dengan diberikannya materi pelajaran ini diharapkan yang bersangkutan juga mengetahui sejarah DTW lainnya. Namun sayangnya karena materi tersebut hanya dialokasikan 2 jam maka tidak mungkin diberikan semua materi tentang hal itu.

Dalam rangkaian pelaksanaan Bintek ini, biasanya semua peserta bintek dalam satu angkatan diberi kesempatan untuk PKL atau studi banding ke DTW yang pengelolaannya sudah bagus. Sebagai contoh, para peserta Bintek diajak studi banding ke DTW yang ada di Tanah Lot karena pengelolaannya dianggap sukses. Keberhasilan pariwisata di Tanah Lot terletak pada penataan pedagang cenderamata dan penataan kawasan serta lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat di Tanah Lot dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk menjadi petugas kebersihan, tukang parkir, dan tukang karcis. Dengan adanya studi banding ini para peserta bintek dapat mengetahui dan belajar dari keberhasilan pengembangan pariwisata di Tanah Lot untuk kemudian dikembangkan di daerahnya.

Dilihat dari antusiasme peserta Bintek, respon mereka umumnya sangat baik. Meskipun di lembaganya sendiri barangkali ada juga pelatihan, namun mereka tetap mengikuti kegiatan pelatihan yang diberikan oleh provinsi. Umumnya mereka memiliki motivasi ingin maju. Hal ini juga diperlihatkan oleh hasil kuesioner yang diberikan provinsi, di mana umumnya mereka menyatakan sangat memerlukan pelatihan tersebut karena dalam pelatihan itu diberikan juga pengetahuan

tentang cara memasarkan produknya. Bahkan mereka memohon supaya pelatihan ini terus berlanjut mengingat banyaknya penjaga obyek wisata di Bali yang berafiliasi dengan lebih dari 200 obyek wisata.

Untuk merespon permintaan di atas, sejak tahun 2010 Dinas Pariwisata provinsi Bali menyelenggarakan Bintek Pemandu Wisata Tirta. Bintek ini dikembangkan ke Tirta karena di Bali ada Gawisri (Gabungan Pengusaha Wisata Tirta) yang anggotanya terdiri dari perusahaan-perusahaan wisata tirta. Di Gawisri ini ada keluhan dan mempunyai keinginan untuk meningkatkan SDM pekerjanya. Kemudian mereka mengajukan permohonan kepada Dinas Pariwisata agar dapat diberikan bintek latihan. Mengingat adanya kebutuhan itu, Dinas Pariwisata pun mengembangkan Bintek untuk pemandu wisata tirta. Meskipun begitu bintek yang dilakukan masih terbatas pada *Rafting* dan *Diving*. Karena Bintek Pemandu Wisata Tirta ini baru pertama diselenggarakan pada 2010 maka baru menghasilkan satu angkatan. Pada tahun 2011 bintek ini masih berlanjut dengan satu angkatan lagi, tetapi dari 40 yang direncanakan yakni 20 rafting, 20 diving, sekarang ini baru terpenuhi 20 orang yang diberi bimbingan teknis.

Dilihat dari sisi partisipasi *stakeholdernya*, mengingat kebutuhan Bintek ini muncul dari Gawisri, maka dalam melakukan bintek tersebut Dinas Pariwisata provinsi Bali bekerja sama dengan Gawisri dan STP Bali. Dalam hal ini Gawisri diminta partisipasinya untuk memberikan beberapa materi pelajaran, khususnya pengetahuan yang terkait dengan kebutuhan mereka. Untuk pelaksanaan bintek ini baik materi maupun pengajarnya diberikan oleh pihak Gawisri. Seperti mengenai P3K dalam penyelaman; tehnik-tehnik penyelaman, dan keamanan dalam melakukan penyelaman. Sementara, misalnya, untuk terapi hiperbolik dalam penyelaman, karena mungkin ada gangguan ketika melakukan penyelaman, tenaga pengajarnya diambil dari Rumah Sakit Sanglah.

Adapun dari sisi pendanaannya, anggaran bintek murni berasal dari dana APBD. Tampaknya tidak ada partisipasi dari LSM atau *stakeholders* lainnya. Jadi meskipun tenaga pengajarnya diambil dari perusahaan yang tergabung dalam Gawisri, tapi yang menyelenggarakan

dan membayar tenaga pengajarnya adalah Dinas Pariwisata provinsi Bali. Dalam hal ini partisipasi perusahaan (Gawisri) sebatas melakukan surat menyurat agar mengirim peserta, dan menyiapkan peralatan penyelaman.

Deskripsi di atas memperlihatkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan Dinas Pariwisata masih terbatas pada pengelola maupun kepada penjaga DTW. Oleh karena itu, dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang lebih luas, program pemberdayaan melalui bintek ini diharapkan terus berinovasi dan berkembang dan dihubungkan dengan kegiatan lainnya. Hal itu diharapkan akan menyentuh masyarakat secara umum. Dengan demikian masyarakat luas memiliki kompetensi untuk terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata.

4.5.3. Pemberdayaan Pramuwisata Melalui Perubahan Kebijakan Dinas Pariwisata

Di samping adanya pengelola dan penjaga obyek wisata, Bali juga memiliki banyak tenaga guide/pramuwisata. Saat ini pramuwisata di Bali dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni punya pramuwisata umum dan pramuwisata khusus. Sementara pada masa sebelumnya, pengelompokkan pramuwisata masuk dalam tiga kategori yaitu madya, muda, dan khusus. Sekarang ini kategori madya dirubah menjadi umum dan kategori muda dihilangkan, sementara pramuwisata kategori khusus tetap ada.

Kategori pramuwisata muda dihilangkan melalui penerbitan Perda baru (Perda 5 Tahun 2011) karena dianggap mubazir mengingat dalam menjalankan profesinya terbatas hanya di kabupaten/kota saja, tidak boleh ke luar kabupaten/kota, sementara pramuwisata madya boleh mengantar wisatawan ke seluruh kabupaten/ kota di Bali. Padahal tamu wisatawan yang datang terfokus di daerah Badung dan Denpasar yang kemudian akan diantar oleh pramuwisata madya keliling daerah Bali. Akibatnya pramuwisata muda relatif tidak berfungsi. Oleh karena itu, pengelompokkan yang diberlakukan sekarang hanya pramuwisata umum (madya) dan khusus saja. Untuk pramuwisata khusus tetap dipertahankan

karena dia yang menguasai obyek-obyek wisata khusus seperti yang ada di Besakih dengan fokus untuk pura (karena Besakih areanya sangat luas), kemudian di gunung Batur, dengan fokus kegiatan untuk memandu pendakian gunung Batur, dan pramuwisata khusus di Alas Kedaton.

Seiring dengan penghapusan kategori pramuwisata muda tersebut, Perda baru yang sekarang sedang diuji coba tersebut juga mengatur pendidikan minimal untuk menjadi pramuwisata, yaitu harus D3. Munculnya gagasan persyaratan yang mengharuskan pramuwisata berpendidikan minimal D3 merupakan hasil pantauan HPI dan Kongres Pariwisata Dunia yang menunjukkan bahwa semua pramuwisata di luar negeri sudah memiliki latar belakang pendidikan S1. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya pramuwisata di Bali, HPI dengan Kadisparda mengajukan peningkatan syarat pendidikan tersebut. Namun karena realitanya potensi tenaga terdidik di Bali masih belum siap maka persyaratan yang diajukan pun hanya D3 saja, mengingat jumlah lulusan D3 sudah relatif banyak dibanding lulusan S1. Dengan diberlakukannya persyaratan itu diharapkan akan memacu masyarakat yang berminat untuk menjadi pramuwisata agar mau belajar menambah pengetahuannya lewat pendidikan formal. Namun karena Perda tersebut baru diuji coba tahun ini, maka belum kelihatan perbedaannya.

Dalam mengimplementasikan persyaratan minimal pendidikan pramuwisata ini Dinas Pariwisata hanya melakukan ujian saja. Yang memberikan kursus dan yang menyelenggarakan pendidikan formalnya adalah lembaga perguruan tinggi. Menurut Perda tersebut tahapannya adalah, setelah selesai dari pendidikan tinggi, mereka harus ikut kursus lebih kurang selama dua bulan untuk mendapatkan sertifikat kursus. Penyelenggara kursus tersebut adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang mempunyai kompetensi di bidang budaya Bali, agama Hindu, dan pariwisata. Setelah mereka mendapat sertifikat kursus baru mereka diperbolehkan ikut ujian pramuwisata. Artinya, setelah mereka lulus mendapatkan sertifikat dari lembaga pendidikan, baru Dinas Pariwisata dan timnya yang dibentuk mengadakan ujian yang diselenggarakan hanya satu hari.

Dengan persyaratan baru tersebut, sampai dengan saat ini (pertengahan 2011) pramuwisata yang sudah diberikan lisensi sekitar 8.000 orang, namun yang aktif hanya sekitar 5.000 orang. Akibatnya HPI dan owner DTW yang memerlukan user DTW merasa kekurangan tenaga pramuwisata, karena bila dilihat dari sisi tingkat kunjungan wisatanya memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihak Dinas Pariwisata, atas persetujuan Gubernur, membuka kembali pelatihan untuk menjadi pramuwisata. Dibukanya kembali peluang pelatihan ini meningkatkan antusiasme masyarakat untuk mengikuti pelatihan. Hanya saja karena dibatasi oleh persyaratan pendidikan yang relatif tinggi, yaitu D3, maka yang mendaftar relatif sedikit yakni hanya 250 peserta. Padahal dulu, sekitar tahun 2008, sebelum ditetapkannya perda baru itu, peserta pelatihan ini diikuti banyak peminat, yakni sekitar 1.000 orang.

Mengingat semakin meningkatnya kedatangan wisatawan sekarang ini, sehingga semakin banyak dibutuhkan tenaga pramuwisata, maka perlu ada upaya terobosan untuk mempercepat peningkatan jumlah pramuwisata. Sementara ini dibuka kesempatan bagi lulusan SMU yang berminat menjadi pramuwisata dengan cukup hanya mengikuti pemantapan terlebih dahulu, tanpa diuji sertifikat. Bagi mereka yang telah mengikuti pemantapan kemudian akan diberi lisensi yang berlaku selama satu tahun. Namun setelah tiga tahun mereka harus mengikuti ujian yang dibiayai oleh Dinas Pariwisata untuk merubah dari lisensi sementara menjadi tetap. Namun sayangnya ketika tahun 2010 diberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti ujian, ternyata yang mengikuti ujian tersebut jumlahnya sedikit sekali. Padahal untuk tahun berikutnya, seandainya ada, mereka harus membiayai dirinya sendiri guna mengikuti proses pemantapan sampai ujian sertifikat ini.

Sementara bagi mereka yang sudah memiliki lisensi pramuwisata sebelum berlakunya perda baru ini diharuskan melakukan penyesuaian dan diberikan kesempatan sampai tahun 2012. Jikalau mereka tidak mengambil kesempatan ini maka nomor lisensinya dianggap hangus, sehingga kalau mereka ingin kembali menjadi pramuwisata maka harus mengikuti persyaratan rekrutmen yang baru.

Lisensi pramuwisata tersebut merupakan keharusan bagi seseorang yang akan bekerja sebagai pramuwisata. Untuk mengontrol hal tersebut Dinas Pariwisata memiliki tim yang sering turun ke obyek wisata dan berwenang untuk memeriksa lisensi tersebut. Kalau terbukti ada pramuwisata yang beroperasi tanpa ijin, maka bisa diajukan ke pengadilan dengan ancaman denda maksimal 10 juta rupiah atau hukuman kurungan paling lama enam bulan. Keseriusan kerja dari tim ini sudah terbukti di mana sudah ada pramuwisata yang terkena kasus dan diajukan ke pengadilan. Kemudian oleh pengadilan yang bersangkutan dikenakan hukuman denda pelanggaran. Dalam hal ini ada pramuwisata yang terkena denda sampai lima ratus ribu rupiah.

Kebijakan baru yang meningkatkan standar pendidikan minimal untuk menjadi pramuwisata di atas merupakan langkah yang progresif. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, peningkatan persyaratan tingkat pendidikan ini secara tidak langsung memberdayakan pendidikan masyarakat. Pemberdayaan pendidikan ini sangat penting karena pramuwisata memegang peranan kunci dalam memberikan penjelasan kepada para wisatawan baik mengenai suatu obyek wisata maupun kondisi umum Indonesia. Melalui pramuwisata yang memiliki kompetensi diharapkan dapat lebih memberi kepuasan kepada para wisatawan untuk mau tinggal lebih lama dan mungkin kembali melakukan perjalanan wisata ke Indonesia.

4.5.4 Program Pemberdayaan Dinas Pariwisata Melalui Bimbingan Masyarakat

Di samping melalui bidang sumber daya pariwisata yang melakukan *community empowerment* melalui BinteK, bidang Bimas (bimbingan masyarakat) Dinas Pariwisata juga melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan kepada tokoh masyarakat, PKK, pelajar SMU atau SMK, pedagang acung, dan sebagainya di seluruh kabupaten di provinsi Bali. Untuk mendukung keberhasilan penyuluhan ini, khususnya untuk pedagang acung, Dinas Pariwisata provinsi melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar menyiapkan tempat supaya pedagang tidak melakukan dagang acung

lagi sehingga lebih tertib. Pada dasarnya penyuluhan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman terkait dengan kepariwisataan. Dalam hal ini Dinas Pariwisata hanya menyadarkan mereka bahwa kalau mereka tetap tidak bisa diatur maka tamu wisatawan tidak akan datang. Akibatnya, mereka akan kesulitan berdagang. Memang dari penyuluhan ini tidak selalu memberi hasil yang positif. Misalnya, penyuluhan kepada pedagang acung, meskipun bagi mereka sudah disiapkan tempat untuk berjualan, tapi kadang kala mereka masih berdagang acung juga.

Penyuluhan juga diberikan kepada masyarakat banyak. Dinas Pariwisata berupaya menyadarkan masyarakat agar menyiapkan diri untuk menerima wisatawan sehingga wisatawan tidak merasa kecewa, karena kalau mereka *complaint* kemungkinan besar mereka tidak akan datang lagi ke daerah yang bersangkutan atau Bali atau bahkan Indonesia. Materi penyuluhan yang diberikan umumnya terkait dengan perilaku agar masyarakat tidak mengeluh bahwa karena adanya wisatawan, mereka banyak diatur-aturl. Pada umumnya masyarakat tidak ada yang komplain dengan kegiatan tersebut. Sementara untuk pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan keamanan, dilakukan dengan cara mengundang polisi pariwisata dari Polda Bali untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan, karena waktu lalu Bali tidak aman, sehingga kalau tidak aman maka wisatawan tidak akan datang. Sementara kepada PKK diberikan latihan keterampilan seperti bagaimana cara makan yang benar (*table manner*), cara memasak yang benar, pengetahuan untuk mengembangkan usaha, dan sebagainya.

4.6 Community Empowerment Bali CBT Center (Bali Community Based Tourism Center)

Sekarang ini Dinas Pariwisata provinsi Bali berencana membuat 35 Desa Wisata, namun tentunya tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinas Pariwisata. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata mengajak peran serta *Bali Hotel Association* (BHA) yang dianggap telah berhasil mengembangkan beberapa Desa Wisata. Bagi BHA hal ini tentu saja menjadi suatu tantangan berat, karena jumlah desanya relatif banyak. Sementara desa

yang dikembangkan BHA relatif baru sedikit dan dulu BHA pun dibantu oleh NHVP dari negeri Belanda.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BHA membuat forum komunikasi dan konsultasi yang diberi nama *Bali Community Based Tourism Center* (Bali CBT Center) yang berkantor di BHA. Pada dasarnya keanggotaan forum ini bersifat terbuka, dalam arti semua pihak yang tertarik dan memiliki komitmen untuk melakukan pemberdayaan masyarakat atau pengentasan kemiskinan bisa bergabung di sini. Keterbukaan ini penting karena menyadari bahwa untuk memberdayakan masyarakat tidak bisa dilakukan hanya oleh satu orang. Oleh karena itu, Bali CBT Center mencoba merekrut lebih banyak orang yang memiliki komitmen dalam pemberdayaan masyarakat dengan tidak dibayar, atau benar-benar pengabdian. Dalam rangka itu, direktur BHA melakukan presentasi, antara lain, ke politeknik karena Bali CBT Center perlu orang-orang yang memiliki keahlian untuk mengajarkan kepada masyarakat desa seperti masalah akutansi, sosial, sanitasi lingkungan, planologi urban dan sebagainya. Dan ternyata memang banyak orang yang mau membantu yang jumlahnya dapat dikatakan sangat banyak. Melalui CBT center ini direktur BHA juga tidak meminta sumbangan uang, tetapi hanya minta bantuan untuk membuka channel saja. Dengan demikian akan memudahkan bila ada *stakeholder* yang mau menanyakan sesuatu.

Sementara ini Bali CBT Center terdiri dari beberapa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), perwakilan dari Dinas Pariwisata, kepala desa, bupati Gianyar, ketua PHRI Gianyar, pemilik sekolah tinggi pariwisata, manager BI dan lain sebagainya. Selain itu, di dalam Bali CBT Center juga telah bergabung sekitar 50 cendekiawan, pengusaha, dosen, dan sebagainya. Cendekiawan dibutuhkan di Bali CBT Center karena dalam membangun Desa Wisata perlu *capacity building*, sementara direktur BHA merasa tidak ahli dalam hal tersebut. Oleh karena itu, dia minta bantuan dari perguruan tinggi dan atau sekolah tinggi pariwisata Bali internasional untuk melakukan hal itu. Terhadap permintaan ini tampaknya mendapatkan respons yang positif dari

kalangan perguruan tinggi, terutama untuk melakukan survey lapangan di desa-desa tersebut.

CBT Center ini dibangun dengan asumsi, bila para pemilik dan pengembang pariwisata ini bisa bersatu maka akan lebih efisien dan efektif. Sebagai contoh, pihak BI bisa menginformasikan bank-bank yang memiliki program CSR, sehingga bisa meminta menyisihkan sebagian dana CSRnya untuk pengembangan Desa Wisata yang digarap BHA/ Dinas Pariwisata. Sebagai ilustrasi, bila ada perusahaan besar mempunyai CSR di Kintamani, maka ketika Bali CBT Center memperbaiki fasilitasnya, perusahaan besar tersebut bisa bekerja sama dengan menyumbang, misalnya, semua tong sampah yang dibutuhkan di sana, bahkan juga bisa menjual produknya di situ.

Pemanfaatan program CSR itu pernah diimplementasikan ketika mengembangkan Desa Wisata Bedulu. Pada saat itu direktur BHA meminta kepada perusahaan-perusahaan untuk membantu salah satu CSR perusahaan untuk desa Bedulu. Kebetulan ada salah satu kenalan kontraktor bangunan hotel besar yang sedang merenovasi hotel. Dia bersedia menyumbangkan furniture bekas dari hotel Mercure rekso dan dikirim ke direktur BHA. Selanjutnya barang tersebut ditawarkan/disumbangkan ke desa Bedulu. Oleh masyarakat desa furniture tersebut dimanfaatkan untuk menerima tamu wisatawan, karena semua kamar itu harus standard. Dalam hal ini hibah furniture yang satu setnya berharga sekitar satu setengah juta rupiah tersebut dianggap sebagai *Corporate Social responsibility* (CSR) kontraktor tersebut.

Ada juga yang bentuk CSR yang diberikan dalam bentuk barter. Pernah ada grup hotel yang ditawari oleh direktur BHA bahwa BHA mau membuat paket dua minggu di Bali. Dalam paket tersebut, ketika turis datang, mereka tidak langsung dimasukkan ke desa, melainkan ditempatkan dulu di Werda Pura milik PU di Sanur. Mereka menginap di situ menghabiskan perjalanan wisatanya dan *adventure* di desa-desa. Tetapi pada hari-hari terakhir mereka ditempatkan menginap di salah satu hotel bagus di Kuta yang menyumbangkan barangnya ke desa binaan BHA. Atau bisa juga dilakukan dalam bentuk menyumbangkan

karyawannya yang kompeten untuk membantu mencek *quality homestay* atau dia memberikan *hardware* yang bisa didaur ulang yang dibarter dengan cara ikut mempromosikan hotel yang bersangkutan di dalam paket yang ada di website direktur BHA, dan lain sebagainya.

Pelibatan semacam itu penting dalam pengembangan Desa Wisata karena pembangunannya memerlukan dana *cash*. Usaha itu tidak bisa hanya mengandalkan pada uang yang diberikan pemerintah, misalnya, dari PNPM Mandiri yang realitanya hanya diterima sekitar 70 juta rupiah dari yang seharusnya 100 juta². Bila mengandalkan dana tersebut, jumlah uangnya hanya cukup untuk melakukan kegiatan *capacity building*, sehingga masih dibutuhkan dana lain untuk kegiatan pembangunan lainnya. Sebagai contoh, untuk perbaikan satu fasilitas *homestay* seperti di desa Bedulu, diperkirakan membutuhkan sekitar 30 juta rupiah. Jumlah dana tersebut dipergunakan untuk renovasi kamar, membeli water heater, tabung gas, pipa-pipa gas, AC, peningkatan daya listrik, upah, dan sebagainya. Bila renovasi satu unit menghabiskan dana 30 juta rupiah, sementara di desa yang bersangkutan akan dikembangkan 10 unit *homestay* yang berarti membutuhkan dana 300 juta rupiah, maka dana bantuan PNPM sebesar 70 juta rupiah tersebut tidak mencukupi untuk mengembangkan Desa Wisata. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi dari *stakeholder* lainnya yang tergabung dalam Bali CBT Center.

Ketua-ketua kelompok sadar wisata didorong untuk bergabung dalam Bali CBT Center dan didorong mengembangkan desanya dengan memberikan dukungan pendanaan. Sistemnya, seandainya pokdarwis tersebut membutuhkan dana, maka direktur BHA akan meminta rincian penggunaan dananya dan kemudian mencarikan donatur atau lewat pinjaman bank. Upaya mencari dana sedapat mungkin dicarikan melalui investor. Sedangkan pinjaman via bank ada bunga yang relatif tinggi (di atas 1 % per bulan) yang belum tentu bisa ditanggung masyarakat. Jadi seandainya orang perlu 300 juta rupiah maka Bali CBT Center

²Sisanya yang 30 juta tidak jelas rimbanya, mungkin terkena berbagai potongan.

mencarikan investor yang tertarik. Sistem pembayarannya mungkin bisa dengan cara bagi hasil. Sebagai contoh, di Bedulu masyarakat dibantu untuk renovasi sebesar 300 juta rupiah. Kemudian, pendapatan dari operasional setelah dipotong bermacam-macam potongan, keuntungan bersihnya dibagi fifty-fifty. Tetapi setelah nanti berjalan 20 tahun, pembagiannya 55% untuk pemilik dan 45% untuk investor. Mereka ternyata menyetujui pembagian seperti itu.

Bagi direktur BHA, *community empowerment* melalui pengembangan *homestay* atau *guest house* di Desa Wisata merupakan hal yang menarik dan prospektif karena *trendnya* ke depan wisatawan itu tidak lagi *mass tourism*, tapi dengan minat khusus (eksklusif). Oleh karena itu, direktur BHA melalui Bali CBT center ingin mencoba memfasilitasi pengembangan Desa Wisata.

Untuk memacu perkembangan Desa Wisata tersebut direktur BHA melalui Bali CBT Center termotivasi untuk melombakan desa-desa tersebut dalam kemampuannya mengentaskan kemiskinan. Agar akurat dan obyektif, penentuan pemenangnya akan dilakukan melalui survey oleh para cendekiawan satu atau dua tahun setelah dikembangkan. Bagi pemenangnya, yakni yang paling besar pengentasan kemiskinannya, akan diberikan salah satu *award* sebagai reward/hadiah atas apa yang telah dicapainya.

Program yang dirancang Bali CBT Center ada yang berjangka bulanan, tahunan, dan harian. Untuk program harian misalnya membuat website sehingga setiap hari datanya terus di update. Sementara untuk yang bulanan, misalnya, melibatkan arsitek yang ada di dalam forum CBT yang diminta merancang renovasi bangunan rumah di desa agar masyarakat tidak sembarangan membongkar bangunan di Desa Wisata sehingga tidak memiliki nilai lagi. Dalam konteks ini, meskipun ketika melakukan renovasi rumah tersebut dananya berasal dari BHA dan arsitek perancangnya turun ke lapangan, tetapi pemborongnya harus berasal dari masyarakat desa, karena mereka harus diberi peluang bisnis agar mendapatkan penghasilan. Kemudian untuk menjalankan pengelolaan *homestay* atau *guest housenya*, Bali CBT Center akan

meminta orang hotel untuk melatih masyarakat desa agar mampu melakukan *housekeeping*, meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, dan sebagainya.

Berdasarkan pengalaman direktur BHA, setiap desa memiliki karakteristik sendiri sehingga dalam melakukan *community empowerment* tidak bisa disama ratakan. Misalnya, ada satu desa yang bisa menerima tamu untuk menginap, ada juga desa yang lebih baik tamunya tidak menginap. Jadi tergantung dari karakteristiknya. Oleh karena itu, dalam memberikan bantuan pun diperlukan kehati-hatian. Kalau, misalnya, suatu desa, seperti Bayung Gede, diberi bantuan pembangunan *homestay* atau *guest house*, padahal lokasinya dekat dengan Kintamani yang dapat ditempuh sekitar 10 menit perjalanan, maka pembangunan yang relatif mahal untuk pembangunan *homestay* akan menjadi pemborosan, karena bila ada wisatawan yang datang lebih baik diinapkan di Kintamani yang sudah memiliki fasilitas penginapan dan hotel.

Deskripsi di atas memperlihatkan bahwa sudah ada kehendak dari Pemerintah Daerah untuk melibatkan *stakeholder* lainnya untuk melakukan *community empowerment*. Hal ini tentunya perlu diapresiasi karena biasanya program pengembangan daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang *solid* di antara para *stakeholder*. Pemosisian ketua BHA di dalam forum CBT Center juga harus diapresiasi karena dengan posisinya yang lebih "neutral" dapat diharapkan akan mempermudah forum ini dalam mengajak berbagai pihak untuk turut terlibat dalam kegiatan *community empowerment* yang dilakukan CBT Center. Apalagi komitmen direktur BHA tersebut dalam pengembangan Desa Wisata sudah banyak diketahui dan diakui oleh berbagai pihak dan memiliki jaringan yang luas baik dengan pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa CBT Center ini mampu mengakselerasi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata di Bali

4.7 *Community Empowerment* Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi Bali

4.7.1 Kebijakan

Dalam kebijakan Disperindag, pengembangan Bali dibagi dalam tiga prioritas, yakni: 1. pariwisata, 2. pertanian, 3. industri kecil dan menengah. Dalam rangka untuk mendukung pengembangan pariwisata Disperindag provinsi Bali mengembangkan berbagai macam komoditi, umumnya industri kerajinan dan kuliner. Untuk ke depannya pembinaan industri diarahkan pada industri yang dibutuhkan oleh sektor pariwisata, seperti untuk memenuhi kebutuhan hotel-hotel, kebutuhan restoran, dan kebutuhan para tamu wisatawan yang datang ke Bali.

Yang menarik meskipun industri pariwisata sudah lama berkembang di Bali dan bahkan menjadi tumpuan kehidupan ekonomi masyarakat Bali, tetapi ternyata belum ada kebijakan formal dalam bidang industri dan perdagangan yang mengarah untuk mendukung penuh kepariwisataan tersebut. Dikatakan demikian karena belum ada kebijakan yang berbentuk Perda atau Pergub. Semuanya dikatakan baru mau mengarah kesana. Rencananya ke depan, akan dibuat perda tentang *Balinese day*, di mana nantinya semua pelayan hotel, pegawai hotel dan restoran memanfaatkan bahan baku lokal, termasuk kain bali.

Hal ini, menurut informan, karena dampak manfaat ekonomi pariwisata tersebut sudah dirasakan semua pihak dan masalah yang dihadapi pun tidak terlalu besar. Selain itu, dari sejak awal perkembangan pariwisata antara pertanian, perindustrian terutama IKM, Industri Kerajinan yang berdampak langsung kepada kepariwisataan dirasakan sudah berjalan seiring. Artinya tanpa direncanakan pun semuanya sudah berjalan seiring. Bahkan masyarakat pun sudah terlibat dalam industri pariwisata sehingga tidak ada gap lagi antara pemerintah, industri pariwisata dan masyarakat. Akibatnya tidak ada pihak yang memikirkan pentingnya perda tersebut. Mungkin SKPD yang ada baru akan berpikir dan bereaksi untuk membuat perda bila terjadi gejala, seperti ketika terjadi bom Bali di mana pariwisata langsung terasa anjlok,

dan berdampak langsung pada merosotnya penjualan terutama dari para pengrajin di desa.

Namun, meskipun tidak ada Perda, pemerintah tetap bergerak menyediakan infrastruktur dan melakukan pembinaan kepada masyarakat. Bahkan program semacam itu dilakukan setiap tahun. Program seperti pembinaan itu sudah dimulai sejak pariwisata Bali berkembang dan lebih menggaung lagi sejak Repelita I, semasa ORBA (orde baru). Oleh karena itu, perkembangan kerajinan Bali dapat berkembang luar biasa.

4.7.2 Proses dan Program Pemberdayaan Disperindag Provinsi Bali

Bila dilihat dari sisi penggagasnya, program pembinaan kepada industri kecil selama ini utamanya diturunkan dari pusat yakni Kementerian Perindustrian. Akan tetapi usulan awalnya dari daerah yang kemudian diusulkan ke pusat. Bila Departemen Perindustrian menyetujui usulan tersebut, maka ditindak-lanjuti dengan menurunkan dana dekonsentrasi. Jadi, dana pembinaan tersebut lebih mengandalkan pada bantuan pusat karena walaupun ada dari APBD, jumlahnya tidak sebesar yang dialokasikan dari APBN.

Terkait dengan usulan program tersebut, dalam penyusunan programnya, Disperindag mengacu kepada visi, misi dari dinas yang bersangkutan. Akan tetapi, kalau dikaitkan dengan industri pariwisata, program-program yang disusun Disperindag diarahkan pada upaya penguatan modal, peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas, peningkatan teknologi, termasuk peningkatan SDM nya. Jadi pada dasarnya meliputi semua hal, termasuk peningkatan UPT (Unit Pelayanan Teknis). Rangkaian jenis program tersebut tidak bisa diambil sebagian-sebagian, karena saling berkait. Sebagai contoh, karena jumlah permintaan banyak sekali, terutama untuk pasar ekspor, maka produksinya juga harus ditingkatkan. Diperkirakan dari UKM yang ada, 40 persennya berorientasi pada pasar lokal dan 60 persennya untuk ekspor. Untuk itu tentunya perlu program peningkatan kapasitas

produksi. Hal itu berkaitan juga dengan peningkatan bahan baku, peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan teknologi, penguatan modal dan sebagainya yang terkait dengan upaya peningkatan produksi. Jadi program yang disusun tersebut diarahkan agar masing-masing komoditi yang dikembangkan memberikan kontribusi pada perkembangan pariwisata.

Contoh lainnya seperti misalnya peningkatan modal, dengan ramainya industri kerajinan tumbuh di Bali itu, maka LPD (Lembaga Perkreditan Desa) di masing-masing desa membantu untuk penguatan modal IKM (Industri Kecil dan Menengah) dan UKM. LPD itu menjadi ujung tombak dari lembaga keuangan di Bali, meskipun ada juga bantuan dari pemerintah dan juga dari masing-masing desa. Sistem bantuan permodalannya diberlakukan dengan mengenakan bunga, seperti semi perbankan dan koperasi

Sementara bantuan permodalan dari Pemerintah Daerah digulirkan melalui bank pembangunan daerah (BPD) Bali yang disalurkan dalam bentuk kredit tanpa agunan. Terkait dengan hal itu, dulu, pada masa krisis tahun 1997 ada juga bantuan permodalan dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui LPT Indag (Lembaga Pengkreditan Masalah Industri dan Perdagangan). Jadi di sini dibentuk semacam lembaga keuangan yang dikelola langsung oleh Dinas Perindag provinsi Bali. Semua pengrajin di Bali yang produknya potensial untuk diekspor mendapatkan kredit murah ini. Setiap tahunnya jumlah dana yang digulirkan dari pusat tersebut hampir mencapai 5 miliar rupiah. Tetapi sekarang ini bantuan pusat tersebut tidak diperbolehkan lagi oleh Menteri Keuangan dan sudah dihapus sejak tahun 2008/2009.

Di samping *community empowerment* dalam bentuk bantuan permodalan, ada juga yang dalam bentuk program dana bergulir di masyarakat. Misalnya masyarakat diberikan pinjaman 50 juta rupiah yang harus dikembalikan dalam waktu satu tahun. Kemudian setelah dana tersebut kembali semua digulirkan kembali kepada orang yang lain. Dilihat dari sisi keberhasilan programnya, program dana bergulir di Bali

mendapat *ranking* satu dalam hal kelancaran pengguliran dananya yang diikuti oleh Makasar di ranking dua.

Program pemberdayaan peningkatan kapasitas mempunyai bentuk yang bervariasi, tergantung kebutuhan dan komoditinya. Dalam hal ini prioritas diletakkan pada pengembangan industri kreatif dalam hal fashion, kayu, lukisan, dan kuliner. Artinya industri kreatif itu menciptakan produk baru, baik desainnya maupun produknya, sehingga yang dulu produknya terbatas menjadi beraneka ragam karena selalu ada peningkatan dan perubahan (inovasi). Keempat komoditi tersebut dipilih untuk selalu merubah produknya. Misalnya untuk pengrajin kerajinan kayu, ditingkatkan diversifikasi produk kayu, bantuan peralatan, teknologi, yang disertai dengan peningkatan kapasitas dalam penggunaan bantuan tersebut.

Dalam menentukan program pelatihannya dilihat dari permasalahan yang dihadapi masyarakat yang bersangkutan. Misalnya diversifikasi produk kayu dilakukan karena selama ini permintaan pasar selalu berubah-ubah, padahal kemampuan pengrajin relatif terbatas sehingga produk yang dihasilkannya kadang-kala terasa monoton. Untuk itu maka perlu program peningkatan kapasitas yang mampu meningkatkan daya inovasi dan design kreasinya agar kreativitas pengrajin desa tersebut meningkat. Dalam implementasinya upaya ini melibatkan baik tenaga dari luar maupun dari dalam, seperti instruktur Disperindag, *stakeholder* ahli dari perguruan tinggi, asosiasi, Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah). Kerja sama terutama dilakukan dengan Balai Industri di Bali sehingga ada teknologi baru, design baru yang disesuaikan dengan kebutuhan pengrajin.

Disperindag juga melakukan *community empowerment* yang terkait dengan pemanfaatan peluang ekonomi dari perkembangan pariwisata kuliner. Pelatihan yang diberikan antara lain mengolah hasil belut, lele untuk memasok ke restoran-restoran, terutama kota Denpasar yang sekarang sedang menggerakkan kuliner menjadi program prioritas.

Selain kuliner, Disperindag juga melakukan pemberdayaan komunitas di bidang fashion/mode, kerajinan dari besi seperti tempat

lilin, kerajinan kaca. Untuk ini komoditi yang diprioritaskan adalah komoditi kerajinan, sandang termasuk tekstil, logam termasuk besi, rotan, pangan termasuk kuliner, kue-kue, pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, tanaman pangan.

4.8 *Community Empowerment* Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali

4.8.1 Kebijakan

Dalam kebijakan terkait dengan *community empowerment*, ada tiga hal yang dilakukan Disnaker dalam mempersiapkan pemberdayaan masyarakat supaya mereka dapat berpartisipasi terlibat dalam industri pariwisata. Pertama, kualitas SDM baik aparat maupun pengusaha; kedua, diversifikasi peluang; ketiga, dengan mempertemukan mereka. Jadi peran yang dilakukan Disnaker di bidang pariwisata terkait dengan tiga hal tersebut.

Dalam hal kualitas SDM, Disnaker melakukan *community empowerment* melalui pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja. Mereka yang dilatih mendapatkan ketiganya, sehingga sudah siap kerja, malahan ada yang sudah bekerja. Untuk itu Disnaker mempunyai Balai latihan kerja (BLK) industri dan pariwisata. Dalam melakukan pelatihan ini tidak hanya Disnaker yang melakukannya, tetapi juga ada juga dinas lain yang terlibat dengan kegiatan yang sama seperti misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Perindag, Koperasi dan beberapa dinas lainnya. Sementara untuk keterampilan yang khusus, seperti pelatihan teraphis spa, ada beberapa lembaga pelatihan kerja swasta (300/400) yang membantu memberikan pelatihan tersebut. Yang banyak peminatnya adalah tenaga kerja untuk terapis spa.

Karena banyaknya instansi yang melakukan pelatihan terhadap calon tenaga kerja, disnaker melihat masih perlunya kerja sama antarinstansi. Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun banyak instansi terkait yang sama-sama melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja, tetapi masih belum terkoordinasikan dengan baik. Implikasinya tentu saja pada terjadinya inefisiensi biaya dan inefektivitas pekerjaan. Dalam

hal ini Disnaker sudah mencoba menyampaikan perlunya kerja sama ini agar lebih efisien dan efektif dalam upaya memandirikan calon tenaga kerja, baik dalam melakukan usaha maupun dalam mengisi peluang penempatan tenaga kerja. Bahkan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan tingkat pengangguran disnaker juga mencoba memberitahukan agar membuat target bersama.

Kerja sama antarinstansi ini penting karena sekarang ini pengangguran di Bali masih sekitar 68 ribu tenaga kerja. Dalam logika Disnaker, seandainya semua instansi membina dan memfasilitasi 10.000 pengusaha, kemudian mewajibkan managementnya untuk menempatkan lima orang tenaga kerja yang sudah diberi pelatihan, maka berarti sudah bisa menurunkan angka pengangguran sebanyak lima kali 10 ribu, yakni 50 ribu tenaga kerja. Namun sayangnya saran tersebut belum bisa direalisasikan karena masing-masing instansi mempunyai kebijakan sendiri.

Dalam konteks *community empowerment*, Disnaker juga berupaya menjaga hubungan industrial untuk menciptakan keharmonisan antara pekerja dan pengusaha, agar dalam hubungan kerjanya jangan sampai mereka menghadapi masalah atau ada pelanggaran. Hal itu antara lain dilakukan dengan melaksanakan pengawasan terhadap peralatan kerja yang digunakan agar jangan sampai timbul persoalan seperti terjadi kecelakaan, sehingga keselamatan kerjanya terjamin.

Dalam konteks penempatan tenaga kerja, tidak ada kebijakan daerah, misalnya, yang mengharuskan hotel memprioritaskan tenaga kerja lokal yang ada di sekitar lokasi hotel. Pemerintah Daerah dalam kebijakannya tidak melakukan Intervensi sampai sejauh itu. Intervensi kebijakan hanya dalam bentuk pemagangan saja, seperti *job training* di hotel itu, kemudian bila hotel merasa cocok dengan orang yang magang tersebut maka dapat langsung direkrut. Kebijakan semacam itu belum ada, walaupun ada baru sebatas himbauan. Namun demikian untuk tingkat desa biasanya sudah ada kebijakan desa agar merekrut tenaga kerja lokal, paling tidak untuk level bawah seperti tukang kebun, satpam, dan sebagainya. Sedangkan untuk mengisi posisi level yang di atas, calon

harus memiliki *skill* di mana orang desa jarang memiliki.. Meskipun begitu, sejauh ini tidak pernah terjadi konflik antara hotel dengan penduduk lokal akibat anggota masyarakat lokal tidak dapat bekerja di hotel yang bersangkutan.

4.8.2 Proses dan Program *Community Empowerment* Pada Industri Akomodasi

Bila difokuskan pada industri akomodasi, yang menjadi kendala bagi industri pariwisata, khususnya sektor akomodasi dalam menyerap tenaga kerja lokal adalah masalah kualitas. Artinya banyak dari tenaga kerja lokal yang kemampuannya di bawah standar yang dibutuhkan hotel. Untuk mengatasi hal tersebut, baik dari Disnaker maupun pihak hotel sebenarnya sudah mencoba meningkatkan kemampuan mereka melalui pelatihan-pelatihan. Hotel tertarik untuk berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja karena menyadari tidak mudah untuk mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang sesuai dengan standar kualitasnya. Misalnya, ketika dia membutuhkan 50 tenaga kerja yang berkualitas saja, sudah cukup sulit bagi hotel untuk mendapatkannya. Ilustrasi tersebut mengindikasikan bahwa agar masyarakat memiliki peluang masuk ke pasaran kerja industri akomodasi, maka harus ada upaya dari instansi yang berkompeten, seperti Disnaker, untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada sehingga menjadi kompeten. Artinya calon tenaga kerja yang ada harus dibina dan dilatih agar berpengetahuan dan berkarakter dalam bidang yang sesuai dengan keinginan mereka.

Untuk mengatasi persoalan itu, Disnaker berkerja-sama dengan ST Pariwisata sudah dan terus berupaya melakukan sertifikasi terhadap calon tenaga kerja umum agar dapat masuk ke pasar tenaga kerja. Disnaker juga melakukan peningkatan kapasitas dari tenaga kerja level bawah menjadi menengah terhadap calon tenaga kerja yang mengikuti pelatihan. Selain itu, disnaker melalui BLK tenaga kerja dan pariwisata dalam waktu tertentu juga melakukan job training. Atas upaya tersebut, selama ini sekitar 80% dari calon tenaga kerja yang dilatih Disnaker langsung diterima bekerja di tempat yang sesuai dengan hasil pelatihan/job training. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas job

training tersebut dipertimbangkan oleh perusahaan sehingga mereka langsung diterima. Selain itu BLK/disnaker memang sudah menjalin kerja sama dengan pengusaha akomodasi.

Job training oleh BLK, biasanya dilakukan atas permintaan dari hotel, misalnya, supaya memberikan pelatihan terhadap karyawannya. Namun demikian ada juga inisiatif Disnaker yang ditujukan untuk melatih calon tenaga kerja umum agar memiliki kompetensi. Sementara dalam memilih jenis pelatihannya, Disnaker melihat kondisi permintaan pasar. Misalnya, kondisi pasar membutuhkan tenaga kerja terlatih bidang jasa boga, maka BLK memberikan pelatihan jasa boga. Atau untuk orang-orang yang bekerja di hotel tetapi sudah dekat pensiun, maka BLK menyiapkan pelatihan untuk mereka agar mempunyai ketrampilan, sehingga nantinya mereka bisa mandiri. Adapun lokasi pelatihannya, ada pelatihan yang dilakukan dengan cara mendatangi obyek pelatihan, seperti hotel, ada juga pelatihan di tempat. Untuk jenis pelatihan di tempat ini, ada yang merupakan program disnaker/BLK, tetapi ada juga yang dilakukan karena permintaan klien.

Untuk kebutuhan pengadaan pelatihnya, BLKIP pariwisata sudah memiliki tenaga pelatih sendiri. Tapi bila kekurangan tenaga pelatih, BLKIP mencari tenaga dari luar, terutama tenaga pelatih yang sudah senior dalam melakukan pelatihan khusus. Sekarang ini BLKIP mendapat tugas melakukan 60 paket pelatihan untuk melatih 1200- 1400 orang. Namun sesungguhnya pekerja yang membutuhkan pelatihan di luar jumlahnya sekitar 10.000-an. Oleh karena itu, disnaker mengharapkan adanya bantuan pemerintah pusat agar daerah dapat lebih banyak melakukan pelatihan. Dengan demikian mereka yang mau bekerja mandiri dapat diberikan peluang mengikuti pelatihan di BLKIP.

Dalam melakukan *community empowerment* Disnaker juga melakukan langkah proaktif dengan cara terjun ke lapangan. Dengan begitu kalau di masyarakat butuh keterampilan tertentu, maka disnaker memberikan pelatihan umpamanya servis telepon genggam. Bahkan di lapangan ada perkembangan kebutuhan pelatihan yang agak unik yaitu itu membuat *banten* (sajen). Dikatakan unik karena sebenarnya

pembuatan banten itu sudah ada dari zaman dulu yang dilakukan semacam barter, tanpa uang. Sekarang karena ada permintaan di desa di jimbaran, maka disnaker/BLKIP pun melakukan pelatihan seperti modifikasi membuat *banten*. Permintaan terhadap *banten* itu cukup besar karena untuk keperluan sehari-hari saja bisa menghabiskan sampai 15 ribu rupiah per sehari. Belum lagi kalau ada upacara besar, untuk kebutuhan hotel, dan setiap ada kegiatan lainnya.

Dalam rangka melakukan *community empowerment*, Disnaker juga memiliki program pemberdayaan semacam pilot project yang mengarahkan kewiraswastaan, yang diintervensi mulai dari pelatihan skill, permodalan sampai ke masalah pemasarannya, yakni program untuk peningkatan pengembangan produktivitas. Dalam program ini merekrut S1 dari segala ilmu yang masih menganggur untuk dilatih berwira usaha menjadi sarjana TKMP (Tenaga Kerja Mandiri Profesional). Dalam program ini ada usaha mandiri yang dijalankan oleh mereka yang sudah mendapat pelatihan tersebut. Peluang untuk mengikuti program ini dibuka luas dan diumumkan. Kemudian lulusan S1 yang berminat harus mendaftar dahulu, ikut tes tertulis, dan interview. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan peserta yang bagus untuk kemudian dilatih.

4.9 *Community Empowerment* Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar melalui Program PNPB Mandiri dan Kemitraan

Gianyar adalah salah satu kabupaten di provinsi Bali, dikenal sebagai daerah yang berada dalam wilayah Bali kuno³ yang sangat menunjang kepariwisataan Bali. Sebagai obyek daerah tujuan wisata budaya, Gianyar terkenal dengan karya seni, baik tari-tarian maupun hasil kerajinannya⁴, di mana 70% dari kesenian yang ada di Bali berasal

³ Wilayah Bali kuno, adalah wilayah di mana banyak ditemukan peninggalan-peninggalan yang bersifat kepurbakalaan, seperti situs-situs.

⁴ Hasil kerajinan di Bali 75% nya berasal dari Gianyar, seperti kerajinan perak di Celuk, kerajinan tulang di Tegallalang, ukiran-ukiran di Ubud dan Sokawati.

dari Gianyar. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Gianyar dijuluki sebagai pusat seni dan budaya Bali. Jenis tarian yang ada di Bali seperti Barong, Legong Keraton, Kecak, dan lain sebagainya semuanya berasal dari Gianyar dan sudah terkenal di Eropa sejak tahun 1926. Hal ini terlihat dengan maraknya kegiatan berbagai kelompok kesenian yang membina tari-tarian, tabuhan dan gamelannya serta *kekawin kidung* (seperti pengajian), karena di Gianyar banyak dijumpai *sebun-sebun* seni (sarang seni). Perkembangan berbagai kelompok kesenian tersebut tidak terlepas dari peran *sekel-sekel* (kelompok-kelompok yang ada di masing-masing masyarakat) maupun peran *banjar*⁵ (organisasi semacam RT/RW) itu sendiri yang dapat mendukung keberadaan pariwisata.

⁵*Banjar* merupakan organisasi kemasyarakatan tradisional Bali dan pada masyarakat Indonesia modern lebih dikenal dengan sistem RT/RW. Berbeda dengan sistem RT/RW yang memakai angka (nomor), sistem banjar dibedakan atas namanya, semuanya sangat khas dengan nuansa Bali, misal Banjar Tegallinggah, dan lain-lain. Dahulu *banjar* hanya mengurus kepentingan masalah pengairan di sawah, sekarang sudah bertambah fungsinya, yaitu mengurus masalah administrasi pemerintahan. Ada empat jenis banjar (subak), di antaranya yaitu **Banjar Dinas**, fungsinya lebih pada urusan administrasi, seperti membuat KTP, Kartu Keluarga dan kemudian diajukan ke Kantor Kelurahan. **Banjar Adat**, ketuanya disebut *kelian adat*, menangani urusan sosial seperti saat ada kematian, upacara perkawinan, serta upacara-upacara keagamaan. *Kelian adat* dan *kelian dinas* suatu banjar tidak selalu orang yang sama. Namun, walaupun misalnya punya dua orang *kelian*, dalam setiap sangkep (musyawarah, pertemuan) apapun, kedua *kelian* ini biasanya diwajibkan hadir.

Jumlah *banjar* di setiap kelurahan juga sangat beragam. Umumnya sekitar lima sampai ratusan banjar, tergantung dari seberapa luas wilayah kelurahan tersebut. Peranan banjar sangat penting sebab merupakan organisasi di mana rasa kekeluargaannya sangat tinggi. Prinsip utamanya adalah saling memberi dan menerima. Bila, misalkan, dalam setiap kegiatan banjar seperti gotong-royong, upacara kematian, perkawinan dan sebagainya, seorang krama banjar sering tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas (seperti sibuk kerja), maka apabila nanti orang itu mempunyai kegiatan/upacara, jangan harap ada anggota banjar yang akan hadir di rumahnya untuk membantu. Namun, misalnya, ada seorang krama banjar tidak pernah ikut dalam kegiatan banjar itu meninggal, maka krama banjar yang lain biasanya tetap datang ke rumahnya dan

Seiring dengan laju perkembangan kepariwisataan di Bali, khususnya di Gianyar, pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan berbagai ajang lomba tari-tarian, tabuhan dan sejenisnya, yang dapat diikuti oleh seluruh kelompok kesenian atau sanggar-sanggar yang ada. Penyelenggaraan lomba tersebut dimaksudkan agar masyarakat setempat mendukung keberadaan sektor pariwisata dan ikut melestarikan seni budayanya yang ada di Bali.

Sejak “sapta pesona” dicanangkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar pun telah berpartisipasi, salah satunya adalah mengadakan lomba *Jegeg Bagus* (duta/putra putri), yang melibatkan seluruh anak-anak muda sekabupaten Gianyar dari masing-masing banjar. Untuk itu masing-masing jenjang SMA dan Perguruan Tinggi setempat, mengirimkan dua orang wakilnya. Mereka dikarantina di hotel bintang lima untuk mendapat pengarahan dari panitia dan pendidik yang ditunjuk: tentang etika, sopan santun – tata krama termasuk *table manner*, pendidikan bahasa Inggris maupun daerah, serta pengetahuan kepariwisataan, dan lain sebagainya yang sesuai dengan adat ketimuran. Pemenang *Jegeg Bagus* dari kabupten diikutkan lagi dalam lomba pada tingkat propinsi. Dalam penyelenggaraan lomba tersebut, biasanya Dinas Pariwisata bekerja sama dengan pelaku-pelaku usaha/bisnis pariwisata lainnya.

Tidak ketinggalan pula kelompok kesenian yang dibina Dinas Kebudayaan turut dilombakan pada acara pesta kesenian daerah. Kelompok kesenian yang dapat mengikuti lomba tersebut telah dipilih berdasarkan penyeleksian ketat oleh pihak berwenang dari Dinas

melakukan segala sesuatu yang diperlukan, walaupun dengan paksa rela. Sebab dalam pandangan banjar lain adalah memalukan jika sampai saat terakhir krama banjar tetap tidak memberi maaf dan berharap keluarganya yang tersisa akan kembali aktif dalam kegiatan banjar. Satu keluarga tidak harus mengikutkan seluruh anggota keluarganya dalam setiap kegiatan banjar. Kecuali jika kegiatan itu melibatkan kegiatan yang sensitif terhadap jenis kelamin, seperti memotong bambu untuk upacara tertentu, harus diwakili laki-laki, demikian pula sebaliknya. wujud kesadaran berorganisasi masyarakat Bali yang sudah tercipta sejak dahulu

Kebudayaan atau terkadang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Pesta kesenian daerah yang dimaksud adalah “Pekan Kesenian Bali”, yang diikuti oleh perwakilan kelompok kesenian dari masing-masing kabupaten, diadakan setiap pertengahan bulan Juni sampai dengan pertengahan Juli, di Art Center Denpasar dan dibuka oleh presiden. Kelompok kesenian tersebut pawai keliling ke Denpasar, dimulai dari kabupatennya.

Selain dari kesenian, kendati kecil wilayahnya, di daerah Gianyar juga banyak ditemukan situs-situs kepurbakalaan. Situs-situs tersebut merupakan peninggalan abad ke delapan seperti Iyeh Pulu yang ditemukan di daerah aliran sungai Patrism dan Petanu, dan sekarang telah menjadi obyek wisata. Demikian pula halnya dengan obyek wisata Goa Gajah, Tirta Empul di Tampak Siring, dan gunung Kawi merupakan warisan budaya yang sangat tua peninggalan raja-raja Mahendradata, Udayana, Erlangga dan lain-lain. Karena luar biasa banyaknya situs yang ditemukan di daerah ini, maka pada tahun ini Dinas Pariwisata ditargetkan untuk bisa mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 12 milyar rupiah, di mana setiap tahun PAD-nya selalu meningkat. Dalam hal ini Dinas Pariwisata harus berupaya untuk dapat mencapai jumlah PAD yang ditargetkan dengan berbagai cara.

Untuk operasionalisasi dan mempertahankan keberadaan situs-situs tersebut, khususnya untuk pemeliharaan, pada kenyataannya membutuhkan anggaran yang besar, sehingga tidak dapat dipenuhi sendiri oleh dana kas daerah dan masih dibutuhkan berbagai dukungan dari segala lini untuk mempertahankan keberadaan situs-situs di daerah Gianyar. Oleh karena itu, selama ini anggaran untuk kepentingan tersebut tidak saja didanai melalui APBD daerah dan propinsi, tetapi juga dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau tugas bantuan.

Dalam upaya mempertahankan keberadaan situs-situs purbakala ataupun obyek wisata lainnya di daerah Gianyar, Dinas Pariwisata mengajak seluruh semua lapisan masyarakat, termasuk desa adat untuk menjaga kelestariannya. Pembekalan oleh bidang penyuluhan Dinas Pariwisata, khususnya tentang pentingnya sadar wisata juga

diberikan kepada masyarakat. Sebagai contoh, setiap enam bulan sekali ribuan masyarakat setempat mengadakan *odalan* upacara dalam rangka menjaga sumber mata air pada situs-situs yang dikeramatkan; kemudian masyarakat setempat tidak melakukan penebangan-penebangan pohon yang berada di sekitar obyek wisata tanpa izin dari pemerintah dan desa adat; masyarakat secara rutin, baik yang ada di desa maupun melalui banjar-banjarnya, senantiasa bergotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan setempat. Kadangkala Kodim dan Kepolisian juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pengamanan pada saat pelaksanaan gotong royong membersihkan obyek wisata serta lingkungan sekitarnya.

Dalam upaya menggalakkan sektor kepariwisataan di Bali, pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, telah mengajak masyarakat setempat untuk turut mengambil bagian dalam berbagai kegiatan yang dapat mendukung pariwisata pada khususnya, dan pembangunan pada umumnya. Ajakan pemerintah dalam kegiatan kepariwisataan tersebut dimaksudkan untuk dapat memberdayakan masyarakat setempat, sehingga mereka dapat memperoleh manfaatnya, dan secara tidak langsung dapat memerangi kemiskinan. Untuk itu, melalui Dinas Pariwisata setempat, masyarakat diberikan bimbingan, pengarahan atau pencerahan mengenai segala sesuatu yang terkait dengan kepariwisataan; seperti arti pariwisata, siapa yang dapat terlibat di dalamnya, bagaimana menjalankan usaha/bisnis pariwisata berikut kiat-kiatnya, dan sebagainya. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pariwisata memungkinkan masyarakat dapat berperan secara aktif dan memperoleh manfaat langsung berupa peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan (pendidikan, kesehatan, dan sebagainya).

Menurut informan dari Dinas Pariwisata Gianyar, banyak langkah yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat, di antaranya dengan melakukan PNPM Mandiri yang merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata mulai tahun 2009 telah melaksanakan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bidang pariwisata, guna mendukung upaya pengembangan kapasitas dan kemampuan masyarakat yang terdapat di destinasi pariwisata.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah dan masyarakat luas. Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Pariwisata menggunakan pola pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Perwujudan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui penyaluran bantuan Desa Wisata kepada kelompok masyarakat. Bantuan Desa Wisata bersifat stimulan dan dirancang untuk memberi kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan kapasitas masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan. Penggunaan dana Bantuan Desa Wisata diprioritaskan pada kegiatan kolektif dan langsung menyentuh masyarakat miskin.

Dalam hal ini program PNPM Mandiri bidang pariwisata yang dilakukan di kabupaten Gianyar difokuskan pada pengembangan Desa Wisata. Pilihan ini diambil, karena Desa Wisata itu adalah merupakan *embrio* dari *community based tourism* artinya pariwisata yang dibangun adalah berbasiskan masyarakat. *Community based tourism*⁶ menempatkan masyarakat lokal sebagai mitra sejajar dalam pengembangan kepariwisataan, baik dalam pengambilan keputusan dan atau pelaksanaan sehingga masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat dan keuntungan dari kegiatan bisnis pariwisata. Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di suatu desa yang dicanangkan sebagai Desa Wisata, seyogyanya hendaklah dipersiapkan terlebih dahulu infrastrukturnya seperti perbaikan jalan/lingkungan yang memadai. Hal itu akan memudahkan wisatawan berkunjung.

⁶Dalam pelaksanaannya, konsep ini mensyaratkan berbagai program pendamping dan pelatihan kewirausahaan serta fasilitas usaha pariwisata di tingkat masyarakat, seperti perkreditan, permodalan, insentif, dan berbagai skema kemudahan yang lain.

Melalui program PNPM mandiri tersebut masyarakat Desa Wisata akan terlibat dalam setiap aspek kegiatan pariwisata, Misalnya, sebagian dari mereka terlibat dalam menyediakan rumahnya sebagai tempat penginapan/ akomodasi, ada pula yang terlibat dalam jasa kuliner (menyediakan sarapan, makan siang, makan malam dan sajian makanan lainnya), ada yang terlibat dalam suguhan sendratari atau tari-tarian (baik sebagai penabuh gamelan maupun sebagai penari), dan lain sebagainya. Dalam konteks tersebut tentu perlu diatur sedemikian rupa agar di antara mereka tidak terjadi kecemburuan sosial dan masing-masing yang terlibat memperoleh pendapatan yang proporsional.

Salah satu Desa Wisata yang sudah berjalan dengan konsep Desa Wisata adalah di Puri Bedulu. Gagasan awal pengembangan Desa Wisata di sini datang dari masyarakat setempat, kemudian pemerintah sebagai mediator meneruskan gagasan tersebut kepada *travel agent* sebagai pelaku bisnis. Program yang disediakan di Desa Wisata biasanya sudah merupakan paket, di mana wisatawan akan datang menginap beberapa malam, menikmati sajian kuliner, menyaksikan suguhan sendratari atau tari-tarian, menyaksikan upacara ritual, serta berinteraksi dengan suasana/lingkungan keseharian masyarakat setempat. Wisatawan dapat melihat langsung kegiatan keseharian masyarakat setempat di Desa Wisata, mulai kegiatan di pagi hari, hingga malam hari, termasuk dapat menyaksikan secara langsung kehidupan sehari-hari dari keluarga yang ditempati rumahnya, misalnya pada saat memasak, membersihkan rumah, melihat anak sedang berlatih menari, melihat anak sedang belajar dan sebagainya. Wisatawan dapat pula terlibat langsung dalam suatu kegiatan, misalnya pada saat ada pedagang kaki lima sedang membakar sate, maka wisatawan diperkenankan turut membakarnya.

Selain pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata, Dinas Pariwisata Gianyar juga melakukan pemberdayaan dengan pola kemitraan. Hal ini direalisasikan di salah satu obyek daya tarik wisata di Tampak Siring, yakni Tirta Empul. Di sini, Dinas Pariwisata menjalin kerja sama dengan desa adat terkait operasionalisasi lahan parkir., karena tanah di mana Tirta Empul berdiri adalah milik desa adat. Kerja sama tersebut, di antaranya adalah dalam penggunaan areal parkir,

di mana sudah ada kesepakatan pembagian keuntungan/prosentase antara Pemerintah Daerah dengan desa adat setempat. Pegawai Dinas Pariwisata ditugaskan di sini, untuk mengatur pendistribusian hasil operasionalisasi lahan parkir, sedangkan masyarakat setempat yang melakukan pengamanannya, yang dilaksanakan oleh *pecalang* (keamanan lingkungan desa adat). Kerja sama semacam itu juga dilakukan di Goa Gajah, karena areal parkir milik desa setempat. pendistribusian hasil operasionalisasi lahan parkir dibagi berdasarkan prosentasenya melalui kesepakatan yang dibangun. Selain itu, Pemerintah Daerah setempat juga melakukan kerja sama misalnya untuk pemeliharaan pura, nantinya pendistribusian pemasukan akan diatur berdasarkan perda yang berlaku.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Gianyar juga merencanakan untuk menggarap Yehpulu, yaitu sebuah situs yang terkait dengan awal muasal *subak*; Kemudian juga akan mengusahakan pengadaan gajah, serta atraksi gajahnya yang diminati oleh investor untuk dibangun seperti di Karo Ubud. Dalam hal ini Dinas Pariwisata akan berperan selain selaku perpanjangan tangan Pemerintah Daerah, juga sebagai mediator yang akan mempertemukan desa adat dengan investor dalam membangun kerja sama pengelolaan obyek wisata yang direncanakan tersebut. Dengan adanya kerja sama tersebut, maka diharapkan sebagian hasil pengelolaan daya tarik wisatawan tersebut dapat memberikan kontribusi baik kepada desa adat maupun Pemerintah Daerah setempat.

Selain pemberdayaan masyarakat dengan pola di atas, ada juga pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pemberdayaan koperasi. Mengingat selama ini cikal bakal seni tari berikut senimannya mayoritas berasal dari Gianyar maka kemudian dibentuk “koperasi seniman” di Gianyar. Untuk itu dipilih 20 *sebun-sebun* seni (sarang seni/sanggar seni) yang betul-betul ada di Gianyar untuk dihimpun dalam bentuk koperasi. Mereka dipilih atas dasar kriteria pemilihan *sebun-sebun* seni, yang, *pertama sebun-sebun* tersebut memang berada di Gianyar, seperti sanggar-sanggar tua yang sudah tradisi turun temurun eksis keberadaannya; dan yang *kedua*, mereka memiliki bakat/bibit-bibit kesenian, baik sebagai penari maupun sebagai penabuh gendang maupun

gamelan. Setelah “koperasi seniman” terbentuk, maka semua anggotanya dikumpulkan dan ditentukan siapa sebagai penari dan penabuh gamelannya. Kemudian anggota-anggota yang senior akan didistribusikan pada sebun-sebun seni yang terbentuk tersebut sebagai pelatih.

Adapun tujuan dibentuknya “koperasi seniman” selain untuk memberdayakan para seniman itu dalam meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan, juga untuk menjaga kelestarian seni tari maupun kerajinan itu sendiri agar tidak punah. Dengan kata lain “koperasi seniman” sebenarnya adalah suatu wadah dalam bentuk sanggar yang dapat mengakomodir kepentingan dari para anggotanya yang menekuni dunia seni. Koperasi seniman yang sudah ada antara lain koperasi tari, koperasi wayang, koperasi lukis, koperasi arjo atau koperasi opera seperti di Perancis (menari sambil menyanyi). Banyaknya anggota pada setiap koperasi berbeda, tergantung dari jenis koperasinya. Koperasi penari beranggotakan paling banyak, yaitu minimal 80 orang, termasuk penari dan penabuh gamelan dan gendangnya.

Terkait dengan pembentukan *sebun-sebun* seni di Gianyar tersebut, Kementerian Koperasi secara langsung memberikan bantuan dana bergulir sekitar dua milyar rupiah, di mana 20 koperasi yang terpilih di Gianyar, masing-masing memperoleh dana bantuan sebesar seratus juta ditambah dana bantuan dari APBD sebesar dua puluh juta. Koperasi seniman tersebut hingga sekarang telah berkembang menjadi 28 koperasi.

Pembekalan yang diberikan kepada masyarakat membawa imbas pada makin maraknya *seke-seke* (sanggar-sanggar) kesenian yang mendukung pariwisata di Gianyar khususnya, dan Bali pada umumnya. Masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang seni tari dapat berlatih dan menggabungkan diri pada sanggar-sanggar seni, karena melalui sanggar seni inilah mereka dapat diberdayakan untuk pentas di tempat-tempat sesuai permintaan penyelenggara ataupun wisatawan. Sanggar-sanggar tersebut, masing-masing sudah memfasilitasi dengan penari lengkap, termasuk seperangkat gamelan yang beraneka ragam, tidak saja

mendapat panggilan dari dalam negeri seperti dari Kementerian Koperasi untuk mengisi acara di Jakarta, namun juga mendapat panggilan untuk mewakili Indonesia ke luar negeri, seperti ke Perancis baru-baru ini.

Terkait dengan koperasi di atas, sebagaimana diketahui bahwa obyek daya tarik wisata Bali, utamanya adalah budaya. Begitu pula halnya jika berbicara masalah pariwisata, maka titik sentralnya adalah budaya. Banyak kerajinan karya pengrajin Gianyar, antara lain kerajinan ukir-ukiran kayu seperti patung, topeng, hiasan rilief, pigura, berbagai pajangan, meja-kursi; pahatan dari batu padas; kerajinan perak seperti hiasan-hiasan kalung, cincin, anting, bros, gelang, dan lain-lain; lukisan, baik tradisional maupun modern; ukiran dan pahatan dari gading, tulang atau tanduk; kerajinan dari tanah liat, asbak, vas; tenun ikat; kerajinan kulit seperti dompet, tas dan sebagainya.

Bila dipetakan berdasarkan distribusi kecamatannya, kabupaten Gianyar yang terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Sukawati, Blah Batu, Gianyar, Tampak Siring, Ubud, Tegallalang, dan Payangan, semuanya memiliki ciri/ khas kerajinannya masing-masing sebagaimana tampak pada tabel berikut.

No.	Kecamatan
1.	Kecamatan Sukawati
	Merupakan pusat pasar seni, di sini banyak dijumpai penjual cendera mata hasil kerajinan Gianyar, yang tersebar di berbagai kios dan toko yang ada di pasar maupun di sepanjang jalan Sukawati. Masih dalam kawasan Kecamatan Sukawati, yaitu Batu Bulan, di sepanjang jalannya dapat dijumpai kerajinan berbagai pahatan batu padas, berupa patung, baik patung yang menggambarkan dewa-dewa Hindu maupun patung hewan, dan sebagainya. Selain itu, di Celuk, kawasan Sukawati, banyak <i>artshop</i> yang besar-besar menjual langsung produk kerajinan emas dan peraknya, yang dikenal dengan istilah <i>one village one product</i> , dan sudah ada sejak dulu sebelum Bali berkembang.
2.	Kecamatan Blahbatu
	Di sini banyak dijumpai situs-situs purbakala dan sebagian masyarakatnya juga membuat pahatan patung dari batu padas.

No.	Kecamatan
3.	Kecamatan Gianyar
	Terkenal dengan sanggar-sanggar tari yang di antaranya telah pentas melanglang buana hingga ke luar negeri, dan terkenal pula dengan wisata kulinernya, yaitu babi panggang. Kecamatan ini merupakan pusat perkantoran di Kabupaten Gianyar.
4.	Kecamatan Tampak Siring
	Terkenal dengan sumber mata air Tirta Empul dan beberapa situs purbakala yang dikeramatkan, di sini banyak dijual <i>ivory carving</i> (ukiran gading, tulang, tanduk menjangan).
5.	Kecamatan Ubud
	Terkenal dengan desa internasional tempat turis, maupun hotel berbintangnya. Di kecamatan ini tinggal seorang pelukis maestro (sudah meninggal) bernama Blanco, yang dulunya pernah menikah dengan seorang penari dan telah memiliki keturunan. Banyak sekali maestro internasional yang tinggal di Ubud karena suasananya seperti di Eropa.
6.	Kecamatan Tegallalang
	Terkenal dengan kerajinan ukiran dan pahatan yang terbuat dari gading dan <i>bam</i> gajah, tulang maupun tanduk kerbau dan menjangan, termasuk kerajinan ukiran kayu. Ukiran gading yang untuk pengerjaannya memakan waktu enam bulan dan harganya bisa mencapai 1 milyar rupiah. Tegallalang merupakan wilayah <i>artshop</i> , mungkin terpanjang di dunia karena hamparan tokonya di kanan kiri jalan sepanjang 12 km. Di sini ada pematung nasional terkenal bernama Adel, pemahat Garuda Wisnu Kencana yang ada di Tampak Siring, dan juga telah memahat patung-patung ukiran garuda yang ada di istana-istana negara milik RI.
7.	Kecamatan Payangan
	Terkenal dengan agro wisatanya, karena Payangan itu berfungsi sebagai penyanggah air.

Agar berbagai karya seni tersebut tidak punah, maka perlu wadah untuk menjaga kelestariannya, yaitu koperasi. Dengan koperasi ini maka pengrajin dapat dihimpun dalam suatu wadah, di mana akan dilindungi kepentingannya untuk terus berkarya. Bersatunya para pengrajin dalam koperasi dapat menjaga kestabilan harga jualnya, sehingga nilai seninya tetap dapat terjaga. Dalam arti pengrajin tidak asal menjual karyanya hanya demi mendapatkan uang, tetapi dituntut pula

kesadarannya untuk dapat menghargai karyanya sendiri. Dalam perkembangannya jumlah koperasi di Gianyar sudah mencapai 1.100 bahkan lebih. Menurut informan, “Gianyar sebagai pusat seni kalau tidak diisi melalui koperasi, maka pariwisata akan habis. Ibarat buahnya rindang, tapi sayang kalau sering dipetik tidak ada pemupuk”

Dalam upaya memberdayakan masyarakat Gianyar, Dinas Pariwisata juga melakukannya dengan membangun kerja sama antarinstansi, seperti dengan Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Purbakala. Kerja sama Dinas Pariwisata dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian terjadi apabila pada suatu kegiatan (*event*) pameran atau promosi tertentu. Pada saat itu akan dibutuhkan kelompok-kelompok pengrajin yang dapat menampilkan karya-karyanya. Dalam hal ini Dinas Pariwisata memfasilitasi tempat pameran hasil kerajinan, seperti di hotel dan lain sebagainya.

Selain itu, para pelaku usaha, dalam hal ini pengrajin, mendapat bimbingan dan pelatihan dari Dinas Perindustrian maupun Dinas Perdagangan. Dinas Perindustrian telah memiliki program yang sudah dibakukan untuk membimbing dan melatih para pengrajin. Bimbingan dan pelatihan yang diberikan, antara lain dalam hal kiat-kiat menjalankan usaha, bimbingan dalam menjaga kualitas produksi agar mutunya baik, bimbingan dalam mendisain model produk sesuai keinginan pasar, membuat kemasan produk agar menarik, hingga kiat-kiat memasarkan produk dengan baik, dan bantuan bimbingan lainnya. Dinas Perdagangan, ikut terlibat sebatas dalam pemberian ijin usaha kepada para pelaku usaha dan memberikan pembinaan terkait upaya kiat-kiat mendirikan suatu usaha yang baik. Dinas Koperasi juga terlibat dalam membina kelompok-kelompok pengusaha kecil dan menengah yang sifatnya manajerial dan menyangkut manajemen keuangan.

Terkait dengan pengrajin tersebut, Dinas Pariwisata, kendati tidak secara langsung terkait dengan masalah penyadaran hukum tentang perlindungan hak intelektual bagi para pengrajin, namun dalam beberapa kesempatan ketika mereka bertemu dengan para pengrajin. Misalnya pada waktu melakukan peninjauan ke daerah wisata atau keperluan

lainnya selalu menyempatkan diri untuk memberikan pencerahan dan merangsang pengetahuan pengrajin tentang perlunya perlindungan hak intelektual tersebut. Dijelaskan lebih lanjut oleh Dinas Pariwisata kepada mereka, bahwa dengan adanya perlindungan hak intelektual tersebut, maka akan dapat mendorong peningkatan usaha dan kapasitas mereka untuk lebih mampu bersaing secara sehat. Hal-hal tersebut dilakukan Dinas Pariwisata selain terlibat dalam menganalisa perizinan pembuatan hotel atau pondok wisata.

Sedangkan kerja sama yang dilakukan dengan Dinas Purbakala, umumnya terkait dengan pemeliharaan situs-situs peninggalan dari kerajaan Bali kuno⁷ yang berpusat di Gianyar, seperti, antara lain, situs-situs yang ditemukan di Bedulu. Situs tersebut pernah diajukan sebagai *world culture heritage* untuk dinominasikan di Paris, namun sampai saat ini masih belum ada hasilnya.

Sementara kerja sama yang dibangun oleh Dinas Pariwisata dengan Dinas Kebudayaan adalah melibatkan masyarakat untuk menari pada acara-acara tertentu ataupun untuk kepentingan wisatawan. Dinas Pariwisata berperan sebagai mediator dan fasilitator, apabila di suatu tempat, ada kelompok penari, maka, bila dibutuhkan, kelompok penari tersebut nantinya akan dipanggil untuk pentas, begitu pula halnya dengan kelompok pengrajin diperlakukan sama dengan kelompok penari, bila dibutuhkan akan dikaryakan.

Pemberdayaan kepada para seniman tersebut penting karena ironi jika mengetahui bahwa dalam menafkahi hidup keluarganya seorang seniman harus memainkan berbagai peranan. Seperti pagi hari bekerja sebagai petani atau melakukan jenis pekerjaan lainnya, dan malam harinya menari, diangkut dengan truk bersama penari lainnya, untuk mendapatkan imbalan/upah sebesar 5000 rupiah. Oleh karena itu, mereka perlu disejahterakan.

⁷ Yang disebut dengan Bali kuno adalah kerajaan di Gianyar yang pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang diserang oleh Patih Gajah Mada.

Terkait dengan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan kepada masyarakat tersebut, menurut informan, sebenarnya masyarakat sudah paham untuk melaksanakannya, karena dalam kesehariannya mereka sudah memberdayakan dirinya sendiri, bergerak dari sifat dasar yang sudah dimiliki, yaitu budayanya sendiri. Pemerintah hanya memberikan stimulan saja dan ini sebetulnya yang diharapkan.

BAB V

KONDISI, BENTUK-BENTUK PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MARJINAL LOKAL YANG PERNAH DAN SEDANG DILAKUKAN SEKTOR AKOMODASI, SERTA RESPONS MASYARAKAT

5.1 *Community Empowerment* Dari Pengusaha Akomodasi

Pada dasarnya perkembangan industri pariwisata harus membawa manfaat pada masyarakat. Sehubungan dengan ini tentu saja masyarakat harus juga disiapkan ataupun ada kemauan dari pelaku usaha untuk memberdayakan mereka agar dapat turut berpartisipasi dalam perkembangan yang terjadi di industri pariwisata.

Dengan adanya Tri Hita Karana award, secara umum perhotelan yang beroperasi di Bali sudah melakukan CSR. Sebagai ilustrasi, ada sebuah hotel bagus dari BHA, yang managernya sangat peduli dengan CSR. Hotel tersebut sering membantu melakukan bedah rumah untuk masyarakat miskin yang ada di sekitarnya (Nusa Dua). Kegiatan ini dilakukan dengan cara mencari rumah-rumah yang terpencil milik masyarakat yang tidak mampu, lalu diberi bantuan dari dana CSR dengan membangun/merenovasi rumah mereka.

Konsep Tri Hita Karana mengandung tiga aspek yang menyebabkan manusianya bahagia, yakni aspek karyawan atau manusia (human being), aspek sosial, dan aspek geologi yang semuanya terkait dengan Tuhan. Di Nusa Dua Tri Hita Karana tersebut menjadi prioritas. Dengan Tri Hita Karana itu pihak hotel harus membina karyawannya agar aspek manusianya bagus. Hal ini diekspresikan antara lain dengan disediakannya tempat beribadah di setiap hotel, memberikan kesempatan kepada karyawan melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya, memperhitungkan kelestarian alamnya, baik aspek geologi maupun

aspek ekologi, sehingga mereka bisa memelihara alamnya. Terhadap hal itu Yayasan Tri Hita Karana, yang berada di Denpasar, mengadakan penilaian dan pemberian penghargaan setiap tahun sekali. Dalam hal ini ada kriteria-kriteria dan tim penilai dari Tri Hita Karana Foundation. Setiap hotel yang memenuhi kriteria akan diberi penghargaan. Barangkali oleh karena itu umumnya hotel di Bali sudah melakukan CSR.

Namun khusus *community empowerment* oleh sektor akomodasi, pada dasarnya dilakukan oleh masing-masing hotel. Kondisinya sekarang, umumnya hotel-hotel yang berada di Denpasar ataupun di Gianyar masih belum melakukan pemberdayaan masyarakat. Misalnya dalam penerimaan tenaga kerjanya mereka tetap memprioritaskan menerima masyarakat pelamar yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman di berbagai tempat. Sementara masyarakat lokal hanya diberi peluang pada bagian yang dapat diisi oleh sumber daya manusia dengan kualitas relatif rendah, seperti di *landscape, security* dsbnya. Sebenarnya tenaga-tenaga seperti itupun, kalau di PHRI, harus diisi oleh tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat khusus. Dalam kaitan ini, menurut informan dari pengusaha perjalanan wisata, pada intinya selama ini dunia usaha yang bergerak di sektor pariwisata sebenarnya juga ingin melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, namun yang terjadi sekarang yang turut menikmati perkembangan pariwisata umumnya hanya mereka yang memiliki fasilitas fisik pariwisata. Memang, misalnya, digembar-gemborkan pariwisata untuk rakyat, tetapi seberapa besar rakyat menerima langsung atau tidak agak sulit mengukurnya.

Meskipun umumnya hotel atau sektor akomodasi di Bali belum melakukan *community empowerment*, namun ada satu program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh salah satu hotel di daerah Kubu yang cukup menarik untuk diperhatikan. Hotel ini dibangun oleh investor asing dari Eropa. Dia adalah seorang pencinta alam/diver. Dia suka dengan Kubu karena ada alam bawah air yang bagus sekali di Telambon. Oleh karena itu, kemudian dia investasi membangun hotel di

sana. Pada bulan April lalu hotel ini sudah diklasifikasi oleh PHRI dan pada pertengahan tahun ini (2011) baru melakukan *grand opening*.

Yang menarik pada hotel di Kubu tersebut adalah, sekitar 85% SDM tenaga kerjanya diisi oleh masyarakat lokal yang tadinya tidak memiliki pengalaman kerja di perhotelan. Bagi pengusaha hotel lainnya, seperti juga informan PHRI, akan lebih menguntungkan bila lowongan kerja tersebut diisi dengan mencari tenaga yang sudah siap pakai. Tetapi karena investor itu sudah cinta dengan alam di situ, maka ketika ditanya oleh PHRI, pertimbangannya adalah "kalau terus seperti itu lalu masyarakat ini siapa yang akan menyentuh".

Respons masyarakat ketika pertama kali hotel tersebut dibangun cukup baik. Artinya, tidak ada masyarakat yang menolak pembangunannya, karena sebelumnya di Kubu sudah ada beberapa hotel, meskipun belum sebanyak di Bali Selatan. Dan memang masyarakat sudah mengetahui bahwa daerahnya akan dibuka untuk kawasan wisata sehingga bersikap terbuka.

Ketika masyarakatnya diajak bekerja di hotel di Kubu, mereka merespons dengan baik. Namun awalnya masyarakat tidak berpikir bahwa mereka akan disiapkan dengan diberikan training dulu. Mereka pikir bahwa *skill* yang dimilikinya sudah memadai sehingga bisa langsung bekerja. Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka tidak memiliki skill karena kebanyakan dari mereka masih sangat muda dan tidak memiliki pengalaman bekerja di hotel. Oleh karena itu, kemudian mereka pun diberi pelatihan dulu oleh pihak hotel yang bersangkutan.

Bagi informan PHRI, pemikiran dan tindakan seperti yang diambil oleh investor itu tergolong sangat berani, karena investasinya akan cukup besar, sementara dia masih harus melatih tenaga kerjanya yang tadinya tidak tahu apa-apa. Mereka merekrut tenaga kerja lokal dari awal, sehingga pelatihan di hotel di Kubu itu mulai dari nol sampai dia bisa dan meliputi berbagai departemen/bagian seperti *house keeping*, *kitchen*, *roomboy* dan sebagainya. Mereka juga harus melatih bahasa Inggris seperti mengucapkan *this is spoon*, *this is plate* sampai mereka

bisa memberikan pelayanan yang baik kepada tamu. Sebelum hotel itu jalan, dia mempersiapkan tenaga kerjanya melalui training-training tersebut sekitar satu setengah tahun dan atas biaya dari dia sendiri. Tetapi sekarang mereka sudah bisa memberikan pelayanan sebagaimana pelayanan hotel berbintang lainnya.

Deskripsi di atas memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal dengan memanfaatkan tenaga mereka yang dilakukan hotel di Kubu tersebut sangat bagus dan berani. Karena kalau dilihat dari segi investasinya, sebagaimana juga dikatakan informan, harusnya dia berpikir berapa kali sebelum melakukan langkah itu. Tetapi karena dia mempunyai rasa tanggung jawab sosial bahwa "kalau bukan kita yang memberdayakan mereka siapa lagi" maka pemilik hotel tersebut mau melakukan pemberdayaan masyarakat tersebut. Tetapi dengan melakukan hal itu tentunya dia bisa mengharapkan adanya kedekatan dengan masyarakat lokal di sana. Dengan begitu maka secara tidak langsung dia bisa menarik manfaat dari terciptanya keamanan lingkungan sehingga dia merasa lebih safe.

Namun sayangnya, seperti diakui oleh informan PHRI, dari sekian banyak hotel yang ada di Bali yang melakukan pemberdayaan seperti itu masih sangat kecil jumlahnya. Bahkan belum ditemukan lagi hotel yang melakukan pemberdayaan seperti yang dilakukan hotel di Kubu itu. Selama ini hotel-hotel tersebut masih susah didorong untuk memanfaatkan sumber daya manusia setempat. Oleh karena itu, PHRI memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan hotel di Kubu tersebut. Pengusaha hotel-hotel di daerah kabupaten Gianyar atau di Badung, mereka jarang yang melakukan pemberdayaan masyarakat karena masyarakatnya sudah cukup modern. Di daerah seperti Badung, Denpasar selain Gianyar, selain penduduk setempat juga banyak penduduk pendatang dari luar Bali. Oleh karena itu, SDM yang ada di daerah itu memang secara otomatis menyiapkan dirinya dengan bersekolah atau kursus dan sebagainya.

Kalaupun ada satu kasus di daerah Gianyar di mana hotel melakukan pemberdayaan masyarakat. Tetapi hal itu dilakukan karena

sebelum dia masuk ada persyaratan yang dikeluarkan oleh desa atau aparat setempat bahwa begitu nanti hotelnya dibangun harus ada kontribusi dalam bentuk pemberdayaan, sehingga mau tidak mau dia sudah terikat dengan persyaratan itu. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan bukan atas kesadaran pengusaha akomodasi sendiri.

Selain pemberdayaan kepada lingkungan masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial dari mereka masing-masing, ada model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh hotel Nusa Dua Beach dengan bentuk pola binaan terhadap salah satu panti asuhan. Dalam melakukan pemberdayaan ini program yang diluncurkan tidak hanya bersifat sekali membantu kemudian selesai, tetapi dilakukan secara berkesinambungan. Misalnya, hotel ini mengadopsi menjadi orang tua asuh dari panti asuhan dengan jumlah sekian anak. Kemudian dia membina dan membiayai anak-anak yang ada di panti asuhan tersebut dari mulai dari kelas satu SD sampai tamat SMP. Bantuan tersebut dilakukan terus menerus seiring dengan perkembangan jumlah anak yang ada di panti asuhan tersebut.

Meskipun sangat sedikit pengusaha hotel yang melakukan *community empowerment*, tetapi untuk kategori CSR umumnya hotel di Bali sudah mulai melakukannya. Menurut informan, sebagian besar hotel sudah punya CSR. Terkait dengan itu, barangkali ada baiknya bila PHRI mendorong hotel-hotel tersebut agar CSR yang dijalankannya diarahkan untuk keperluan penguatan kapasitas tenaga kerja masyarakat lokal. Hal itu bisa dilakukan dengan memberikan training kepada tenaga kerja lokal yang sudah menjadi karyawan hotel level bawah atau meningkatkan pendidikan masyarakat sekitar yang potensial untuk dijadikan tenaga kerja hotel level menengah atau bahkan mengembangkan potensi masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha mandiri, baik yang terkait dengan hotel maupun di luar itu.

Yang menarik dari deskripsi itu bahwa sebenarnya dengan adanya program CSR yang diluncurkan oleh sebagian besar mengindikasikan bahwa bagaimana pun pengusaha akomodasi hotel sudah memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya. Hal ini

tentunya harus dilihat sebagai potensi yang dapat diarahkan kepada *community empowerment*. Untuk itu diperlukan intervensi dari para *stakeholder*, terutama Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan dan PHRI yang menaunginya agar CSR perhotelan tersebut dapat diarahkan pada program *community empowerment*, yang tidak hanya bersifat *charity*. Karena kalau pemerintah sudah menetapkan kebijakan maka semua pengusaha harus mengikuti. Sementara kalau investor datang membangun akomodasi tentunya lebih peduli pada bagaimana mendapatkan profit yang besar dan dia tidak hirau dengan lingkungan, masyarakat dan sebagainya yang mungkin menjadi hambatan buat dia.

Menurut seorang informan dari travel agent, direktur BHA cukup sering mengundang pihak terkait untuk berpartisipasi dalam melakukan *community empowerment*. Mereka, misalnya, diajak untuk bertemu langsung dengan tokoh masyarakat desa yang ada. Berdasarkan nama-nama yang tertera dalam undangan tersebut seharusnya mereka memang kompeten untuk melakukan *community empowerment*, tetapi tampaknya mereka kurang peduli dengan hal ini. Memang masih ada tokoh-tokoh masyarakat yang sempat diajak melakukan *community empowerment* dan mempunyai peduli yang sama terhadap hal itu. Misalnya ada seorang arsitek di Denpasar yang juga yang mau dan sempat dilibatkan untuk membantu membuat arsitek yang bagus untuk desa. Hanya saja jumlahnya masih kurang banyak, padahal tokoh di Bali itu sangat banyak.

Dari dari pihak Pemerintah Daerah sendiri responsnya relatif bagus. Hal ini diperlihatkan ketika belum lama ini mau membuka program pemberdayaan di desa Penglipuran, Pemda terkait termasuk bupatinya sempat ikut turun dan dia antusias. Bupati sempat datang ke desa Penglipuran itu untuk mengajak masyarakat untuk ikut serta dan masyarakat pun menyediakan makan, padahal biasanya desa itu desa yang tertutup. Memang Pemda cukup memberikan support untuk kegiatan *community empowerment* karena mereka, baik Pemda maupun pusat, juga memiliki program semacam itu. Kendalanya dalam pemberdayaan masyarakat ini adalah seperti ada *missing link* sehingga tidak ada sinkronisasi antara satu dengan lainnya, baik antar instansi

pemerintah sendiri maupun dengan dunia usaha. Sebagai contoh, untuk asosiasi pariwisata, misalnya ketika ada sesuatu masalah maka akan susah mencari sumber masalah dan pemecahannya karena masing-masing mempunyai perhatian sendiri-sendiri. Katakanlah kalau masalahnya ditemukan kemudian dihilangkan, maka mungkin akan mendapatkan reaksi lain dari pengusaha karena tindakan itu menyebabkan bisnisnya ikut hilang. Jadi hal semacam itu susah dicari solusinya. Oleh karena itu, kebanyakan pihak sekarang berjalan sendiri-sendiri. Hal ini pula yang mungkin ditempuh direktur BHA karena dengan jalan sendiri lebih cepat terlaksana dari pada melalui asosiasi.

Yang menjadi persoalan dalam melakukan *community empowerment* ini, salah satunya, adalah kegiatan itu berjalan secara lebih individual dan di tingkat pemerintahan pun masih “ego sektoral”. Padahal andai saja bisa dibangun suatu sinergi di antar berbagai *stakeholders* mungkin akan lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu, mungkin harus dibangun kerja sama di antara *stakeholders* tersebut yang dimotori oleh pemerintah (daerah) yang memiliki otoritas untuk itu. Pemerintah harus mengambil peran fasilitator baik melalui pembuatan kebijakan maupun implementasinya. Perlu ada penyamaan visi di antara kepala daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Bila ini bisa diwujudkan dan dibarengi dengan komitmen yang kuat maka akan lebih mudah menembus dan membangun kerja sama pada level yang di bawahnya, sehingga tidak mustahil dapat dilakukan sinergi di antara para pihak dalam melakukan *community empowerment* yang efisien dan efektif.

5.2 Community Empowerment PT. BTDC (BUMN)

5.2.1 Kronologi Pembangunan PT BTDC

PT BTDC didirikan pada tahun 1972 yang *disetting* oleh Bank Dunia, UNDP, untuk menyiapkan suatu kawasan. Pendiriannya diawali dengan suatu studi tentang prospek pariwisata Bali yang dilakukan oleh SCETO, yakni sebuah perusahaan konsultan Paris, atas permintaan UNDP. Hasil studi tersebut merekomendasikan satu *master plan* pariwisata Bali yang diarahkan pada pembangunan ekonomi yang dapat

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya, masyarakat, dan lingkungan.

Studi tersebut memperlihatkan bahwa untuk pembangunan ekonomi pariwisata Bali perlu dikembangkan sejumlah hotel dan penginapan yang berkualitas internasional. Rekomendasi tersebut sangat relevan karena pada tahun 1975 di Bali hanya tersedia 1.800 kamar yang tersebar di Kuta dan Sanur, padahal menurut studi yang dilakukan sampai tahun 1980 saja dibutuhkan antara 3.800 sampai dengan 4.700 kamar yang berkualitas. Atas dasar pertimbangan itu maka kemudian didirikan resort pariwisata Nusa Dua yang dimaksudkan untuk menyediakan kamar yang berkualitas internasional guna memenuhi kebutuhan para wisatawan yang semakin meningkat jumlahnya.

Proyek Nusa Dua tersebut merupakan perencanaan suatu area pariwisata dan akomodasi secara terintegrasi yang dibangun relatif jauh dari pemukiman penduduk asli Bali tetapi relatif dekat dari bandara Ngurah Rai, dan memiliki akses yang relatif mudah untuk mendapatkan pelayanan lain yang dibutuhkan. Penjarakkan terhadap pemukiman penduduk ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pengaruh negatif pariwisata terhadap masyarakat setempat. Dengan memenuhi kualifikasi tersebut diharapkan kebutuhan wisatawan akan kamar yang berkualitas dapat dipenuhi dan sekaligus dapat melindungi kultur Bali yang menjadi atraksi pariwisata. Untuk itu maka dipilih bukit bebatuan Nusa Dua yang merupakan daerah *enclave* di mana masih tersedia lahan yang relatif luas yang dapat digunakan untuk membangun. Dengan memilih lokasi ini memang ada kendala yang harus dihadapi di Nusa Dua, yakni kurangnya *supply* air, makanya daerah ini tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Namun sebaliknya daerah Nusa Dua memiliki pantai berpasir putih, laut biru yang jernih, dan pemandangan matahari terbit yang indah.

Dalam operasionalnya, resort tersebut dipersiapkan dengan cara memplot lahan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pembangun hotel dan elemen lainnya, namun tidak mengganggu alam dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas dan infrastruktur yang tersedia. Selain itu, hotel-hotel yang dibangun diplot di sepanjang bentangan

pantai dan nuansanya dibangun seperti replika kampung tradisional Bali dengan konstruksi arsitektur Bali.

Adapun konsep pembangunannya adalah sebagai berikut:

- (1) Pembangunan kawasan pariwisata Nusa Dua merupakan bagian dari master plan pembangunan pariwisata Bali
- (2) Sentralisasi pembangunan dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan dan proses konstruksi
- (3) Efisiensi operasi dari seluruh fasilitas dan infrastruktur yang ada
- (4) Menyewakan lahan dengan hak guna bangunan yang berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun
- (5) Pengaturan *layout* bangunan yang mensyaratkan bahwa:
 - (a) ketinggian bangunan maksimum 15 meter
 - (b) Mengikuti tanda batas dari garis pantai ke bagian terluar bangunan
 - (c) Memperhatikan rasio lahan terhadap bangunan
- (6) Membentuk komite desain untuk mengevaluasi dan mengarahkan desain bangunan dan fasilitas lainnya. Komite desain ini terdiri dari para ahli bangunan dan arsitek yang bertugas mengarahkan agar setiap bangunan dan fasilitasnya merepresentasikan gambaran Bali.

Untuk melaksanakan *master plan* Nusa Dua tersebut, maka didirikan suatu badan usaha yang diberi nama Bali Tourism Development Corporation (PT BTDC). PT BTDC ini tepatnya didirikan pada tanggal 12 November 1973 berdasarkan PP No 27 tahun 1972. Terkait dengan itu, PT BTDC juga merupakan yayasan yang dibentuk Pemda TK I Bali pada tahun 1980. Mengingat pembentukan PT BTDC berdasarkan pada suatu peraturan pemerintah, maka berarti dia merupakan sebuah BUMN. Adapun tugas yang diembannya adalah menyiapkan fasilitas dan infrastruktur, mengundang investor, membangun hotel-hotel, dan mengelola kawasan pariwisata Nusa Dua.

Dalam operasionalnya perusahaan ini mengelola lahan kawasan pariwisata seluas 350 hektar yang semula tandus dan tidak produktif untuk dijadikan area pariwisata yang menarik. Dalam pengadaan lahan kawasannya, karena PT BTDC ini milik negara, maka negara melalui tim

inter-departemen membebaskan tanah dari masyarakat. Semua lahan yang dibebaskan tersebut adalah tanah milik masyarakat, tidak ada tanah adat. Tidak adanya tanah adat ini terjadi karena konon dulunya lahan di sini banyak dimiliki oleh raja-raja sebagai penguasa daerah. Kemudian tanah-tanah tersebut dibeli oleh pemerintah dengan harga yang layak waktu itu.

Karena pada tahun 1972 tersebut area ini merupakan tanah kosong dan yang membebaskan lahannya adalah pemerintah serta dibeli dengan harga yang cukup layak, maka proses pembebasannya pun relatif lancar, dalam arti tidak menghadapi konflik dengan masyarakat. Memang pada saat itu ada beberapa penggarap, bukan pemilik lahan, yang menggarap sebagian lahan yang ada. Tetapi kemudian kepada mereka dilakukan relokasi dengan cara diberikan tanah untuk tempat pemukiman rumah seluas minimal tiga sampai empat are, atau 300 sampai 400 meter persegi. Pada saat itu ada 160 orang penggarap di sini yang dibelikan tanah/rumah. Dengan demikian, proses pembebasan lahannya pun tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Sebagaimana disinggung di atas, PT BTDC ditugasi oleh pemerintah untuk mengelola kawasan pariwisata Nusa Dua, Bali. Dalam upaya pengembangan kawasan tersebut pihak pengelola kawasan menyiapkan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh hotel, seperti jalan, listrik, air. Artinya pihak PT BTDC, sebagai pengelola kawasan, membangun semua infrastruktur tersebut, termasuk sarana jalan dari Denpasar menuju kawasan ini. Adapun pendanaan pembangunannya berasal dari pinjaman Bank Dunia berdasarkan *appraisal* yang dilakukan pada Mei 1974. Pinjaman ini sudah dilunasi sebelum jatuh tempo.

Adapun konsep penyediaan lahan untuk keperluan membangun hotel di Nusa Dua tersebut, seperti telah sedikit disinggung di atas, pihak PT BTDC tidak menjual tanah yang ada di kawasan, melainkan hanya menyewakan tanah/lot. Konsep ini digunakan selain untuk menciptakan profit bagi PT BTDC berupa uang sewa, juga agar lahan yang tersedia tidak terjual kepada pihak asing. Namun agar tawaran ini menarik dan untuk menjamin kontinuitas usaha para investor, maka Jangka waktu

sewa yang diberikan kepada penyewa/investor relatif panjang yakni 30 tahun dan sesuai dengan aturan BPN yang disepakati bisa diperpanjang lagi selama 20 tahun. Dengan model pengelolaan lahan seperti ini, ternyata investor tertarik untuk datang menyewa lot lahan yang ditawarkan di Nusa Dua dan mereka pun membangun hotel di sana.

5.2.2 Pemberdayaan Masyarakat Langsung dalam Kebijakan PT BTDC

Karena posisinya sebagai BUMN, maka bersamaan dengan penugasan pengembangan kawasan di atas, PT BTDC juga mengemban tugas melaksanakan salah satu kebijakan pemerintah yakni menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sejak awal pengembangannya PT BTDC sudah *mensetting* manfaat yang ingin dicapainya yakni, pertama, tugas PT BTDC sebagai sebuah BUMN harus menghasilkan profit dari hasil penyewaan lahan yang dikelolanya, kedua, sebagai *agent of development* PT BTDC harus mampu menyiapkan lapangan pekerjaan kepada masyarakat di sekitarnya, Bali khususnya dan Indonesia umumnya.

Dalam implementasinya, pada tahap pembangunan pertama untuk penyiapan infrastruktur dimulai pada tahun 1976, masyarakat lokal sudah mulai dilibatkan baik sebagai tenaga kerja maupun *supplier* bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur dasar tersebut. Langkah selanjutnya setelah selesai pembangunan infrastruktur, pihak PT BTDC mengundang para investor untuk membangun hotel di Nusa Dua. Kemudian misi kedua tersebut juga disosialisasikan kepada hotel-hotel yang beroperasi di kawasan Nusa Dua.

Sementara itu, dalam upaya mengembangkan fungsi sosialnya, karena selain bergerak dalam bidang perhotelan PT BTDC juga bergerak di sektor industri pariwisata, sesuai dengan UU Kepariwisata, maka PT BTDC mengejawantahkannya dalam bentuk kebijakan dan aturan yang mensyarakatkan kepada para investor bahwa setiap arsitektur hotel yang dibangun di Nusa Dua harus mencerminkan arsitektur lokal dan memanfaatkan bahan2 lokal. Kebijakan ini dianggap penting karena

pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata budaya dan arsitektur lokal tersebut merupakan *tetareh* kebudayaan. Dengan adanya aturan tersebut maka investor yang membangun hotel di Nusa Dua mau tidak mau harus membeli bahan seperti padas, paras, alang-alang, dan sebagainya dari masyarakat lokal.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat kebijakan tersebut tentunya memberi manfaat yang sangat luas. Manfaat tersebut dapat dirasakan masyarakat lokal sejak dimulainya pembangunan hotel karena mereka dapat terlibat baik sebagai tenaga kerja langsung seperti insinyur, ahli arsitektur, tukang, buruh, maupun sebagai tenaga kerja tidak langsung yang bekerja pada pihak ketiga yang menjadi supplier bahan bangunan hotel, seperti batu padas, yang harus diperoleh dari bahan-bahan lokal. Dengan kata lain kebijaksanaan yang digariskan oleh PT BTDC tersebut memberikan dampak menyejahterakan masyarakat sekitarnya dari sejak awal berdirinya hotel-hotel yang berada di kawasan ini.

Kebijakan lain yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat adalah, pada saat hotel-hotel tersebut beroperasi, PT BTDC membuat kesepakatan dengan pihak manajemen hotel bahwa tenaga kerja yang dipekerjakan semaksimal mungkin harus berasal dari tenaga kerja tempatan. Realisasi dari kebijakan tersebut cukup menggembirakan di mana dari target pelibatan sebesar 35% tenaga kerja dari Bali, khususnya dari sekitar lokasi kawasan, kenyataannya di lapangan diperkirakan mencapai sekitar 65% orang Bali yang terserap bekerja di kawasan Nusa Dua. Sampai dengan saat ini, secara absolut tenaga kerja langsung yang resmi yang bekerja di Nusa Dua kurang lebih 8.000 orang. Mereka terserap di 12 hotel berbintang yang dibangun di Nusa Dua dengan jumlah kamar kurang lebih 4.000 unit. Sementara sisanya terbagi atas 23% orang luar Bali dan hanya sekitar 1% orang asing yang bekerja di hotel yang ada di kawasan Nusa Dua ini. Besaran tenaga kerja asing sebesar satu persen tersebut tidak bisa dihindari dan sulit untuk diminimalisir karena industri pariwisata adalah industri kepercayaan di mana para General Manager hotel berbintang lima itu adalah orang asing.

Banyaknya masyarakat tempatan yang di hotel-hotel di Nusa Dua tersebut dapat dipahami karena Industri pariwisata merupakan *human touch* atau menyentuh manusianya. Dengan memberikan kesempatan kerja dan mempekerjakan karyawan dari masyarakat tempatan berarti juga sudah melakukan CSR. Apalagi hotel di Nusa Dua-Bali ini menekankan aspek *hospitality* (keramah tamahan), sehingga biasanya hotel di kawasan ini lebih senang memakai tenaga lokal karena dari karakter tenaga kerja orang Bali biasanya lebih penurut dan lebih ramah terhadap orang, walaupun sekarang orang Bali sudah mulai berubah karena turut terpengaruh oleh tenaga kerja dari daerah lain.

Hanya ada satu “kelemahan” orang Bali dari sisi budaya. Dalam budaya Bali sering kali dilakukan ritual-ritual keagamaan sehingga kadang kala tenaga kerja Bali lebih sering meminta ijin libur dari pada karyawan dari luar Bali. Oleh karena itu, biasanya diistilahkan Bali banyak libur, karena misalnya ketika galungan libur, kuningan libur, dll sebagainya untuk melaksanakan ritual budaya. Padahal bila dibandingkan dengan kaum muslim total liburnya relatif sama karena libur yang diambil orang muslim dari sebelum lebaran sampai lebaran sekitar 2 minggu. Hanya saja orang Bali mengambil liburnya secara dicicil, umpamanya galungan diambil 1 hari, upacara lain diambil satu hari, dan seterusnya, sehingga tampak sering. Padahal bila ditotal setahunnya jumlah liburnya kurang lebih sama dengan orang luar Bali, meskipun sebenarnya orang Bali dapat dikatakan tidak pernah betul-betul libur untuk dinikmati kecuali untuk melakukan ritual-ritual tersebut.

Sementara itu, *community empowerment* di bidang sosial yang dilakukan hotel bintang 5 yang ada di Nusa Dua dilakukan dengan cara memberi bantuan langsung dan spontan bila ada orang yang terkena penyakit HIV Aid atau penyakit berat lainnya.

5.2.3 Pemberdayaan Masyarakat Tidak Langsung dari Kebijakan dan Eksistensi PT BTDC

Selain diperlihatkan dalam kebijakan ketenagakerjaan seperti di atas, kebijakan PT BTDC selaku pengelola kawasan yang bersifat pro-

rakyat juga dibuktikan dalam pengaturan para pedagang kecil yang ada di sekitar pantai di Nusa Dua. Dalam hal ini, meskipun sebenarnya perda kabupaten tidak membolehkan adanya pedagang kaki lima dan pedagang acung di pantai, tapi dalam kebijakannya PT BTDC mengizinkan mereka untuk berdagang di pantai. Kebijakan ini dilakukan karena pihak manajemen BTDC melihat bahwa kemampuan masyarakat sekitar untuk mendapat pekerjaan yang lebih tinggi sangat terbatas. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini maka banyak masyarakat tempatan yang mendapatkan manfaat dari dibangunnya hotel-hotel di kawasan Nusa Dua tersebut. Mereka bisa menjual barang dagangannya kepada para turis dengan standar harga dollar. Dengan demikian, secara finansial mereka mendapat manfaat yang cukup luas.

Hal lain yang berdampak kepada *community empowerment* dari adanya kawasan Nusa Dua adalah relatif banyaknya tenaga kerja dari luar daerah yang bekerja di sini. Kondisi ini membuka peluang usaha bagi masyarakat tempatan dengan menyiapkan akomodasi pemondokan untuk tenaga kerja yang berasal dari luar daerah tersebut. Realitasnya kini, banyak masyarakat tempatan yang membuat rumah tempat kost untuk menampung para tenaga kerja dari luar daerah tersebut. Harga sewa/kost yang diberlakukan relatif tinggi, yakni sekitar Rp400 ribu per bulan. Dengan begitu masyarakat tempatan memperoleh tambahan pendapatan dengan adanya kawasan Nusa Dua tersebut.

Implikasi lainnya yang terkait dengan *community empowerment* adalah, dengan adanya kawasan Nusa Dua mendorong berkembangnya industri kerajinan-*handycraft*, pedagang cenderamata, tenaga kerja *guide*, supir rental sebagai akibat tuntutan industri pariwisata. Dengan demikian, berdampak kepada *community empowerment* masyarakat tempatan.

Deskripsi di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan tugas yang harus diembannya, yang diturunkan dari kebijakan pemerintah, tampak bahwa pada hakekatnya PT BTDC menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Dalam kerangka itu, dari sudut *empowerment* dapat diartikan bahwa mulai dari kebijakan hingga implementasi penyiapan

infrastruktur yang dilakukan oleh PT BTDC menjadi salah satu kontribusi BUMN tersebut terhadap pengembangan kawasan pariwisata di Bali, khususnya di Nusa Dua, yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat tempatan. Dengan kata lain misi pemberdayaan masyarakat lokal sudah mulai dipertimbangkan dan direalisasikan sejak tahap awal pembangunan kawasan Nusa Dua tersebut. Dengan demikian, berkembangnya pembangunan industri perhotelan dan kawasan pariwisata di Nusa Dua telah memberikan berbagai dampak langsung terhadap peningkatan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat tempatan.

5.2.4 Community Empowerment PT BTDC dalam Bidang Pendidikan

Jumlah hotel yang sudah dibangun di kawasan Nusa Dua hingga saat ini sebanyak 12 Hotel Bintang 5. Dengan adanya hotel berbintang yang relatif banyak tersebut tentunya membutuhkan tenaga kerja terampil. Potensi *demand* untuk tenaga kerja terampil untuk kebutuhan perhotelan tersebut sudah diantisipasi oleh PT BTDC. Oleh karena itu, bersamaan dengan waktu pendirian kawasan Nusa Dua, manajemen PT BTDC juga membentuk sekolah yang dulunya bernama Balai Latihan Pariwisata Bali (BLPB), dan sekarang berganti nama menjadi Sekolah Tinggi Pariwisata (STP). Tujuan PT BTDC mendirikan sekolah tersebut adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang handal guna *mensupport* kawasan yang di bangun di Nusa Dua. Untuk kebutuhan peningkatan kualitas SDM pariwisata tersebut pendanaan dari mulai pendirian BPLP sampai dengan kebutuhan dana operasional awal dibiayai dari bantuan UNDP. Jadi pembangunan sekolah tersebut *inline* dengan pembentukan Nusa Dua dan awalnya BPLP ini merupakan bantuan sosial. Artinya sejak awal perencanaannya, dalam proyek pengembangan kawasan pariwisata ini *including* alokasi dana khusus untuk pengembangan pendidikan pariwisata.

BPLP tersebut didirikan dan dijadikan arena bantuan sosial karena pada tahun 1970an kondisi pendidikan di Nusa Dua belum berkembang. Di daerah ini banyak anak muda putus sekolah. Oleh

karena itu, untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat Nusa Dua, maka anak-anak muda tempatan dipaksa masuk sekolah BPLP. Dalam proses perekrutan peserta didiknya, awalnya BPLP merekrut murid dari masyarakat tempatan khususnya anak-anak muda di sekitar lokasi yang drop out dari SD dan SMP. Pada saat itu semua anak muda putus sekolah dirangkul dan kemudian bagi mereka yang mau melanjutkan pendidikannya dipanggil untuk sekolah di BPLP. Untuk kepentingan itu PT BTDC mengalokasikan dua lokal kelas BPLP yang dikhususkan untuk menampung anak-anak muda usia sekolah dari *local people*. Hal ini terjadi pada angkatan pertama dan kedua. Rekrutmen masyarakat tempatan tersebut dianggap perlu dilakukan karena daerah Nusa Dua akan dibuat kawasan pariwisata, sehingga untuk dapat berpartisipasi dalam kemajuan pembangunan kawasan ini mereka harus menyiapkan diri melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan.

Dilihat dari sisi prosesnya, pihak PT BTDC menyadari bahwa untuk membangun, merekrut dan mengoperasikan BPLP tersebut membutuhkan waktu dan kesungguhan. Oleh karena itu, pihak BTDC mengawalinya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tempatan bahwa kawasan ini akan dijadikan kawasan pariwisata. Sosialisasi melalui pendekatan sosial pada saat awal pembangunan proyek tersebut dianggap sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan proyek, karena pada waktu itu masyarakat yang ada masih tradisional. Oleh karena itu, komunikasi yang dikembangkan dalam sosialisasi pun dilakukan dengan cara tradisional yakni melalui pertunjukkan kesenian yang kontennya mengkomunikasikan bahwa di daerah Nusa Dua akan dibuat kawasan internasional dan akan membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas. Untuk itu masyarakat diminta untuk mempersiapkan diri agar tidak tersisihkan. Bersamaan dengan itu, PT BTDC juga melakukan langkah sosialisasi yang diarahkan untuk menyadarkan masyarakat lokal agar mereka dapat memanfaatkan uang untuk hal yang bermanfaat dan produktif, karena pada saat itu mereka mendapat banyak uang dari hasil penjualan tanah mereka kepada PT BTDC. Setelah melakukan sosialisasi dengan dua materi di atas, baru kemudian disosialisasikan kepada

masyarakat di sekitar tentang perlunya sekolah (BPLP). Jadi ada proses sosialisasi yang cukup lama dalam mengembangkan BPLP ini.

Adapun kendala yang dihadapi PT BTDC dalam pengembangan BPLP tersebut adalah masalah penyiapan pengajarnya. Hal ini terjadi karena kawasan yang dikembangkan adalah standar internasional, sehingga BPLP pun dari awalnya di *set up* internasional. Padahal pada tahun 1970an Indonesia belum memiliki tenaga atau ahli-ahli pariwisata. Oleh karena itu, PT BTDC meminta bantuan dari bank dunia agar mendatangkan tenaga pengajar dari luar, sehingga pada waktu itu dosen dan para pelatih di BPLP terdiri dari orang asing.

Dilihat dari materi pengajarannya, pada awalnya pengajaran di BPLP masih bersifat pelatihan atau training untuk meningkatkan *skill*. *Skill* yang banyak dikembangkan adalah *hospitality*, cara bersikap dalam melayani wisatawan, kemampuan bahasa asing, cara berperilaku, cara berkomunikasi dengan orang asing, dan sebagainya. Berbagai *skill* seperti itu dibutuhkan karena secara alamiah (*nature*) kepariwisataan adalah dunia *hospitality*, dunia pelayanan. Oleh karena itu, perubahan sikap mental menjadi yang paling utama. Hal dasar lain yang dibutuhkan adalah kemampuan berbahasa Inggris, tata cara menyuguhkan makanan kepada wisatawan, memberikan *greeting*.

Ketika lulus dari BPLP peserta didik diberi sertifikat kelulusan. Pada saat itu semua lulusan BPLP bisa langsung diterima bekerja di hotel yang dibangun di kawasan Nusa Dua. Hal tersebut dimungkinkan karena kebutuhan kawasan akan tenaga kerja relatif besar, yakni mencapai 8.000 tenaga kerja, sementara tenaga kerja terdidik, seperti yang memiliki *skill* untuk *room service*, manajemen, dan sebagainya terbatas sekali. Dengan demikian, peluang kerja yang tersedia waktu itu memang masih besar dan tingkat kompetisinya pun belum terlalu tinggi. Bahkan lulusan seperti dari STP Bandung, Bali, Makasar pada saat itu banyak yang terserap di sini, karena mereka sudah dididik menjadi tenaga kerja yang kompeten.

Lulusan BPLP yang dididik pada periode awal, sekarang ini sudah ada yang mencapai posisi manager di salah satu hotel di Nusa

Dua. Padahal tadinya dia merupakan anggota masyarakat tempatan yang tidak tamat sekolah yang kemudian dipaksa masuk BPLP dan setelah lulus langsung dipekerjakan di salah satu hotel pertama Nusa Dua beach. Akhirnya sekarang ini dia sudah menjadi *head manager* di hotel tersebut. Lulusan lainnya dari BPLP sekarang bahkan sudah ada yang menjadi sarjana pariwisata S1, padahal dulu dia juga putus sekolah.

Setelah berkembang menjadi STP, sekarang ini alumni STP dapat dikatakan sudah menguasai pariwisata di dunia. Bahkan sekarang orang dari luar Indonesia banyak yang ingin sekolah di STP di sini. Misalnya, ada orang Malaysia yang datang belajar di sini. STP Bali ini semakin menarik karena banyak tamatan dari STP ini yang bekerja di berbagai tempat di dunia seperti di dubai, kerja di kapal *cruise* dan berhasil. Di antara mereka yang pergi ke luar tersebut setelah bekerja setahun ada yang bisa membawa pulang uang hingga lima ratus juta rupiah ketika mereka kembali ke sini. Bahkan banyak dari mereka yang sudah tidak mau lagi bekerja di Nusa Dua karena gajinya kecil. Sekarang mereka umumnya pergi bekerja ke luar negeri.

Dalam perkembangannya, setelah sekolah itu berjalan beberapa tahun, kemudian keluar peraturan pemerintah yang mengatur bahwa BUMN dilarang untuk mengelola sekolah. Dengan ada kebijakan pemerintah seperti itu, meskipun awalnya sekolah tersebut didirikan oleh BTDC, maka STP tersebut pun diserahkan ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, yang kemudian ditempatkan di bagian Litbang KemenBudpar. Dengan demikian, sekarang pengelolaan STP tersebut diposisikan di bawah Menbudpar.

5.2.5 Community Empowerment PT BTDC di Bidang Ekonomi

Selama ini *raw material* hasil pertanian, seperti buah-buahan dan sayur mayur, untuk memenuhi kebutuhan hotel yang beroperasi di kawasan Nusa Dua banyak didatangkan dari luar daerah, karena kebutuhan itu tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri oleh Bali. Oleh karena itu, banyak penjual hasil pertanian tersebut bukan berasal dari

Bali, melainkan dari Banyuwangi, Lombok, Malang, dan sebagainya. Namun tidak demikian halnya dengan kebutuhan handycraftnya. Mengingat banyaknya masyarakat Bali yang menjadi seniman dan mereka sudah memproduksi secara kreatif, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dipenuhi sendiri dari Bali

Mengingat produktivitas, efisiensi, dan kreativitas yang sudah sangat berkembang pada masyarakat seniman Bali, maka dalam rangka pemberdayaan masyarakatnya PT BTDC tidak masuk ke dalam program pembinaan kepada mereka. Meskipun begitu pihak BTDC tetap melakukan pemberdayaan pada sektor lainnya, seperti pengembangan bisnis kecil. Dalam pemberdayaan usaha kecil ini PT BTDC merupakan salah satu BUMN yang paling aktif karena sangat peduli dengan pemberdayaan pengusaha kecil, pengrajin. Dalam program ini pembinaan itu dilakukan melalui pemberian bantuan permodalan. Hal ini dimungkinkan karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ada kewajiban BUMN untuk menyisihkan 5% dari keuntungannya untuk pembinaan pengusaha kecil. Dalam implementasi bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut merujuk pada Kepmeneg BUMN no 236. di mana 3% didistribusikan untuk *revolving fund* dan 2% lagi diberikan untuk dana hibah yang tidak kembali. Dengan kata lain, selain berbentuk bantuan permodalan kepada pengusaha kecil sebanyak 3% dari sisihan 5% keuntungan PT BTDC, ada juga 2% sisanya yang diberikan berupa hibah seperti untuk kebutuhan ibadah, pendidikan, pembinaan kebudayaan, pembelian alat gamelan, bantuan pendirian mesjid, dan sebagainya. Selain itu ada juga pemberian bantuan yang sifatnya *charity* seperti bantuan dana untuk berbagai perayaan yang diselenggarakan masyarakat. Selama ini dana 5% yang disisihkan untuk pemberdayaan tersebut cukup besar jumlahnya, yakni sekitar 4 sampai 5 Milyar rupiah dan semuanya sudah didistribusikan dan atau beredar di masyarakat.

Dilihat dari pergulirannya, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan BTDC, dari seluruh usaha kecil yang diberi bantuan permodalan berupa *revolving fund*, laporan terakhir menunjukkan bahwa 20% nya masuk dalam kategori ragu-ragu, sementara yang 80%

perguliran dananya dikategorikan lancar. Relatif besarnya jumlah usaha kecil yang tingkat pengembalian atau perguliran dananya lancar mungkin, antara lain, disebabkan oleh strategi pemberian pinjaman yang dipersyaratkan oleh BTDC yang agak sedikit bertentangan dengan UU dan peraturan. Peraturan perundangan yang ada tidak mempersyaratkan harus ada agunan bagi mereka yang mendapatkan bantuan permodalan, karena penyisihan 5% dari keuntungan BUMN tersebut dialokasikan untuk bantuan pembinaan dan atau bina lingkungan. Namun dalam hal ini PT BTDC meminta para pengusaha kecil yang ingin mendapatkan bantuan permodalan untuk menyampaikan agunan, walaupun hal ini menurut undang-undang dan peraturan pemerintah tidak dibenarkan. Persyaratan ini diberlakukan karena pengalaman menuntut diperlukannya pengaturan seperti itu, mengingat sekarang ini banyak masyarakat yang nakal tidak mengembalikan atau menggulirkan pinjamannya. Meskipun demikian, penerapan sistem agunan tersebut tidak diberlakukan terlalu ketat sebagaimana di bank, karena masyarakat juga mengharapkan PT BTDC tidak kaku seperti proses kredit di bank. Oleh karena itu, ketika misalnya, PT BTDC memberikan bantuan 20 juta rupiah, maka apa pun yang dimiliki yang bersangkutan seperti sertifikat, motor atau lainnya, dapat dijadikan agunan untuk ditahan dulu sementara di PT BTDC. Agunan tersebut akan dikembalikan setelah mereka melunasi ataupun menggulirkan pinjamannya. Dengan model bantuan seperti ini realitanya para pengusaha kecil yang menjadi binaan PT BTDC melakukannya dengan senang hati, tanpa harus dipaksa oleh PT BTDC.

Kondisinya sekarang, setelah ada perubahan drastis dalam memberikan bantuan permodalan dengan sistem agunan, yang mulai diberlakukan 5-6 tahun terakhir, ternyata pergulirannya berjalan lebih lancar karena ada sesuatu yang dipegang/ditahan di PT BTDC. Padahal sebelum itu diimplementasikan, tingkat kegagalan usaha atau gagal bayarnya lebih tinggi dari 20%. Oleh karena itu, sampai sekarang sistem bantuan dengan agunan itu masih berlangsung dan masyarakat pun bersedia mendapat bantuan modal dengan sistem tersebut. Dengan sistem ini pembayarannya pun berjalan lancar, bahkan sekarang PT

BTDC kewalahan menerima permintaan bantuan kredit permodalan dari masyarakat karena banyaknya pelamar, sementara dana yang tersedia terbatas sekali.

Sesuai dengan konsep awal pemerintah, konsep pemberdayaan yang dikembangkan oleh PT BTDC diarahkan untuk membina usaha kecil yang non *bankable*. Oleh karena itu, PT BTDC menekankan kepada para petugasnya agar mencoba menciptakan/menumbuhkan wiraswasta-wiraswasta yang baru. Kemudian memberikan pendidikan kepada mereka, memberi bantuan modal, melakukan pembinaan pasar, membantu mempromosikan produk mereka, mengajak mereka pameran. Dengan cara ini maka usaha kecil binaan tersebut diarahkan agar menjadi *bankable*. Sebagai contoh, dalam melakukan pembinaan secara tehnikal, PT BTDC mengundang para pakar bidang LPD, karena di Bali banyak LPD koperasi. Dalam bidang manajerial mereka diajarkan bagaimana cara membuat laporan yang benar. Dalam bidang marketing mereka diajak promosi, bahkan beberapa usaha binaan diajak berpartisipasi dalam pameran ke Jakarta, khususnya mereka yang dianggap layak untuk pasar tersebut. Mereka juga diperkenalkan kepada supplier-supplier besar.

Sejauh ini ada beberapa UKM yang dibina dari awal sekarang sudah bisa mandiri. Ada juga usaha yang cukup besar itu seperti garmen pakaian, pengrajin perak, dan beberapa di antaranya sering diajak pameran ke Jakarta, yakni mereka yang dianggap mampu dan layak go nasional. Oleh karena itu, di antara usaha binaan tersebut banyak yang sudah menjadi besar dan *bankable*.

Dalam memberikan bantuan tersebut PT BTDC memiliki skala prioritas dalam penentuan lokasinya, yakni daerah Badung Selatan di mana PT BTDC berlokasi, Denpasar, Singaraja, Gianyar, dan daerah Pecatu di mana ada pengrajin perak yang dibina dan sering diajak pameran. Frekuensi bantuan yang diberikan PT BTDC bervariasi, ada yang dibina dan dibantu dua kali, ada yang tiga kali, karena pemberian bantuan tersebut ada batas waktunya. Misalnya tahap pertama usaha yang dibina sejumlah tertentu, kemudian, bila PT BTDC menganggap

usaha yang bersangkutan berlangsung layak dan bagus, maka BTDC akan mengucurkan lagi bantuannya.

Dalam upaya memberdayakan usaha kecil menengah tersebut PT BTDC berupaya untuk menjembatani agar terjadi kerja sama antara hotel dengan mereka yang dibina. Di sini PT BTDC menghimbau agar pihak manajemen hotel mau menyediakan tempat secara gratis kepada para pengrajin binaan supaya mereka bisa *display* hasil kerajinan dan produk lain yang diproduksinya. Biasanya setiap akhir tahun PT BTDC melakukan kerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) masing-masing daerah untuk *mensupport* mereka.

Paparan di atas memperlihatkan bahwa PT BTDC sebagai pengelola kawasan Nusa Dua Resort memiliki perhatian (*concern*) terhadap *community empowerment* sejak awal pendiriannya. Kepedulian tersebut kemungkinan besar didorong oleh UNDP sebagai penggagas pengembangan kawasan pariwisata Nusa Dua yang mengacu pada hasil studi yang merekomendasikan *master plan* pariwisata Bali yang diarahkan pada pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya, masyarakat, dan lingkungan. Hal ini juga diperkuat oleh posisi PT BTDC sebagai BUMN yang tentunya harus menjalankan misi pemberdayaan yang diamanatkan baik oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah. Oleh karena itu, manajemen PT BTDC telah memiliki komitmen, perencanaan dan melaksanakan *community empowerment* yang bervariasi sejak awal pendiriannya sampai dengan sekarang.

Deskripsi mengenai *community empowerment* dari PT BTDC di atas juga memperlihatkan bahwa *community empowerment* dari sektor akomodasi sangat mungkin dilakukan secara efektif dengan pola mensinergikan perusahaan BUMN dengan perusahaan swasta. Dalam hal ini PT BTDC sebagai BUMN melalui sistem manajemen pengelolaannya berhasil menggali dukungan pengusaha akomodasi swasta yang membangun dan menjalankan bisnis perhotelan di kawasan Nusa Dua untuk melakukan *community empowerment*. Se jauh ini,

meskipun hotel-hotel yang beroperasi di Nusa Dua merupakan milik swasta tapi PT BTDC tidak mengalami kesulitan/kendala dalam melakukan kerja sama dengan mereka untuk melakukan *community empowerment*. Selain karena sistem manajemen PT BTDC, mungkin kerja sama tersebut dapat berjalan relatif baik karena mereka merupakan hotel Bintang 5. Umumnya hotel-hotel di Nusa Dua ini sudah mencapai *level gold* atau *platinum* dan dijalankan oleh jaringan operator internasional. Sebagai perusahaan kelas dunia, sudah menjadi *policy* perusahaan bahwa di mana pun mereka bergerak akan melakukan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan tersebut sudah termasuk dalam konsep *management* mereka sehingga manajemen mereka sangat menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan. Mereka meyakini pentingnya *green tourism* karena pangsa pasar hotel Bintang 5 adalah kelas menengah ke atas yang umumnya terdiri dari orang-orang yang lebih teredukasi yang mencari industri pariwisata yang ramah lingkungan. Dengan demikian, dari aspek CSRNya mereka cukup bagus.

Selain itu, relatif responsifnya hotel di Nusa Dua terhadap himbauan kerja sama tersebut mungkin juga karena di Bali ada sistem penghargaan *Tri Hita Karana Award*. Yayasan itu meninjau seluruh hotel di Bali, artinya baik hotel non bintang maupun non-bintang tetap dipersyaratkan memperhatikan *Tri Hita Karana* tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya *tri hita karana* tersebut pengelolaan lingkungan untuk hotel bintang 5 dan bahkan di bawah bintang 5 pun cukup bagus.

Sekarang di Nusa Dua terdapat 20 hotel bintang besar dan kecil. Persisnya 12 hotel bintang besar dan 8 hotel bintang kecil yang berbentuk *appartement* atau *condovila*, *luxury hotel*, *boutique hotel* (amanusa) yaitu hotel kecil tapi harganya mahal. Hotel besar bintang 5 tersebut ada 12 buah karena kawasan awal PT BTDC hanya menyediakan 12 kapling. Ke 12 hotel besar yang ada di Nusa Dua ini semuanya ikut *Tri Hita Karana award*, sementara yang lainnya masih dalam proses *assesment*. Keikutsertaan dalam *award* tersebut mengindikasikan bahwa mereka sangat peduli terhadap lingkungan di sini. Kepedulian terhadap lingkungan ini juga terjadi karena konsep Nusa

Dua resort yang ditekankan PT BTDC adalah *the gardener* Bali dan *environment friendly* (ramah lingkungan). Penekanan kesadaran akan lingkungan dari PT BTDC ini dapat dikatakan berhasil yang ditandai oleh penghargaan internasional di mana Nusa Dua mendapat penghargaan *green blue* pertama yang mensyaratkan bahwa industri pariwisata harus ramah lingkungan. Penghargaan ini diberikan di Rio De Janeiro oleh PBB. Tim penilai dari PBB tersebut menilai bahwa pengelolaan lingkungan resort Nusa Dua sebagaimana dipersyaratkan oleh PT BTDC memenuhi kriteria mereka.

5.3 Community Empowerment Dari PHRI

PHRI Bali terdiri dari 8 Badan Pengurus Cabang (BPC), seperti BPC Denpasar, Badung, Gianyar dan sebagainya. Semua BPC bersentuhan langsung dengan hotel di daerah tingkat dua masing-masing. Terkait dengan tugasnya, di dalam UU No. 10 tahun 2009 yang berlaku sekarang ini ada ketentuan bahwa hotel atau pengusaha harus bersertifikat, dalam hal ini adalah klasifikasi yang dilakukan melalui asosiasi. Oleh karena itu, salah satu tugas PHRI adalah memberikan klasifikasi. Meskipun demikian dalam proses klasifikasi hotel itu bukan ditentukan oleh PHRI, melainkan pihak hotel yang mengajukan permohonan kepada PHRI untuk diberikan klasifikasi sesuai dengan kekuatan ataupun potensi yang dimiliki hotel yang bersangkutan. Sebagai contoh, bila suatu hotel mengajukan klasifikasi hotel Bintang 4 atau Bintang 5. Kemudian terhadap permohonan tersebut PHRI memberikan penilaian sesuai tidaknya kualitas yang dimiliki hotel tersebut dengan klasifikasi yang dia mohonkan. Kalau tidak sesuai maka PHRI memberikan catatan-catatan dan rentang waktu untuk perbaikannya. Misalnya, kalau kekurangan itu tidak menyentuh fisik, maka diberi waktu 6 bulan agar dia bisa memperbaikinya. Tetapi bila kekurangan tersebut menyangkut fisik hotelnya juga, misalnya seperti persyaratan sekarang yang mengharuskan adanya CCTV, maka diberi jangka setahun agar dia bisa memenuhi persyaratan untuk mencapai klasifikasi itu.

Proses klasifikasi ini dilakukan berkesinambungan. Artinya, jika suatu hotel, misalnya, sudah mendapatkan klasifikasi hotel Bintang 5, maka setiap tiga tahun hotel yang bersangkutan harus melakukan re-klasifikasi. Jadi tidak berarti bahwa bila suatu hotel mendapatkan klasifikasi sekali, misalkan, hotel Bintang 5, terus berlaku sampai seumur hidup, melainkan harus diperbaharui setiap tiga tahun.

Dalam hal *community empowerment*, salah satu yang diupayakan PHRI adalah pada saat melakukan klasifikasi hotel. Artinya, pada saat PHRI akan melakukan klasifikasi ataupun re-klasifikasi, salah satu persyaratan yang dibuat PHRI adalah tentang CSR. Jadi PHRI menilai apa yang sudah dilakukan hotel tersebut terkait dengan kegiatan CSRnya. Penilaian PHRI pada saat melakukan klasifikasi ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mengatur bahwa kalau hotel memiliki kapasitas kamar 100 – 150 buah atau lebih langsung diklasifikasi sebagai bintang 5. Ketentuannya sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri no 3 tahun 2002, sertifikasi diberikan atas dasar 30% dinilai dari fisik hotel, lingkungan, dan fasilitasnya. Kemudian 20% dinilai dari manajemennya di mana salah satu komponennya adalah CSR. Sehingga kalau misalnya ada manajemen yang masih keliru atau belum menjalankan CSR maka akan diberi arahan karena PHRI juga bertugas melakukan pembinaan. Kemudian 50% lagi yang dinilai adalah servicesnya. Jadi *service* yang dia berikan kepada tamu harus sesuai dengan kelas yang diharapkan.

Terkait penilaian CSR tersebut, dalam UU yang baru no 10 tahun 2009, karyawan hotel diharuskan memiliki sertifikat dan memiliki kualifikasi yang tepat untuk pekerjaannya. Oleh karena itu, bila manajemen hotel sudah memberikan pembinaan dan kesempatan kepada karyawannya untuk mendapatkan sertifikat, maka PHRI akan memberikan penilaian bahwa dalam manajemen hotel tersebut sudah ada komponen CSRnya yang termasuk dalam komponen manajemen yang 20 persen, sehingga dia berhak memperoleh *grade hotel* yang dimohonkannya. Dengan kata lain, meskipun persentase yang 30% dan 50% sudah terpenuhi, tetapi yang 20% belum ada CSRnya maka PHRI tidak akan memberikan gradenya. Sebagai contoh, ketika dari tanggal 7

sampai 15 maret 2011 PHRI melakukan klasifikasi, ada salah satu hotel di daerah Gianyar yang sama sekali belum memenuhi persyaratan CSR, maka PHRI tidak memberikan sertifikatnya.

Dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat dari sektor akomodasi, selama ini PHRI juga menghimbau beberapa hotel dan restoran yang belum bergabung dengan PHRI untuk segera bergabung. Himbauan ini dilakukan karena asosiasi tidak dapat melakukan pemaksaan. Kalaupun ada yang sifatnya mendorong atau mengharuskan, itupun dilakukan sepanjang ada ketentuan yang dikeluarkan pemerintah, bukan dari asosiasi, sehingga mau tidak mau harus ditaati. Tetapi dengan adanya ketentuan bahwa mereka harus diklasifikasi oleh asosiasi ini, maka mereka secara otomatis akan menjadi anggota PHRI. Apalagi untuk hotel Bintang 3 ke atas sampai Bintang 5, terutama Bintang 5 karena kebanyakan juga PMA, investornya tidak mau juga kalau tidak terklasifikasi. Mereka berkepentingan untuk masuk menjadi anggota PHRI karena agennya yang diajak kerja sama di luar negeri pasti akan minta klasifikasi hotelnya. Oleh karena itu, dari sebelum dikeluarkannya peraturan tersebut mereka sudah memiliki kesadaran sendiri untuk meminta klasifikasi dan bergabung dengan PHRI.

Yang masih menjadi kendala ke depannya adalah terkait hotel melati dan hotel yang masih Bintang 1 dan 2. Hingga saat ini masih banyak dari mereka yang mempertanyakan keuntungannya dari sertifikasi, karena merasa bahwa tanpa itu pun tamunya tetap saja datang. PHRI masih menunggu kesadaran mereka sendiri untuk mengajukan sertifikasi. Padahal sudah disosialisasikan bahwa ada ketentuan yang sekarang berlaku yakni UU No 10 tahun 2009 yang mengatur bahwa hotel atau pengusaha akomodasi harus bersertifikat, yang dalam hal ini melalui klasifikasi yang dilakukan sendiri oleh asosiasi. Bahkan dalam melakukan pembinaannya, PHRI sudah menyampaikan bahwa bila mereka tidak melakukan klasifikasi maka ada sanksi hukumnya.

Dari deskripsi di atas diketahui bahwa PHRI sendiri tidak secara langsung melakukan *community empowerment*. Dia lebih mengambil posisi sebagai aktor pendorong agar hotel yang bergabung di dalamnya

melakukan CSR, ketika memberikan sertifikasi hotel. Hal ini bisa dipahami karena PHRI hanya merupakan sebuah asosiasi dari para pemilik hotel. Tindakan ini juga perlu diapresiasi karena PHRI mampu menangkap dan menggunakan peluang yang ada dalam sistem penilaian dan proses sertifikasi/klasifikasi hotel untuk mendorong hotel yang bersangkutan melakukan CSR. Namun sebenarnya PHRI perlu melangkah lebih jauh dari hanya sekedar motivator menjadi perancang atau pelaksana *community empowerment*. PHRI perlu memiliki variasi model pemberdayaan masyarakat yang dapat ditawarkan kepada hotel yang sedang melakukan proses sertifikasi. Artinya CSR yang dilakukan oleh hotel tersebut diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, karena CSR hotel bisa juga hanya dilaksanakan dengan pola charity. Bahkan bila suatu program *community empowerment* membutuhkan biaya yang relatif besar, dengan posisi yang dimilikinya PHRI bisa saja menggalang hotel-hotel yang ada di dalamnya untuk menggabungkan program CSRnya sehingga memungkinkan terlaksananya program *community empowerment* yang ditawarkan oleh PHRI, tentunya atas nama hotel-hotel tersebut.

Alternatif lainnya, PHRI bisa juga merancang dan melaksanakan sendiri program *community empowerment*. Hal ini sangat mungkin dilakukan karena PHRI merupakan asosiasi para pemilik hotel yang, diduga, memiliki kekuatan finansial. Hanya saja PHRI harus mampu mendorong para pemilik hotel tersebut agar tertarik melakukan *community empowerment*. Bahkan program tersebut mungkin tidak perlu melibatkan seluruh anggota, bisa saja hanya anggota tertentu yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat. Kalau perlu dalam implementasi programnya PHRI bisa menarik/melibatkan atau membayar expert atau tenaga ahli yang memiliki kemampuan, komitmen dan pengalaman dalam memberdayakan masyarakat.

Keterlibatan langsung dalam *community empowerment* tersebut sangat mungkin untuk dilakukan PHRI mengingat di asosiasi PHRI sendiri ada beberapa asosiasi dibawahnya seperti Bali Vila Association yang membawahi vila-vila, kemudian ada patner dari Bali Hotel Asociation, Chip Engenering Association, Housekeeping Association,

Chef Association, dan sebagainya. Mereka bisa diajak kerja sama karena selama ini di masing-masing asosiasi tersebut membuat program CSR, selain dengan hotelnya. Misalnya housekeeping Association, para housekeeper dari seluruh housekeeping yang ada menghimpun diri dalam Housekeeping Association dan kemudian membentuk program CSR sendiri.

5.4 Community Empowerment Bali Hotel Association (BHA)

5.4.1 Manajemen Organisasi Bali Hotel Association (BHA)

Di sektor akomodasi, salah satu yang menonjol berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat dan telah merealisasikannya secara konsisten adalah BHA. *Bali Hotel Association* (BHA) adalah asosiasi dari para general manager hotel berbintang yang ada di Bali. Jumlah anggota BHA lebih dari 100 general managers yang secara keseluruhan mengelola lebih dari 15.000 kamar hotel dan membawahi hampir 30.000 karyawan dalam sektor pariwisata. *Stakeholders* dari BHA meliputi semua pihak yang bergerak di bidang kepariwisataan, seperti PHRI yang terdiri dari para pemilik hotel dan restoran, para pemilik *Travel Agent*, pemilik perusahaan transport termasuk di dalamnya perusahaan bus, limousine, taksi buat turis yang tergabung dalam asosiasi Pawiba (Persatuan Angkutan Wisata Bali), Perhimpunan guide/asosiasi pramuwisata, Sipco (*Society of Indonesian Professionals Conference Organizer*), PUTRI (Asosiasi dari Pengelola Obyek Wisata), Gahawisri yaitu Asosiasi dari Para pengelola atau pemilik olah raga air (*water sport*), *rafting*, *ski*, *diving*, PATA (*Pasific Asia Travel Association*), Bali Charter, Bali Village (persatuan dari para promotor hotel, restoran, *travel agent* yang melakukan atau ikut dalam berbagai *trade show*).

Secara organisasional BHA mirip dengan PHRI, yang membedakan adalah kalau PHRI merupakan persatuan dari para *owner* (pemilik) badan usaha hotel dan restoran, sedangkan BHA adalah perkumpulan dari para operator badan usaha tersebut. Jadi yang satu merupakan Asosiasi owner (PHRI), yang satu lagi Asosiasi professional

pengelola hotel dan resort berbintang (BHA). Lingkup kerja keduanya juga berbeda misalnya untuk kegiatan yang berurusan dengan perpajakan, atau kebijakan pemerintah maka biasanya ditangani oleh para *owner*, tetapi untuk pekerjaan seperti memetakan karyawan, sertifikasi, pemasaran, dan sebagainya adalah tugas profesional pengelola (BHA). Oleh karena itu, PHRI dan BHA selalu berjalan bersama.

Visi dari Bali Hotel Asosiation adalah menjaga Bali sebagai daerah tujuan wisata yang paling diinginkan di Asia melalui kehangatan dan keramahan masyarakatnya. Oleh karena itu, BHA berupaya menjalankan misi mempersatukan dan mengajak seluruh general manager hotel berbintang, villa untuk membangun lingkungan yang tidak kompetitif satu sama lain, dan bertukar informasi mengenai interest bersama, memiliki satu suara dalam isu yang terkait dengan industri pariwisata dan keramahtamahan untuk mendukung Bali sebagai sebuah DTW.

Untuk merealisasikan visi tersebut, BHA mengambil banyak inisiatif untuk membuat Bali menjadi *best destination in Asia*. Misalnya BHA mengumpulkan uang untuk melakukan kegiatan bersama seperti *security*, pemasaran, atau *mengcounter* informasi negatif tentang Bali, dan sebagainya. Hal semacam itu dilakukan karena bila itu berhasil, akan memberikan *feedback* berupa meningkatnya *occupancy rate* dari hotel yang dikelola oleh anggota BHA.

5.4.2 Kebijakan Program *Community Empowerment* Bali Hotel Association (BHA)

Salah satu program BHA yang menarik dalam konteks *community empowerment* adalah *community relation* BHA yang bertujuan membantu masyarakat dan memfasilitasi pengembangan masyarakat, pendidikan dan lingkungan di Bali. Dalam hal ini BHA terinspirasi oleh pola hidup gotong royong yang biasa diimplementasikan oleh masyarakat Bali dalam mendukung kehidupan komunitasnya. BHA melihat bahwa pola gotong royong tersebut sangat relevan dalam menghadapi perkembangan kehidupan yang sekarang tengah dihadapi

masyarakat. Dalam kerangka itu BHA mengajak para anggotanya untuk membantu masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di masyarakat melalui pariwisata. Untuk mencapai hal itu ada berbagai macam cara. BHA mengembangkan banyak program untuk memberdayakan masyarakat dengan cara memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kehidupannya baik secara individual maupun kelompok atau komunitas. BHA meluncurkan beberapa program temporer terkait dengan persoalan Bali dalam jangka pendek dan jangka panjang. Implementasi program-program tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga sosial lain.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang lebih berwawasan jangka panjang BHA berinisiatif melakukan *community based tourism* atau pariwisata berbasis masyarakat atau komunitas melalui pengembangan *homestay* yang telah dimulai sejak tahun 2004. Basis pemikiran dari CEO BHA adalah bila anggota BHA *memanage* hotel, maka di situ ada penginapan, ada makan minum, dan ada aktifitas lainnya. Namun hal itu hanya dilakukan satu di satu tembok. Agar masyarakat dapat turut menikmati dan berkembang, maka tembok tersebut perlu dirubuhkan kemudian diperbesar jangkauannya sampai ke masyarakat.

Dalam mengembangkan *community based tourism* ini BHA mencoba menyukseskan atraksi kepada para wisatawan berupa kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini tentunya berbeda dengan *mass tourism* di mana para wisatawan membayar, kemudian duduk menonton atraksi, lalu pulang lagi. Sementara di sini BHA mencoba mendorong masyarakat agar terlibat dalam kepariwisataan dengan tetap menjalankan kehidupan mereka sebagaimana biasanya. BHA selalu menekankan kepada mereka agar jangan sampai merubah profesinya. Jadi kalau dia petani maka kerjakan dulu pekerjaannya sebagai petani. Setelah selesai bertani, untuk *additional incomenya* dia menjadi penabuh gendang, penari, berinteraksi dengan turis sehingga meskipun BHA mengembangkan pariwisata tetapi tetap memperhatikan aspek konservasi.

Konservasi tersebut penting diperhatikan karena jangan sampai terjadi seperti di daerah Kuta di mana semua orang sudah tidak mau lagi menjadi petani. Mereka maunya menjadi *guide*, supir taksi, dan sejenisnya, sehingga orang tidak bisa lagi melihat kehidupan pertanian. Padahal yang paling prinsip di dalam pengembangan Desa Wisata adalah harus ada kemauan dari masyarakat tanpa harus mengorbankan kehidupan mereka yang eksisting.

Dalam konteks *community empowerment* yang dilakukan oleh sektor akomodasi, tidak banyak pengusaha akomodasi di Bali yang melakukannya. Program yang banyak dilakukan oleh sektor akomodasi adalah *charity*. Kalau pun ada masih sebatas peningkatan kapasitas seperti menyelenggarakan training. BHA pun termasuk baru dalam melakukan *community empowerment* melalui pengembangan *homestay* ini. Meskipun demikian, dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat desa dari pengusaha akomodasi, sekarang ini direktur BHA memotivasi para investor yang mau membuka hotel, agar menginvestasikannya di desa. Dia memberi pandangan bahwa untuk membangun hotel membutuhkan biaya membuat infrastruktur yang mahal, sementara kalau di desa tempatnya sudah tersedia, air sudah ada, listriknya tinggal menambah, sehingga dengan mengeluarkan dana 30 juta bisa kembali dalam jangka waktu lima bulan. Investasinya pun relatif aman, tidak akan dibawa lari karena disaksikan rame-rame dan dibuat di depan notaris. Yang dibutuhkan hanya harus mempunyai kepercayaan saja. Kedua, direktur BHA tidak membiarkan orang luar mudah masuk ke desa, kalau itu usaha tersebut bisa dikelola sendiri oleh desa.

BHA juga mengharapkan ada bantuan program CSR dari BUMN dan perusahaan yang bergerak di luar sektor akomodasi. Masalahnya kalau mengharapkan bantuan CSR dari usaha yang bergerak di bidang akomodasi sulit untuk mendapatkan *support* karena ada perasaan takut dari para *owner* akomodasi bahwa kalau dia *mensupport* pengembangan akomodasi-akomodasi kecil/*homestay* tersebut akan menjadi pesaing bagi bisnis mereka, sehingga ada *conflicts of interest* di situ. Bahkan program *community empowerment* yang sudah diluncurkan

BHA ini juga sempat menghadapi tantangan ketika meminta support BHA. Oleh karena itu, dari pengalaman yang sudah berjalan direktur BHA menduga barangkali akan lebih mudah meminta CSR dari perusahaan yang berada di luar sektor akomodasi karena tidak ada *conflict of interest*.

5.4.3 Program, Proses, dan Respons Masyarakat Terhadap *Community Empowerment* yang Dilakukan BHA (Contoh Kasus Desa Bedulu)

Dalam melakukan *community Empowerment* BHA mengimplementasikannya, antara lain, di desa Bedulu, kabupaten Gianyar. Desa ini terletak dekat goa gajah di desa Bedulu, sehingga wisatawan yang datang bisa sekaligus mengunjungi goa gajah. Program pemberdayaan komunitas dilakukan dengan mengembangkan Desa Wisata melalui pembangunan *homestay* dan *guest house*. Program *community empowerment* ini sekarang sudah bergulir dan memberi pendapatan hasil yang lumayan kepada masyarakat lokal.

Pengembangannya berawal dengan 10 kamar yang tersebar di 5 rumah. Dalam jangka satu tahun sampai satu setengah tahun sekarang jumlahnya sudah berkembang menjadi 20 kamar yang tersebar di sekitar 11 rumah. Rata-rata room ratenya 400 ribu per malam. Memang tidak setiap hari terisi tamu, karena saat ini yang mensupport pemberdayaan ini hanya satu travel agent *community empowerment* melalui pengembangan *homestay* dan *guest house* ini sifatnya masih *trial*, dalam artian untuk atraksinya. Sekarang ini masih diobservasi apakah itu disukai oleh wisatawan atau tidak; kemudian apakah setiap obyek yang dikunjungi sudah cukup nyaman atau belum untuk wisatawan. Dari travel agent juga masih diharapkan memberikan *feedback* untuk melakukan *improvement*. Rencananya, BHA akan melakukan *upgrade* untuk fasilitas kamar yang di Bedulu, karena saat ini kamarnya itu tidak dilengkapi dengan AC dan tidak ada air panas. Jadi kalau tamu mau mandi air hangat masih dilayani secara manual dengan cara masak air panas yang kemudian dituang ke ember oleh pemilik rumah, sehingga tentunya kurang nyaman untuk wisatawan.

Bila dilihat dari proses pengembangannya, *community empowerment* di desa Bedulu ini diawali oleh permintaan yang diajukan masyarakat desa Bedulu. Dalam kaitan ini direktur BHA pernah diundang oleh kepala desa adat Bedulu yang datang bersama orang desa, yang dulu pernah direkrut ketika mengembangkan Hotel Four Season, untuk membuat desanya menjadi Desa Wisata. Mereka mengundang direktur BHA tersebut karena orang yang pernah direkrut itu tahu bahwa pengembangan di Hotel Four Season konteksnya desa. Lokasinya mengambil tempat di bukit yang kemudian dibuat vila-vila yang dilengkapi dengan kolam renang, kamar tamunya sendiri, kamaruduknya sendiri, dan di setiap kamar dilengkapi dengan tempat pelampiran/ persembahyangnya. Karena melihat BHA menerapkan konsep tersebut maka mendorong orang desa itu untuk mengembangkan desanya menjadi Desa Wisata. Jadi secara implisit sebenarnya direktur BHA tersebut telah berhasil memberdayakan orang yang dibinanya sehingga dia berkeinginan menularkan konsep tersebut untuk memberdayakan komunitas desanya.

Atas ajakan tersebut direktur BHA pun menyetujui dengan syarat bahwa keinginan mengembangkan Desa Wisata tersebut memang betul menjadi kehendak komunitas desa. Kalau keinginan tersebut hanya merupakan kehendak dari tokoh masyarakatnya saja maka direktur BHA mau mempertimbangkannya dulu. Hal ini menjadi acuan karena pada prinsipnya direktur BHA tidak pernah mau memfasilitasi pemberdayaan kalau bukan merupakan keinginan masyarakat. Dia juga tidak akan memfasilitasi bila keinginannya hanya datang dari pimpinannya saja, karena bisa saja disalahgunakan, misalnya, hanya agar dia terpilih menjadi kepala desa. Menanggapi persyaratan tersebut, kemudian orang desa yang mengundangnya menyatakan bahwa pengembangan Desa Wisata itu memang betul merupakan keinginan dari komunitas desa. Hal ini akhirnya juga terbukti ketika direktur BHA tersebut datang ke desa yang bersangkutan, ternyata orang desa sudah siap untuk mengikuti rapat pertemuan.

Dilihat dari respons masyarakatnya, terhadap pemberdayaan dengan pola pengembangan Desa Wisata atau pembangunan *homestay*,

tampak sangat antusias dan mendukung karena sebelum mereka menyetujui pengembangan desa tersebut, sudah mereka bicarakan dulu di Banjar mereka. Dengan demikian, pengembangan *homestay* ini dapat dikatakan di setujui oleh seluruh masyarakat desa. Mereka pun tidak merasa terganggu dengan kehadiran *tourism*.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat diberikan dengan contoh sebagai berikut. Ketika memutuskan desa Bedulu akan dikembangkan menjadi Desa Wisata, masyarakat lokal terlibat langsung dalam pengambilan keputusan tersebut. Sebelum semuanya *deal* gagasan programnya pengembangan desa tersebut disampaikan dan didiskusikan dulu di banjar desa itu, mulai dari persyaratan dan renovasi rumahnya sampai pada *profit sharing*, dan sebagainya.

Dalam rapat pertemuan tersebut Direktur BHA menyampaikan bahwa tidak mudah untuk membuat suatu desa menjadi Desa Wisata. Untuk merealisasikannya tidak bisa dilakukan satu - dua hari, tetapi perlu kerja keras, pengorbanan dan lain sebagainya. Dia memberi arahan bahwa pada prinsipnya untuk menjadi Desa Wisata paling tidak ada dua yang dipenuhi yaitu adanya akomodasi dan adanya atraksi wisatanya yang menarik untuk wisatawan. Jadi semua desa itu seyogyanya mempunyai kedua itu, karena kedua itu yang menjadi andalan agar orang mau datang berwisata di sebuah desa.

Akomodasi diperlukan agar *multiplier effect* terhadap masyarakat lebih besar. Sebagai contoh bila wisatawan menginap di hotel mewah di Nusa Dua kemudian mereka pergi wisata ke desa. Mereka akan menikmati obyek wisata tersebut, seperti dengan melihat pemandangan, mengambil foto, dan lain sebagainya. Sementara sebelumnya, ketika mereka akan berangkat menuju desa, mungkin mereka mampir dulu membeli makanan atau jajanan di tempat lain untuk dimakan di desa. Mungkin setelah dua jam berada di desa, mereka pulang lagi karena hanya datang untuk *travelling* saja, dan tidak menginap. Dalam bentuk perjalanan wisata semacam ini, masyarakat di desa dapat dikatakan hampir tidak mendapat apa-apa selain tong

sampahnya yang bertambah penuh karena para wisatawan membuang sampah makanan yang dibawanya dari tempat lain. Mungkin saja orang desa sedikit mengambil keuntungan dari penjualan souvenir, namun nilai ekonomi souvenir tersebut tidak seberapa. Tetapi kalau wisatawan bisa menginap juga di desa itu, maka pemilik rumah akan mendapat bagian keuntungan, kaum ibu mendapat penghasilan dari penyediaan *breakfast* para wisatawan, anggota masyarakat lain ada yang bisa menjadi guide, dan sebagainya, sehingga *multiplier effect*nya lebih besar.

Unsur kedua yang harus dimiliki masyarakat desa adalah atraksi wisata. Dalam hal ini ada dua jenis atraksi yakni atraksi yang diberikan Tuhan/Allah yang bersifat natural dan atraksi yang dibuat manusia yaitu budaya. Untuk menciptakan atraksi ini perlu dilakukan inventarisasi terhadap potensi atraksi yang ada di desa seperti budidaya rumput laut, mutiara, dan lain sebagainya yang merupakan buatan manusia. Selain itu inventarisasi atraksi alam seperti bukit, danau, sungai untuk disinggahi wisatawan atau mandi/berenang kemudian dia pergi lagi.

Selain perlunya melakukan inventarisasi rumah-rumah di desa yang memungkinkan untuk disinggahi wisatawan, atau untuk dia menginap dan inventarisasi atraksi yang ada di desa, dalam kesempatan pertemuan tersebut direktur BHA juga minta untuk mencari lima orang dari kelompok sadar wisata yang mau menjadi *leader*, mau menjadi *inisiator* yang akan menjadi tangan kanan Direktur BHA, karena dia menetap di Denpasar. Mereka bertugas untuk menyampaikan laporan tentang perkembangan yang terjadi di desa.

Selanjutnya, pada kesempatan lainnya, direktur BHA diundang lagi ke desa yang bersangkutan karena masyarakat menyatakan sudah siap. Dia pun kemudian datang lagi ke desa tersebut, tetapi tidak sendirian melainkan membawa teman-teman mitra usahanya, antara lain, satu dari *travel agent* dan satu lagi seorang *scientist* dari sekolah tinggi perhotelan yang dianggap bisa membuat semacam observasi dan atau survey. Dalam hal ini *travel agent* tersebut diharapkan memberikan pendapat dan partisipasinya tentang layak atau tidaknya kampung/desa yang bersangkutan untuk dipasarkan sebagai Desa Wisata. Bila

pendapatnya negatif maka desa tersebut tidak akan dikembangkan, sehingga direktur BHA tidak akan memberikan janji apa pun kepada orang desa. Sebaliknya bila menurut pendapatnya *feasible* maka penggarapannya akan dilanjutkan. Sementara terhadap cendekiawan yang dibawa sertanya diminta bantuannya, yaitu sebelum nanti mulai dilakukan pengembangan Desa Wisata terlebih dahulu dilakukan survey khusus untuk melihat kondisi desa itu sekarang, berapa jumlah KK yang tergolong miskin, termasuk apakah menurut dia potensial dikembangkan atau tidak, sehingga hasilnya surveynya relatif lengkap. Kemudian juga melakukan survey kembali untuk mengetahui perkembangan yang terjadi setelah satu tahun atau dua tahun setelah dikembangkan.

Selanjutnya, dalam kesempatan di desa tersebut mereka melihat atraksi yang sudah diinventarisasi masyarakat seperti trekking, jalan-jalan ke sawah, dan lain sebagainya yang bersifat alami. Kemudian atraksi culturenya yang ditunjukkan masyarakat seperti budidaya ikan mujair seperti di Kintamani, budidaya rumput laut di nusa penida dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga melihat rumah-rumah yang potensial untuk dijadikan tempat menginap para wisatawan. Ternyata berdasarkan pengamatan direktur BHA dan mitranya rumah-rumah tersebut kondisinya bagus-bagus. Oleh karena itu, kemudian direktur BHA pun memilih 15 rumah untuk dijadikan alternatif tempat menginap wisatawan. Rumah yang dipilih adalah yang kondisi fisiknya bagus tetapi tidak dekat kandang hewan peliharaan (babi) karena kandang babi bau. Pertimbangannya untuk menghindari komplain dari para tamu. Oleh karena itu, kalau rumahnya bagus tetapi tetangganya melihara babi, maka tidak dipilih. Namun ada juga rumah yang luarnya tidak bagus tetapi dijadikan pilihan, karena rumah tersebut memiliki pemandangan yang indah, misalnya, bisa melihat sungai. Untuk rumah seperti itu, sebelum wisatawan masuk, BHA terlebih dahulu akan merenovasi rumah tersebut. Ada hal yang menarik dalam proses ini, yakni bahwa bagi Direktur BHA yang penting dalam proses peninjauan dan pemilihan lokasi ini adalah adanya proses pembelajaran bagi masyarakat.

Dari 15 rumah yang diinventarisasi dan dikunjungi, akhirnya Direktur BHA memilih lima untuk dijadikan tempat menginap

wisatawan. Dari lima rumah tersebut kemudian dibagi 2 kelompok, yang satu dikelompokkan ke dalam *home stay*, dan satu lagi dikelompokkan sebagai *guest house*. Yang membedakan keduanya adalah, kalau penginapannya berupa *home stay*, maka yang punya rumah tinggal bersama dengan tamu. Sebagai contoh, bila dia memiliki 3 kamar tidur, kemudian satu kamar disewakan dan 2 kamar dia pakai sendiri. Atraksinya dari *homestay* adalah, ketika wisatawan bangun tidur, maka dia bisa melihat kegiatan yang sedang dilakukan ibu rumah tangga, atau anaknya bersiap ke sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian setiap malam dia bisa berinteraksi langsung dengan anggota keluarga tersebut.

Sedangkan penginapan kategori *guest house* merupakan satu rumah kosong yang khusus dijadikan tempat menginap wisatawan. Atau bisa juga dikategorikan sebagai losmen, atau villa. Jadi bagi wisatawan yang menginginkan privasi yang lebih besar, maka bisa masuk menginap di *guest house*. Terkait dengan kategori penginapan dan juga untuk mendukung perkembangan Desa Wisata ini, direktur BHA menerima titipan *guest house* milik orang Jepang dan Amerika yang ada di desa ini. Oleh karena itu, *guest house* yang ada di Desa Wisata ini harganya ada yang mencapai 4 juta rupiah/malam, karena disediakan fasilitas kolam renang. Jadi range harganya mulai dari 400 ribu rupiah sampai 4 juta rupiah. Namun demikian, dari setiap *guest house* yang disewa diharuskan membayar semacam “upeti” kepada orang desa, sehingga mereka turut menikmati keuntungan yang diperoleh dari sewa *guest house* tersebut.

Lebih lanjut, sesudah memilih rumah-rumah untuk penginapan tersebut, direktur BHA menanyakan lima orang yang diminta untuk menjadi calon *leader* untuk diinterview. Hasilnya, dari lima orang tersebut dipilih tiga orang utama. Mereka akan diposisikan seperti dalam perusahaan atau hotel, di mana harus ada direktur umum (GM hotel) yang mengurus produksi atau mengurus kalau ada tamu yang datang, manajer pemasaran yang menjual produk, dan satu lagi yang mengurus administrasi.

Untuk itu direkturnya dipilih orang desa yang bisa mencarikan tempat tinggal, mengatur makan wisatawan, dan mengatur kegiatan yang

akan dilakukan wisatawan di desa. Kemudian karena desa tersebut sudah mempunyai produk wisata, maka harus ada yang memasarkan. Untuk itu dipilih orang desa yang siap melayani bicara kalau ada travel agent datang ke desa ini, atau ketika bupati datang mau memberikan dukungan. Biasanya Direktur BHA mencoba mengkombinasikan antar laki-laki dan perempuan sehingga kalau bisa yang menangani pemasaran ini ibu-ibu agar lebih menarik. Kemudian, kalau produknya sudah bagus dan dipasarkan sehingga ada tamu yang menginap dan membayar, maka harus ada orang yang mengurus proses pembayaran dan mengelola keuangannya. Oleh karena dicari orang desa yang mengerti akuntansi, termasuk mengerti perpajakan dan distribusi pembayaran kepada semua aktor-aktor desa.

Setelah dipilih tiga orang, lalu diumumkan ke masyarakat. Ternyata semua setuju, sedangkan dua orang lagi diposisikan untuk mendukung tiga orang terpilih tersebut. Ketiga orang tersebut diminta untuk melaporkan kepada direktur BHA kalau ada sesuatu kepentingan, atau salah satu dari mereka akan dihubungi bila ada tamu wisatawan. Ketiga orang ini pula yang akan rapat di desa.

Namun bila didalami lebih jauh, sebetulnya yang memilih tiga orang desa tersebut adalah kepala desa. Dikatakan demikian karena di Bali itu ada kepala desa adat dan administrasi. Dalam hal ini dia yang harus memberi restu, dan ketika memilih orang tersebut direktur BHA juga menanyakan persetujuan kepala desa tersebut atau meminta kepala desa untuk merekomendasikan orang desa yang harus dipilih. Sementara direktur BHA bertanggung jawab memberikan ilmu kepada ketiga orang terpilih tersebut agar memiliki kemampuan seperti manager hotel.

Dalam pemikiran Direktur BHA, ketiga orang itu diharapkan akan mengkosepsikan kegiatan wisatawan agar menghasilkan *multiplier effect*, seperti telah dikemukakan terdahulu. Misalnya *mengcreate* agar ketika wisatawan datang ada orang yang mengelus-elus ayam aduan untuk atraksi wisata dan kemudian dia mendapat bagian pendapatan, atau ada orang yang disuruh memanjat pohon dan juga mendapat bagian pendapatan, dan sebagainya, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

Penataan wisata desa tersebut penting karena Direktur BHA ingin menghindari jangan sampai terjadi di Bali seperti di daerah lain, misalnya, ketika wisatawan datang ke Kalimantan kemudian mau bertemu dengan orang Dayak atau ke Papua mau melihat mumi, atau mau memotret gua, sebelum melakukan hal-hal tersebut mereka sudah terlebih dulu diminta uang. Untuk itu lebih baik melakukan sedikit rekayasa aktor (orang desa) untuk berakting di situ, kemudian setelah wisatawan mengambil foto dia diajak pergi lagi begitu saja. Tetapi ketika akhir bulan aktor/orang desa tersebut mendapat bagian uang dari desa.

Selanjutnya, direktur BHA memberikan *briefing* kepada masyarakat. Menurut direktur BHA, memang membina mereka menjadi tantangan tersendiri, tetapi kalau dilakukan dari hati, karena ada kecintaan dan orang yang dibinanya merasa suka, maka pekerjaan *empowerment* tersebut menjadi terasa ringan. Menurut informan ini yang penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat adalah bahwa semua peluang harus disosialisasikan. Sebagai contoh, ketika direktur BHA sudah memilih rumah-rumah untuk penginapan, lalu dia bertanya siapa di antara ibu dan bapak yang mau mempersiapkan catering untuk makan pagi, malam, siang para tamu. Awalnya tidak ada masyarakat yang merespon. Akhirnya direktur BHA mengatakan bahwa kalau tidak ada respon maka dia akan men set catering dengan menghubungkan restoran yang ada di Denpasar agar membuka *catering* di desa ini. Baru kemudian setelah itu diungkapkan, ada 2 ibu yang menyatakan mau menyiapkan catering. Kepada mereka ditekankan agar bila ada tamu pesan makanan dan minuman harus dilayani dengan baik. Artinya, ibu yang bersangkutan masak di rumahnya lalu mengirimkannya ke penginapan wisatawan. Dan Ibu-ibu tersebut pun menyetujuinya.

Bersamaan dengan itu direktur BHA juga meminta kepala desa agar melakukan monitoring jangan sampai setelah dua orang ibu ini kerja keras, kemudian muncul upaya dari yang lain untuk menyainginya. Hal ini penting karena dua orang ibu ini sudah berani mengambil resiko yang mungkin dengan cara berutang ke bank. Jangan sampai dia belum bisa melunasi utangnya di bank sudah disaingi oleh yang lain, yang

berpotensi pada terjadinya perang harga yang berimplikasi pada munculnya kerugian.

Kemudian untuk kebutuhan pemeliharaan *homestay* atau *guest house* diupayakan dilakukan sendiri oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, direktur BHA menanyakan kepada masyarakat yang mau dan memiliki kemampuan memperbaiki rumah, memperbaiki listrik, air, yang bisa menjadi pendamping, dan sebagainya. Dan ternyata ada masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Mekanisme kerjanya yang dibangun adalah bahwa orang-orang tersebut harus selalu *stand by* bila ada pekerjaan yang harus dilakukan segera. Kemudian setiap dia selesai melakukan pekerjaan perbaikan tersebut, dia berkewajiban melaporkannya kepada direktur BHA. Dengan demikian, pada awal bulan dia akan mendapatkan pembayaran dari hasil penyewaan *homestay* dan *guest house* tersebut.

Kemudian direktur BHA juga memberi tantangan lain bagi siapa yang mau menyewakan sepeda. Ternyata tidak ada yang merespon. Yang dikhawatirkan nantinya ketika ada wisatawan asing datang, banyak yang naik sepeda menyewa dari tempat lain, kemudian yang lain ikut-ikutan menyewakan sepeda. Padahal tidak boleh begitu, karena akan berakibat munculnya rasa tidak aman. Jadi jangan sampai nanti kalau sudah berjalan, masyarakat berkelahi karena bisnis, padahal tadinya aman. Hal-hal seperti itulah yang dicoba *disharingkan* kepada masyarakat. Untuk mengatasi itu maka dibuat *awig-awig* atau aturan.

Menurut direktur BHA, menjaga rasa aman itu penting, selain untuk melindungi kedua ibu di atas. Oleh karena itu, dari awal perkenalan ketika pertama datang ke desa ini direktur BHA meminta kesepakatan orang desa bahwa kalau mau dibantu, harus ada komitmen. Dia mengatakan pada masyarakat bahwa bila masyarakat memberi 7 maka direktur BHA juga akan memberi 7 yakni saptapesona. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa jika ingin mendapatkan tamu wisatawan, maka kampung ini harus aman. Jadi jangan sampai terjadi perkelahian antar banjar, antar RW (karena di Bali suka terjadi perkelahian semacam itu). Kemudian, walaupun sudah aman, belum tentu

turis mau datang, kalau tidak ada ketertiban. Oleh karena itu, mereka diminta menjaga ketertiban kampungnya. Kemudian, alau sudah aman dan sudah tertib, tamu juga belum tentu mau datang, kalau di mana-mana terdapat sampah. Oleh karena itu, desa ini harus bersih. Jadi disitu Direktur BHA mulai duduk sama-sama dan melibatkan semua orang yang hadir. Selanjutnya, kalau sudah bersih tamu juga belum tentu mau datang kalau tidak ada yang dilihat atau tidak indah. Oleh karena itu, masyarakat harus menciptakan keindahan dan mengupayakan penghijauan, sehingga selain indah juga ada rasa sejuk. Meskipun desa ini sudah aman, tertib, bersih, indah, hijau, belum tentu Sekarang tamu sudah mau datang kalau masyarakat tidak ramah atau kalau bicara seperti orang mau berkelahi. Oleh karena itu, mereka diminta menjaga keramah tamahan terhadap tamu. Dan yang terakhir, artinya satu yang terakhir yang harus disiapkan adalah bagaimana agar tamu tamu yang datang mau kembali berkunjung. Untuk itu masyarakat harus mampu memberikan satu kenangan. Kalau semua sudah terpenuhi maka berarti sudah *Sapta Pesona*. Yang paling penting dan menjadi tekanan bahwa yang bisa menciptakan *Sapta Pesona* itu adalah masyarakat desa itu sendiri, bukan pihak luar desa. Yang bisa dilakukan oleh pihak luar, seperti direktur BHA ini, hanya memberi pembinaan atau arahan bagaimana memanage desa itu, mulai dari mana, memasarkannya, mencari bantuan modal.

Sebetulnya prinsip direktur BHA dalam melakukan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) relatif sederhana yakni, menciptakan situasi kebersamaan sehingga semua harus dilakukan bersama-sama, dan pembagian hasil pun dinikmati bersama. Sehingga, misalnya, ketika ada tamu datang menginap biasanya dikemas dalam satu paket. Katakanlah harga paket menginap satu malam adalah 400 ribu rupiah. Dari jumlah uang tersebut kemudian disisihkan, misalnya, untuk membayar listrik, air, dan laundry pemilik rumah tempat menginap sebesar 100 ribu rupiah. Untuk menyiapkan bahan satu kali makan pagi untuk 2 orang, misalnya, disisihkan 50 ribu rupiah. Kemudian sisanya sebesar 250 ribu rupiah adalah untuk dibagikan seperti kepada ibu-ibu yang direkayasa sedang mengangkat beban berat kemudian difoto

dengan wisatawan, orang yang membuat makanan, dan sebagainya. Semua itu didistribusikan pada akhir bulan. Jadi ada beberapa orang yang mempunyai *income* tambahan. Sementara Direktur BHA sendiri tidak mengharapkan apa-apa. Benefit yang diperoleh BHA paling tidak hanya memiliki workshop, mendapat semua informasi langsung dari pemerintahan, karena kalau ada undangan dari pemerintahan selalu diundang. Dengan demikian, bila ada peluang training dari pemerintah bisa mengirim, misalnya, staf di *level supervisor* untuk dipromosikan lebih lanjut

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat ini BHA menggunakan prinsip konservasi. Oleh karena itu, direktur BHA selalu memberitahu masyarakat bahwa kalau rumahnya mau ditinjau oleh BHA, maka rumah tersebut harus autentik. Jadi sebelum melakukan pembongkaran atau renovasi rumahnya harus bertanya dulu kepada panitia atau ke direktur BHA, apakah boleh dibongkar atau tidak.

Setelah dilakukan pembinaan desa ini sekarang menjadi hijau, lebih bersih, anak-anak bisa menari dan sanggarnya pun hidup. Di desa ini ada empat sanggar tari tetapi yang hidup hanya satu yaitu yang ikut dalam program *community based tourism* ini, sedangkan yang lainnya mati. Namun demikian kebersamaan masyarakatnya harus selalu dipantau dan dimotivasi untuk memastikan bahwa meski sudah semakin banyak tamu yang datang, mereka masih tetap bersatu dan sama-sama mendapat bagian hasil, sehingga semuanya berjalan aman. Pemantauan ini penting karena yang menjadi tantangan Sekarang biasanya orang desa ingin cepat kaya tapi tidak mau berjuang. Oleh karena itu, kalau sudah ada satu orang atau lebih yang ingin lebih hebat dari yang lain, maka hal itu harus diwaspadai.

Selain desa Bedulu, ada satu desa lagi di Ubud yaitu desa Mas di mana ada satu jalan yang semua sisinya terdiri dari rumah-rumah orang kaya, seperti pengusaha mebel, exportir dan sebagainya. Padahal dibelakang rumah-rumah tersebut masyarakatnya masih miskin. Oleh karena itu, sekarang ini direktur BHA sedang mencoba memadukan

bagaimana agar orang-orang kaya tersebut bisa memberikan rezeki atau mensponsori orang-orang miskin tersebut.

5.4.3.1 Atraksi Wisata dalam Pengembangan *Community Based Tourism* dan *Community Empowerment* BHA di Desa Bedulu

Di dalam pengembangan *community based tourism* eksistensi Puri yang ada di suatu desa Bedulu menjadi pertimbangan sebagai salah satu atraksi wisata. Hal ini penting karena dalam historical Bali puri merupakan rumah keluarga raja-raja atau bangsawan yang sangat berpengaruh di Bali. Kondisi mereka dulunya adalah orang-orang kaya. Tetapi setelah adanya kebijakan pemerintah tentang *land reform*, maka tanahnya habis dibagi-bagi ke masyarakat. Akibat pemotongan tanah tersebut, banyak puri sekarang yang tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk merenovasi pura, tempat ibadahnya, atau memperbaiki rumahnya. Oleh karena itu, direktur BHA berinisiatif memanfaatkan puri tersebut, atas persetujuan pemilik puri, untuk menarik wisatawan datang ke desa yang bersangkutan. Selain itu alasan dimanfaatkannya puri dalam *community empowerment* adalah karena di situ sudah ada bangunan-bangunannya yang tertata dengan rapih yang menarik untuk wisatawan sehingga tidak membutuhkan investasi besar. Puri juga dimanfaatkan untuk memudahkan wisatawan mencari alamat karena lokasi puri tentunya dikenal baik oleh seluruh masyarakat desa. Meskipun demikian, ijin dari pemilik puri menjadi faktor penentu karena meskipun memiliki kamar, belum tentu pemilik mau purinya digunakan untuk menginap wisatawan. Karena di Bali kadang-kadang masih ada orang yang percaya tempat ini disucikan.

Dalam operasionalnya, puri tersebut digunakan sebagai tempat *check in* dan *check out* tamu. Artinya ketika ada wisatawan yang datang ke desa Bedulu, maka, sesuai dengan adat istiadat yang berlaku, mereka mengatur kegiatan wisatanya di puri. Pertama, tamu yang datang dibawa ke puri dulu. Baru kemudian tamu-tamu tersebut didistribusi untuk menginap di rumah-rumah (*homestay*) penduduk. Sementara puri dimanfaatkan tempatnya untuk *cultural event*, seperti tari-tarian. Jadi

masyarakat datang ke puri untuk menari atau kegiatan kultural lainnya, dan pulanginya dia mendapatkan uang yang seolah-olah diberikan oleh pemilik Puri, padahal uangnya dari wisatawan yang datang. Jadi masyarakat masih memiliki rasa hormat. Di lain pihak diharapkan wisatawan memiliki kebanggaan dan kenangan karena bisa makan malam dan berphoto dengan pangeran (*prince*). Bersamaan dengan itu puri tersebut juga bisa dimanfaatkan dari pada purinya rusak hancur percuma.

Untuk mengisi kegiatannya, pagi harinya wisatawan yang tinggal di rumah penduduk tersebut diajak berkumpul dan diajak jalan-jalan melihat apa yang terjadi di masyarakat. Misalnya, sesudah makan pagi wisatawan diajak mengunjungi rumah orang pembuat gerabah, setelah itu diajak jalan lagi melihat peninggalan purbakala yang ada di rumah penduduk sehingga dia bisa melihatnya, lalu diajak pergi lagi ke rumah pembuat makanan jajanan Bali yang dimasak di rumah penduduk dan dijual di pasar, kemudian dia pergi lagi ke satu tempat obyek wisata ada relief melalui sawah. Pada saat turis lewat di situ, agak sedikit direkayasa, ibu petaninya diminta agar nanti dia mendekat sambil mengangkat sesuatu dikepalanya (karena ibu-ibu di Bali relatif kuat-kuat) sehingga bisa difoto dengan turis yang bersangkutan. Setelah turisnya bercakap cakap sedikit dilanjutkan pulang, tetapi dalam perjalanan pulang tersebut diajak mampir dulu di sekolah SD. Mereka biasanya paling senang saat mengunjungi sekolah ini, terutama wisatawan Eropa, khususnya Perancis. Mereka melihat bagaimana guru SD tersebut mengajar, kemudian berkomunikasi dengan murid-murid sekolah karena biasanya anak-anak SD tersebut menegur hangat kepada wisatawan asing. Setelah selesai dari sekolah itu baru kemudian diajak jalan lagi untuk makan siang. Tempat makan biasanya bukan di rumah penduduk tetapi ditetapkan di satu lokasi, biasanya di restoran di desa.

Kemudian pada sore harinya para wisatawan tersebut diajak minum kopi sambil melihat anak-anak latihan tari, bapak-bapak yang mengelus-elus ayam atau pura-pura adu ayam. (kebiasaan di bali suka ada adu ayam). Kemudian malam harinya diajak makan di Puri sambil menyaksikan tarian dari anak-anak sekolah yang telah dikunjunginya.

Mereka bisa melihat anak-anak tersebut berhias, sehingga wisatawan itu melihat bagaimana mereka berdandan menggunakan baju ibunya sampai dia menari.

Deskripsi di atas memperlihatkan bahwa pada prinsipnya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, sedapat mungkin harus dari masyarakat dan untuk masyarakat. Kemudian pihak fasilitator yang melakukan pemberdayaan hendaklah menjaga kepercayaan masyarakat, tidak boleh menyalah-gunakan kepercayaan yang telah mereka berikan. Fasilitator juga harus mengambil peran membentengi mereka melalui kesadaran terhadap masyarakat agar peluang yang ada tidak jatuh ke orang luar, atau melepas aset produktif kepada orang luar. Hal ini penting karena kenyataan sekarang semua orang cenderung *money oriented*, hanya saja harus dipikirkan suatu cara agar jangan karena demi mendapatkan uang tindakan yang dilakukan masyarakat tidak berdasarkan pertimbangan yang matang.

Sebagai catatan, keberhasilan dari direktur BHA dalam melakukan *community empowerment* melalui pengembangan *homestay* dan *guest house* di Desa Wisata adalah karena memiliki latar belakang perhotelan. Oleh karena itu, dia mampu mengaplikasikan sistem hotel ke desa. Artinya, dia mengelola desa itu seperti mengelola hotel. Hal itu juga didukung oleh keterbukaan masyarakat yang bisa menerimanya dan beruntungnya di Bali ada sekolah tinggi perhotelan yang siap mendukungnya serta memiliki banyak relasi. Dengan demikian, sampai sejauh ini dia tidak mengeluarkan banyak biaya untuk pemberdayaan tersebut.

Memang belum ada evaluasi untuk melihat seberapa besar perubahan ekonomi masyarakatnya setelah program ini berjalan. Satu hal yang perlu dilakukan secara hati-hati bila pemegang otoritas mau melakukan *community empowerment* adalah, jangan karena demi programnya dia memberi *iming-iming* macam-macam. Misalnya menjanjikan akan memperbaiki fasilitas dengan syarat masyarakat harus menjaga kebersihannya. Seperti karena harus ada toilet, lalu membuatkan toilet. Tapi kemudian ternyata ketika wisatawananya tidak ada yang

datang maka masyarakat pun merusak fasilitas tersebut. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah memberi *knowhow*, lalu memotivasi mereka untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki sebagaimana contoh yang telah dikemukakan di atas. Pendapatan yang diperoleh dari menyewakan penginapan dan kegiatan kepariwisataan lainnya dikumpulkan dan didistribusikan kepada masyarakat sebulan sekali.

5.4.4 Respons dan Partisipasi BTDC dalam *Community Empowerment* BHA

Konsep *community empowerment* melalui pembangunan *homestay* yang digagas oleh ketua BHA merupakan pemberdayaan masyarakat. Menurut pandangan manajemen BTDC, kalau konsep *homestay* ini dimanfaatkan untuk perusahaan akomodasi sebenarnya peluangnya cukup banyak karena ada marketnya. Artinya tamu hotel yang bosan tinggal di Nusa Dua kemudian mau tinggal di kampung bisa dikirim ke sana untuk tinggal, misalnya, selama tiga hari. Tingkat ketertarikan pengusaha akomodasi hotel terhadap konsep ini tentu tergantung kepada individu dari *decision makernya*. Kalau kepedulian mereka terhadap CSR memang tinggi maka dengan mengirim tamu ke *homestay* selama tiga hari untuk membantu masyarakat atau *community empowerment* tentu tidak akan mengurangi keuntungan hotel itu.

Sejauh ini diadopsi atau tidaknya konsep *community empowerment* melalui pengembangan *homestay* oleh para pengusaha akomodasi atau hotel sifatnya masih individual, dalam artian bahwa BHA sebagai asosiasi tidak memaksa anggotanya untuk mengadopsi konsep ini. Namun demikian BHA mulai mensosialisasikan dan mengkampanyekan konsep ini di hotel-hotel yang tergabung di dalamnya. Dalam konteks ini PT BTDC pun turut berpartisipasi mengkampanyekan konsep tersebut kepada hotel-hotel yang ada di Nusa Dua dengan mengkampanyekan bahwa hotel tertentu mempunyai binaan di desa itu. Dalam hal ini PT BTDC memang tidak bisa memaksakan karena PT BTDC tidak memiliki hotel melainkan hanya pengelola kawasan. Namun demikian PT BTDC punya *goodwill* karena konsep *community empowerment melalui homestay* tersebut dianggap bagus

sehingga PT BTDC ikut membantu menggulirkannya. Atas upaya itu, GM hotel besar yang memiliki kepedulian menjadi intens sehingga selama ini ada beberapa hotel yang sudah terjun ke sana, seperti hotel Melia, dan Amadan di Singaraja nama hotelnya cukup besar.

Khusus hotel-hotel di Nusa Dua yang telah mendapat penghargaan THK (Tri Hita Karana) Gold, Platinum pasti mempunyai kepedulian dengan *community empowerment* melalui pengembangan *homestay* di masyarakat tersebut. Walaupun marketnya agak berbeda, namun GM hotel yang bersangkutan memiliki kebijakan sehingga rela mengorbankan 4-5 tamunya untuk dikirimkan ke *homestay* tersebut untuk menginap beberapa malam. Tentu saja pengiriman tamu tersebut tergantung juga kepada kemauan wisatawannya, karena untuk itu ada segmen khusus yakni *special interest* yang ingin di desa. Namun meskipun ada tamu yang mau tinggal di *homestay*, tetapi biasanya tamu tersebut menginginkan kamar mandi yang nyaman dan bersih. Selain itu, selama berapa hari tamu yang bersangkutan menginap di *homestay* maka yang melayani atau menangani tamu tersebut adalah pihak travel agent, karena dalam bisnis pariwisata yang memiliki tamu adalah travel, bahkan hotelpun tidak memiliki kuasa.

Sosialisasi program *community empowerment* dengan *homestay* ini biasanya dilemparkan ke forum pada rapat umum executif BHA. Kadang sosialisasi tersebut juga disampaikan ketika BHA melakukan rapat dengan PT BTDC dan juga dengan pihak pemerintah di mana mereka sering mengadakan pertemuan. Selain itu sosialisasi juga disampaikan saat ada pertemuan komunitas, karena di Bali banyak komunitas perhotelan yang salah satunya adalah *Bali Tourism Friend* yg terdiri dari para *owner* hotel yang mempunyai kepedulian terhadap Bali seperti, bagaimana melestarikan kultur Bali, bagaimana membantu masyarakat desa di Bali yang kurang mampu. Dengan adanya kesadaran itu maka jika *owner* hotel merasa lebih mampu, mereka mempunyai pikiran dan keinginan untuk membantu dan menggagasnya. Namun program membantu *homestay* milik masyarakat tersebut belum masuk dalam sistem karena di Bali orang yang mempunyai *homestay* di daerah-daerah tujuan wisata jumlahnya relatif banyak.

5.4.5 Respons Pemerintah Daerah terhadap *Community Empowerment* BHA

Dalam kaitan dengan *community empowerment*, sebenarnya pembuatan program seperti pengembangan *homestay* yang dikelola masyarakat memiliki peluang untuk dikembangkan. Namun demikian Dinas Pariwisata propinsi Bali tidak membuat dan melakukan program pelatihan semacam untuk pengelolaan *homestay* itu. Yang melakukan pembinaan dan pelatihan pengelolaan *homestay* justru muncul dari pihak swasta, seperti yang dilakukan oleh *Bali Hotel Association*. Dalam konteks itu, informan mengatakan bahwa bantuan pemberdayaan dari Pemda tidak diarahkan kepada pemberdayaan seperti *homestay* itu melainkan melalui lokakarya. Karena adanya keterbatasan anggaran, maka Dinas Pariwisata tidak bisa seperti swasta memberikan bantuan furniture. Melalui loka karya itu Pemda hanya dapat memfasilitasi seperti ke BHA. Tindak lanjutnya diserahkan kepada BHA yang akan melihat seberapa besar potensi yang dimilikinya, karena kalau potensinya rendah, misalnya hanya beberapa orang saja yang menginap maka dari segi *business* kurang menguntungkan.

Dinas Pariwisata Propinsi memandang bahwa program pengembangan *homestay* yang dilakukan BHA sebagai suatu hal yang positif asalkan alokasi pendapatannya seimbang. Hal ini digaribawahi, oleh informan dari Dinas Pariwisata, jangan sampai BHA mendapat lebih banyak dari desa. Karena dalam pengembangan *homestay* ini BHA melakukan perjanjian dengan Desa Wisata mengenai bagi hasil perolehan yang mereka dapatkan dari operasional *homestay* itu. Pendapatan dari *homestay* itu dibagi tiga yakni pengelolanya (yayasan yang bekerja sama dengan desa), BHA dan pemilik *homestay*. Pembagian pendapatan *homestay* tersebut harus ada keseimbangan dan keadilan antara BHA dengan desa itu jangan sampai penghasilannya agak timpang, karena yang mengerjakan semua adalah orang desa. Dalam hal ini pemilik rumah yang dijadikan *homestay* harus menyiapkan segala sesuatunya. Padahal dalam satu pekarangan rumah ada beberapa unit rumah yang disewakan sebagai *homestay*, atau ada sebagian kamar yang disewakan, sehingga penyiapannya membutuhkan tenaga. Dalam

konteks ini dia mensinyalir bahwa profit sharing pendapatannya tidak seimbang, dalam artian BHA mendapat porsi pendapatan yang lebih besar.

Namun ketimpangan pembagian pendapatan tersebut baru bersifat dugaan karena nyatanya pihak Dinas Pariwisata tidak memiliki data yang menunjukkan kebenaran hal itu. Bahkan diakui oleh informan dari Dinas Pariwisata bahwa ketika dia bertemu dengan keluarga pemilik *homestay* selama ini, pada dasarnya mereka merasa senang. Dengan adanya pemberdayaan *homestay* ini respons masyarakat memang bagus. Hanya saja, menurut responden, tidak cukup hanya sekedar merasa senang, karena paling tidak uang yang masuk harus dapat dinikmati oleh masyarakat desa. Yang diinginkan Dinas Pariwisata adalah agar supaya masyarakat mendapatkan hal yang lebih baik, terutama perekonomiannya. Sementara ini dia berasumsi bahwa pihak BHA pasti akan menikmati hasil penjualan *homestay* tersebut terus menerus, sementara pemilik *homestay* belum tentu, karena tergantung dari huniannya. Oleh karena itu, pembagian kontribusinya harus diatur supaya adil.

Yayasan pengelola *homestay* tersebut dibentuk di desa yang bersangkutan oleh BHA, dan terdiri dari orang-orang dari desa, sedangkan pemilik *homestay* bisa orang di luar yayasan atau bisa juga anggota yayasan. Misalnya bila ada 10 *homestay*, bisa saja hanya dua atau tiga pemilik yang masuk yayasan, tapi yang memasarkan *homestay* itu tetap BHA. Implikasinya, karena yang menjual *homestay* tersebut BHA, dan bahkan mungkin saja kalau tidak ada BHA *homestay* tersebut tidak laku, maka akan tercipta ketergantungan yang tinggi kepada BHA. Akibatnya posisi pemilik *homestay* menjadi sulit baik dalam *profit sharing* maupun penentuan harga jual karena *bergaining positionnya* rendah.

Deskripsi di atas memperlihatkan adanya pandangan yang cenderung negatif dari Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pariwisata, terhadap *community empowerment* yang dilakukan oleh direktur BHA. Tampaknya pandangan tersebut lebih didasari oleh kecurigaan karena

melihat bahwa BHA dijalankan oleh pengusaha yang tentunya berorientasi bisnis untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Kondisi ini tentunya patut disayangkan karena akan berimbas pada munculnya disharmoni antara sektor swasta dengan sektor swasta dalam melakukan *community empowerment*. Idealnya semua *stakeholder* berupaya mengembangkan sinergi daripada kecurigaan agar *community empowerment* yang dilakukan dapat berjalan dan mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Hal ini sebenarnya sangat mungkin untuk dilakukan bila saja Pemerintah Daerah mau melibatkan diri dalam program *community empowerment* yang dilakukan oleh pihak swasta, khususnya dalam hal ini sektor akomodasi. Untuk keterlibatan itu tentunya perlu ada upaya yang proaktif dari Pemerintah Daerah, dalam arti bahwa untuk keterlibatan tersebut dia tidak hanya bersifat pasif menunggu untuk diundang. Yang terjadi, tampaknya, Pemerintah Daerah mencoba menghindari keterlibatannya dalam *community empowerment* melalui pengembangan *homestay* tersebut dengan alasan bahwa desa yang dikembangkan tersebut tidak termasuk dalam skala prioritasnya. Hal ini juga diakui oleh informan dari masyarakat lokal yang mengatakan bahwa tidak ada bantuan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata terkait *homestay* tersebut, baik yang sifatnya material maupun imaterial. Padahal seharusnya apa pun dan di manapun *community empowerment* dilakukan oleh stakeholder, harus mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah, sejauh itu mampu memberdayakan masyarakatnya. Dengan demikian, Pemerintah Daerah memosisikan dirinya sebagai *agent of development* sebagaimana posisi yang seharusnya dilakukan.

Dengan tidak terlibatnya Pemerintah Daerah dalam *community empowerment*, khususnya melalui pengembangan *homestay*, tersebut, maka wajar bila yang berkembang adalah kecurigaan, karena Pemerintah Daerah tidak mengetahui persis dinamika yang sebenarnya terjadi. Untuk mengatasi persoalan semacam itu maka sebaiknya Pemerintah Daerah melibatkan diri atau melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat yang peduli dan melakukan *community empowerment* di daerahnya, tanpa harus dihadap-hadapkan dengan

kebijakan tentang prioritas daerah. Dengan demikian, diharapkan bahwa *community empowerment* dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

Perkembangan industri akomodasi di Bali membuka peluang ekonomi bagi masyarakat seperti peluang di bidang pangan, tekstil, pasar seni, seni budaya, dan sebagainya. Masyarakat di sekitar kawasan akomodasi pariwisata tampak turut menikmati perkembangan yang terjadi dengan membuka UKM di berbagai bidang ekonomi. Misalnya di Nusa Dua, dengan berkembangnya akomodasi perhotelan dapat mendorong masyarakat yang bisa berbisnis seperti membangun toko. Dengan banyaknya hotel berbintang yang beroperasi di Bali sebenarnya sangat potensial dalam upaya memberdayakan masyarakat. Secara sederhana hal itu bisa dilakukan oleh sektor akomodasi kalau saja mereka memanfaatkan potensi lokal di Bali, termasuk hasil kerajinan, pertanian, seni budaya, tekstil, dan sebagainya. Sayangnya hal seperti itu tidak terjadi karena, untuk memenuhi kebutuhan hotel berbintang tersebut umumnya didatangkan dari luar.

Sebenarnya untuk mengatasi persoalan itu bisa dilakukan melalui pembuatan kebijakan pemerintah untuk menggunakan produk lokal atau dalam negeri. Namun kebijakan tersebut harus ditindak lanjuti dengan pembentukan mekanisme yang mengatur sistem produksi, standar kualitas produksi, kontinuitas produksi, distribusi dan pemasaran, dan pihak-pihak yang diberi tanggung jawab untuk memfasilitasi dan menanganinya.

Kebijakan semacam itu penting karena sebenarnya sektor akomodasi secara langsung sudah berupaya memberdayakan komunitas yang ada di sekitarnya dengan cara memberi peluang kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di hotel atau membuka gerai kerajinan di hotelnya. Masalahnya, kadang-kala masyarakatnya yang belum siap, karena *supply* ke hotel memerlukan kontinuitas, kualitas, dan standard yang belum mampu dipenuhi oleh masyarakat. Akibatnya,

peluang yang diberikan oleh pengusaha akomodasi tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha yang kuat permodalannya. Implikasinya, komunitas penduduk asli hanya mampu memanfaatkan peluang yang diberikan pengusaha akomodasi tersebut secara minimal atau hanya menjadi pedagang kecil pinggir.

Untungnya komunitas lokal masih tetap bisa *survive* karena *outlet*nya tidak terpaku pada sektor akomodasi saja. Biasanya mereka memiliki peluang usaha lain. Misalnya mereka bisa mengekspor barangnya karena bertemu langsung dengan wisatawan yang kemudian memesan barangnya untuk di jual kembali di negaranya, atau bahkan mendapat langganan pembeli ketika ikut serta dalam pameran dagang, dan sebagainya. Bahkan semenjak berkembangnya teknologi informasi (IT), kebanyakan pengrajin bergerak perorangan karena bisa mengembangkan sendiri usahanya melalui *website*.

Pada dasarnya perkembangan industri pariwisata harus membawa manfaat pada masyarakat. Dalam konteks ini tentu saja masyarakat harus juga disiapkan ataupun ada kemauan dari pelaku usaha untuk memberdayakan mereka agar dapat turut berpartisipasi dalam perkembangan yang terjadi di industri pariwisata.

Dari sisi *community empowerment*, pemerintah pusat melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan PNPM mandiri. Bila dipersentasekan rasio pembagiannya adalah 40–60, yakni 40 untuk infrastruktur dan 60 untuk pemberdayaan, meskipun ada juga yang 60 untuk infrastruktur 40 untuk pemberdayaan karena tergantung kebutuhan.

Secara keseluruhan sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 jumlah desa di Bali yang sudah mendapat bantuan PNPM Mandiri meliputi 40 desa. Kegiatan pemberdayaan dengan PNPM ini juga bisa bersinergi dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dinas provinsi. Di satu sisi PNPM memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, di sisi lain Dinas Pariwisata melakukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan

kapasitas masyarakat yang terkait dengan kegiatan pariwisata dengan pendanaan dari APBD.

Sayangnya, karena program dan konsultannya turun langsung dari pusat, maka Dinas Pariwisata daerah tidak mengetahui capaian peningkatan ekonomi masyarakat dari program PNPM tersebut. Persoalan lainnya, meskipun pada tataran implementasi di lapangan ada yang bisa bersinergi, namun kadang kala program kementerian (PNPM) tersebut tidak selaras dengan program Dinas Pariwisata. Hal ini terjadi karena ketika kementerian memberikan bantuan PNPM Mandiri, kadang kala programnya dilakukan langsung ke desa tanpa koordinasi dengan Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata tidak diberi-tahukan tujuan dari penggunaan dananya, karena proposal dan implementasinya langsung ke desa. Akibatnya Dinas Pariwisata kesulitan dalam melakukan monitoringnya, termasuk monitoring proposal yang diajukan oleh desa itu. Selain itu, dalam memberi bantuan ke desa-desa pun, kadang terjadi desa yang lebih berpotensi justru tidak mendapat bantuan, sementara yang tidak berpotensi mendapatkan bantuan. Atau, desa-desa di suatu kabupaten banyak mendapat PNPM Mandiri, sementara desa-desa di kabupaten lainnya hanya sedikit atau bahkan tidak ada yang menerima PNPM, sehingga Dinas Pariwisata diprotes oleh kabupaten karena dianggap tidak adil. Padahal kabupaten merasa sudah mengusulkan dan memperjuangkan bantuan PNPM untuk kabupaten tersebut. Tetapi karena yang memiliki kewenangan menentukannya adalah tingkat pusat maka pihak propinsi pun tidak bisa berbuat banyak. Implikasinya, berkembang kecurigaan bahwa kabupaten tersebut mendapat banyak bantuan PNPM karena *incumbent* Menteri Kebudayaan dan Pariwisata berasal dari sana.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui PNPM mandiri yang merupakan program bantuan pusat sebenarnya bagus dan akan bermanfaat bagi daerah. Persoalannya muncul terkait koordinasi antar pusat dan daerah baik menyangkut sistem perencanaan, distribusi program, maupun pemilihan fasilitator yang mendampingi pelaksanaan program di daerah. Oleh karena itu, mengingat bahwa yang diberi bantuan adalah masyarakat Bali, maka

pelibatan instansi daerah dalam proses pemberian bantuan program PNPM menjadi penting, karena yang lebih tahu tentang potensi desa adalah pihak propinsi dan kabupaten. Dengan demikian Dinas Pariwisata bisa melakukan monitoring lebih intens.

Untuk itu ada baiknya bila dilakukan kaji ulang terhadap sistem pemberian bantuan PNPM mandiri tersebut agar lebih melibatkan Pemerintah Daerah, khususnya keterlibatan dalam monitoring programnya. Hal ini tentunya harus menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat untuk memperbaiki sistem pemberian dan pelaksanaan PNPM mandiri di daerah sehingga lebih efisien dan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemda Bali yang merupakan salah satu *stakeholder* kepariwisataan Bali telah memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan *community empowerment*. Pemerintah Daerah Bali, melalui instansi yang ada di bawahnya mengalokasikan dana untuk melaksanakan berbagai program kemiskinan. Bahkan langkah yang dilakukannya sudah melintas ke luar jalur kedinasan di mana pejabat yang menduduki jabatan struktural diberi kewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat miskin dengan menggunakan uang pribadi. Dalam implementasinya, mereka pun memiliki peluang untuk memanfaatkan program baik yang ada di instansinya maupun instansi lainnya dengan cara mengarahkan target sasaran program yang ada di wilayah pemberdayaannya. Dengan demikian dapat diharapkan dapat menciptakan sinergi yang efektif baik antar unit di dalam instansinya maupun antar instansi Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat. Hanya saja, bila ditinjau dari sisi *community empowerment*, program yang dijalankan dalam "Indahnya Berbagi" tersebut tidak terfokus pada upaya pemberdayaan kemandirian masyarakat. Upaya yang dilakukan masih bercampur antara *community empowerment* dan *charity*.

Selain itu, sejauh ini bentuk pemberdayaan di bidang pariwisata belum ada model pemberdayaan ekonomi seperti dana bergulir. Pemberdayaan yang dilakukan lebih pada pelatihan-pelatihan. Bahkan yang dilakukan PNPM di enam desa pun berbentuk kursus-kursus,

belum ada yang berbentuk seperti dana bergulir. Padahal akan lebih sah bila dibuat program uji coba untuk melihat efektivitas dari pelatihan tersebut.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam melakukan *community empowerment* sudah ada kehendak dari Pemerintah Daerah untuk melibatkan *stakeholder* lainnya. Untuk itu Pemerintah Daerah bersama BHA membentuk Bali CBT Center. Dalam hal ini Pemosisian ketua BHA di dalam forum CBT Center harus diapresiasi karena dengan posisinya yang lebih "neutral" dapat diharapkan akan mempermudah forum ini dalam mengajak berbagai pihak untuk turut terlibat dalam kegiatan *community empowerment* yang dilakukan CBT Center. Oleh karena itu, CBT Center berhasil merekrut anggotanya dari berbagai kalangan seperti kelompok sadar wisata (Pok darwis), perwakilan dari Dinas Pariwisata, Kepala Desa, Bupati Gianyar, Ketua PHRI Gianyar, pemilik Sekolah Tinggi Pariwisata, manager BI, cendekiawan dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa CBT Center ini mampu mengakselerasi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata di Bali

Untuk *community empowerment* yang dilakukan oleh sektor akomodasi, sampai dengan saat ini masih sangat sedikit pengusaha hotel yang melakukan *community empowerment*. Di antara yang sedikit itu, yang menarik adalah model pemberdayaan yang dilakukan BUMN PT BTDC. Dalam hal ini pada hakekatnya PT BTDC melakukan *community empowerment* dalam rangka menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi sosial dari BUMN. Dalam kerangka itu, upaya *empowerment* dilakukan mulai dari kebijakan hingga implementasi penyiapan infrastruktur PT BTDC sehingga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat tempatan. Dengan kata lain misi pemberdayaan masyarakat lokal sudah mulai dipertimbangkan dan direalisasikan sejak tahap awal pembangunan kawasan Nusa Dua tersebut sampai dengan operasional industri perhotelan di kawasan pariwisata Nusa Dua. Oleh karena itu, pengembangan kawasan tersebut telah memberikan berbagai dampak langsung terhadap peningkatan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat tempatan.

PT BTDC sebagai pengelola kawasan Nusa Dua Resort memiliki kepedulian terhadap *community empowerment* sejak awal pendiriannya karena dari *master plan* nya diarahkan pada pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya, masyarakat, dan lingkungan.

Deskripsi tentang *community empowerment* dari PT BTDC yang dikemukakan pada bagian terdahulu memperlihatkan bahwa *community empowerment* dari sektor akomodasi sangat mungkin dilakukan secara efektif dengan pola mensinergikan perusahaan BUMN dengan perusahaan swasta. Dalam hal ini PT BTDC sebagai BUMN melalui sistem manajemen pengelolaannya berhasil menggalang dukungan pengusaha akomodasi swasta yang membangun dan menjalankan bisnis perhotelan di kawasan Nusa Dua untuk melakukan *community empowerment*. Sejauh ini, meskipun hotel-hotel yang beroperasi di Nusa Dua merupakan milik swasta tapi PT BTDC tidak mengalami kesulitan/kendala dalam melakukan kerja sama dengan mereka untuk melakukan *community empowerment*.

Kerja sama tersebut dapat berjalan relatif baik, selain karena sistem manajemen PT BTDC, mungkin karena mereka merupakan Hotel Bintang 5 yang dijalankan oleh jaringan operator internasional. Sebagai perusahaan kelas dunia, sudah menjadi *policy* perusahaan bahwa di mana pun mereka bergerak akan melakukan pengelolaan lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan tersebut juga didorong oleh konsep Nusa Dua resort yang ditekankan PT BTDC yakni *the gardener* bali dan *environment friendly* (ramah lingkungan). Penekanan kesadaran akan lingkungan dari PT BTDC ini dapat dikatakan berhasil yang ditandai oleh penghargaan internasional di mana Nusa Dua mendapat penghargaan *green blue* pertama dari PBB yang mensyaratkan bahwa industri pariwisata harus ramah lingkungan.

Selain itu, relatif responsifnya hotel di Nusa Dua terhadap himbuan kerja sama tersebut mungkin juga karena di Bali ada sistem penghargaan TRI HITA KARANA award. Yayasan itu meninjau seluruh

hotel di Bali, artinya baik hotel non bintang maupun non-bintang tetap dipersyaratkan memperhatikan Tri Hita Karana tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya Tri Hita Karana tersebut pengelolaan lingkungan untuk hotel bintang 5 dan bahkan di bawah bintang 5 pun cukup bagus.

Meskipun sedikit hotel yang melakukan *community empowerment*, tetapi untuk kategori CSR umumnya hotel di Bali sudah mulai melakukannya. Dengan adanya program CSR yang diluncurkan oleh sebagian besar hotel tersebut mengindikasikan bahwa pengusaha akomodasi hotel sudah memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya. Hal ini tentunya harus dilihat sebagai potensi yang dapat diarahkan kepada *community empowerment*. Untuk itu diperlukan intervensi dari para *stakeholder*, terutama Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan dan PHRI yang menaunginya agar CSR perhotelan tersebut dapat diarahkan pada program *community empowerment*, agar tidak hanya bersifat *charity*. Karena bagi investor tentunya lebih peduli pada upaya mendapatkan *profit* yang besar dari pada menekuni *community empowerment*. Oleh karena itu, CSR yang dilakukannya cenderung dilakukan hanya untuk perlindungan diri agar tidak ada gangguan dari lingkungan masyarakat sekitarnya

Model *community empowerment* lainnya yang menarik untuk diperhatikan adalah pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan *homestay* di desa Bedulu yang dilakukan oleh *Bali Hotel Association* (BHA) sejak tahun 2007. Dalam implementasinya, sebelum dikembangkan, pemilik *homestay* diberi pelatihan dulu, kemudian diberi kredit peralatan seperti furnitur, handuk, seprei bekas hotel yang memang beberapa tahun sekali harus diganti. Dalam hal ini *Bali Hotel Association* membiayai pelatihan tersebut dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Dalam operasionalnya *Bali Hotel Association* bekerja sama dengan desa yang mempunyai potensi pariwisata. Kepada masyarakat desa yang tertarik kemudian diberikan bantuan fasilitas untuk kebutuhan pengembangan *homestay*, termasuk permodalan dan teknis pengelolaannya. Untuk itu masyarakat yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan pengembalian pinjamannya dalam waktu yang relatif panjang melalui profit sharing.

Gagasan kegiatan BHA melakukan *community empowerment* dengan cara membangun *homestay* di Bedulu memungkinkan karena rumah desa milik orang Bali di kampung ada beberapa yang kosong. Pemilik rumah tersebut pindah bekerja atau pun mencari peluang usaha di sektor industri pariwisata di Bali Selatan. Ada juga punya rumah besar yang merupakan rumah keluarga. Karena masing-masing anggota keluarganya sudah memiliki rumah, sehingga sehari-harinya kosong atau hanya dihuni oleh satu anggota keluarga kecil yang masih tinggal di kampung untuk mengurus urusan budaya di kampung.

Karena umumnya orang Bali bekerja di industri pariwisata, maka bagi orang yang relatif mampu biasanya kondisi bangunan dan ruangan atau rumahnya sudah dibuat mirip mengikuti kondisi di tempat kerja mereka, sehingga rumahnya relatif layak untuk dijadikan *homestay*. Selain itu halaman rumah orang Bali umumnya luas dan asri dengan balai di sana sini. Secara arsitektur pun, pada umumnya, dalam konsep *balinese compound*, rumah orang Bali relatif lengkap karena fungsi rumah itu ada fungsi rumah tinggal orang tua, fungsi rumah tinggal untuk anak remaja, rumah tinggal untuk umum, yang dibangun seperti bungalow-bungalow kecil. Selain itu juga ada masing-masing satu bangunan untuk upacara, untuk orang meninggal, untuk orang ngaben, dan untuk tempat ibadah. Kemudian ada juga konsep bangunan dapur yang terpisah oleh halaman terbuka, sehingga dari tempat tidur ke dapur harus jalan agar ada kegiatan olah raganya dan juga memperhitungkan aspek keselamatan. Dalam dogma yang mengedukasi orang Bali, api jangan digabung dengan manusia karena berbahaya dan kalau terbakar tidak semuanya kena.

Oleh karena itu, rumah orang Bali yang normal paling tidak ada lima blok, ada kamar yang disebut “gedong” untuk orang tua induk di sebelah utara, kemudian yang paling utara gedong untuk tidur orang yang paling dihormati atau paling dituakan, di tengah-tengah ada balai upacara yang terbuka kosong dan tidak ditinggali sehari-hari yang juga dijadikan penyimpanan abu orang meninggal. Tempat untuk anak muda diposisikan di bale dapur sebelah barat yang agak tertutup, demikian juga tempat anak-anak. Sementara untuk hewan peliharaan dalam konsep Bali

biasanya dipisah di halaman belakang. Tetapi untuk sapi peliharaan ditempatkan di tegalan atau tempat lain yang tidak menempel dengan rumah. Namun bila mereka yang tidak memiliki lahan yang cukup maka kandangnya ditempatkan menempel dengan rumah tetapi di pojok dekat dapur.

Dengan arsitektur dan tata ruang seperti itu maka yang perlu dilengkapi untuk kebutuhan *homestay* mungkin hanya kebersihan kamar mandi, higienisnya, dan komponen lain seperti itu. Dengan demikian untuk membuat *homestay* ini tidak begitu sulit karena yang dijadikan *homestay* adalah rumah yang agak representatif. Artinya hanya beberapa bagian rumah yang perlu diubah menjadi kamar lengkap dan ada kamar mandinya sehingga bisa dialihfungsikan menjadi *homestay*.

Dengan melihat kondisi dan komposisi rumah yang umum di masyarakat Bali dan melihat respons positif yang diperlihatkan oleh masyarakat Bedulu yang berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata melalui pembangunan *homestay* seperti dideskripsikan terdahulu, maka dapat dikatakan bahwa model pemberdayaan masyarakat dengan pola tersebut sangat potensial untuk dikembangkan di Bali. Untuk itu tentunya butuh keterlibatan berbagai *stakeholders*, terutama yang berkecimpung dalam dunia pariwisata seperti pengusaha dan asosiasi pengusaha akomodasi, instansi pemerintah yang berkaitan dengan urusan kepariwisataan, dan LSM pariwisata.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah bahwa berbagai *stakeholder* pariwisata tersebut cenderung bergerak sendiri-sendiri, tanpa koordinasi satu sama lain dan di tingkat pemerintahan pun masih ego sektoral. Implikasinya upaya *community empowerment* menjadi inefisien dan inefektif. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk mensinergikan para pihak melalui koordinasi dan konsolidasi yang produktif. Dalam kaitan ini, yang paling kompeten melakukan hal itu adalah Pemerintah Daerah karena dialah yang memiliki otoritas menjalankan pemerintahan di daerah. Pemerintah harus mengambil peran fasilitator baik melalui pembuatan kebijakan maupun implementasinya. Perlu ada penyamaan visi di antara kepala daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Bila ini bisa

diwujudkan dan dibarengi dengan komitmen yang kuat maka akan lebih mudah menembus dan membangun kerja sama pada level yang di bawahnya, sehingga tidak mustahil dapat dilakukan sinergi di antara para pihak dalam melakukan *community empowerment* yang efisien dan efektif. Bahkan ruang untuk membangun sinergi tersebut sebenarnya sudah tersedia dalam mekanisme penyusunan program yang baku di Pemerintah Daerah, yakni musrenbang yang dilakukan mulai level desa sampai dengan propinsi dan bahkan nasional. Hal ini sangat mungkin bisa dicapai dengan syarat ada *political will* dan *good will* dari semua *stakeholder* pariwisata.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Perkembangan industri akomodasi di Bali membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, di bidang pangan, tekstil, pasar seni, seni budaya, dan sebagainya. Masyarakat di sekitar kawasan akomodasi pariwisata tampak turut menikmati perkembangan yang terjadi dengan membuka UKM di berbagai bidang ekonomi.

Dengan banyaknya hotel berbintang yang beroperasi di Bali sangat potensial dalam upaya memberdayakan masyarakat. Secara sederhana hal itu bisa dilakukan oleh sektor akomodasi kalau saja mereka memanfaatkan potensi lokal di Bali, termasuk hasil kerajinan, pertanian, seni budaya, tekstil, dan sebagainya. Sayangnya hal seperti itu tidak terjadi karena, kenyataannya untuk memenuhi kebutuhan hotel berbintang tersebut umumnya didatangkan dari luar.

Sebenarnya sektor akomodasi pariwisata secara langsung sudah memberi peluang langsung kepada komunitas sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau membuka gerai kerajinan di hotel. Masalahnya, kadang-kala masyarakat belum siap memenuhi standard kriteria yang ditentukan hotel. Artinya, *supply* barang/jasa ke hotel memerlukan kontinuitas, dan standard kualitas yang konsisten, namun hal tersebut belum mampu dipenuhi oleh masyarakat. Akibatnya, peluang yang diberikan oleh pengusaha akomodasi tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha yang kuat permodalannya, sehingga komunitas penduduk asli hanya mampu memanfaatkan peluang si sektor akomodasi tersebut secara minimal.

Dalam melakukan *community empowerment*, sudah ada kehendak dari Pemerintah Daerah untuk melibatkan *stakeholder* lainnya. Untuk itu Pemerintah Daerah bersama BHA membentuk Bali CBT *Center* yang dimotori oleh Direktur BHA. Pemosisian ketua BHA di

dalam forum CBT *Center* merupakan langkah yang cerdas karena dengan posisinya yang "netral" dapat lebih mempermudah forum ini dalam mengajak berbagai pihak untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan *community empowerment* yang dilakukan Bali CBT *Center*. Realitasnya, Bali CBT *Center* berhasil merekrut anggotanya dari berbagai kalangan seperti kelompok sadar wisata (pok darwis), perwakilan dari dinas pariwisata, kepala desa, bupati Gianyar, ketua PHRI Gianyar, pemilik sekolah tinggi pariwisata, manajer BI, cendekiawan dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa Bali CBT *Center* akan mampu mengakselerasi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata di Bali.

Yang menjadi persoalan adalah bahwa dalam melakukan *community empowerment* berbagai *stakeholder* pariwisata cenderung bergerak sendiri-sendiri, tanpa koordinasi satu sama lain, dan di tingkat pemerintahan pun masih mencerminkan adanya ego sektoral. Implikasinya upaya *community empowerment* menjadi inefisien dan inefektif.

Untuk *community empowerment* yang dilakukan oleh sektor akomodasi, masih sangat sedikit pengusaha hotel yang melakukan *community empowerment*. Di antara yang sedikit itu, yang menarik adalah model pemberdayaan yang dilakukan PT BTDC yang melakukan *community empowerment* dalam rangka menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi sosial sebagai salah satu tugas BUMN. Pengembangan kawasan tersebut telah memberikan berbagai dampak langsung terhadap peningkatan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat tempatan. Keberhasilan PT BTDC dalam melakukan *community empowerment* dapat dicapai karena misi pemberdayaan masyarakat lokal sudah mulai dipertimbangkan, dirancang dan direalisasikan sejak tahap awal pembangunan kawasan Nusa Dua sampai dengan industri perhotelan di kawasan pariwisata Nusa Dua operasional.

Model *community empowerment* lainnya yang menarik untuk diperhatikan adalah pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan *homestay* di Desa Bedulu yang dilakukan oleh *Bali Hotel Association*

(BHA) sejak tahun 2007. Dalam operasionalnya BHA bekerja sama dengan desa yang mempunyai potensi pariwisata. Implementasinya, sebelum suatu desa dikembangkan, BHA memberikan pelatihan kepada para pemilik *homestay* dan membiayai pelatihan tersebut. Kepada masyarakat desa yang tertarik untuk menjadikan bagian rumahnya sebagai *homestay* diberikan bantuan fasilitas yang dibutuhkan dalam mengembangkan *homestay*, termasuk permodalan dan teknis pengelolaannya. BHA juga memberikan bantuan langsung kepada masyarakat berupa pemberian kredit peralatan seperti furnitur, handuk, seprei bekas hotel besar. Namun untuk itu masyarakat yang bersangkutan diwajibkan melakukan pengembalian pinjamannya dalam waktu yang relatif panjang melalui *profit sharing* sehingga mendidik masyarakat untuk mandiri namun juga tidak memberatkan mereka.

Dilihat dari respons masyarakatnya terhadap pemberdayaan dengan pola pengembangan Desa Wisata atau pembangunan *homestay*, masyarakat tampak sangat antusias dan mendukung. Hal ini diperlihatkan di mana sebelum mereka menyetujui pengembangan desa tersebut, sudah mereka bicarakan dulu di Banjarnya. Ketika memutuskan Desa Bedulu akan dikembangkan menjadi Desa Wisata, masyarakat lokal terlibat langsung dalam pengambilan keputusan tersebut. Sebelum disepakati, gagasan program pengembangan desa tersebut disampaikan dan didiskusikan dulu di banjar desa, mulai dari persyaratan dan renovasi rumahnya sampai pada *profit sharing*, dan sebagainya. Dengan demikian pengembangan *homestay* ini dapat dikatakan digagas dan disetujui oleh seluruh masyarakat desa.

Melihat keberhasilan dan respons positif yang diperlihatkan oleh masyarakat Bedulu yang berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata melalui pembangunan *homestay*, maka dapat dikatakan bahwa model pemberdayaan masyarakat dengan pola tersebut sangat potensial untuk dikembangkan di Bali dan direplikasi di daerah tujuan wisata di luar Bali.

7.2 Rekomendasi

Untuk mendorong *community empowerment*, Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mengarahkan sektor akomodasi menggunakan produk lokal atau dalam negeri. Namun kebijakan tersebut harus ditindak lanjuti dengan penyusunan mekanisme yang mengatur sistem produksi, standar kualitas produksi, kontinuitas produksi, distribusi dan pemasaran, dan pihak-pihak yang diberi tanggung jawab untuk memfasilitasi dan menanganinya.

Pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang mengarahkan pengusaha yang akan mengembangkan sektor akomodasi memasukan *community empowerment* sejak awal rancangannya. Dengan demikian mereka diarahkan melihat *community empowerment* sebagai bagian dari investment, bukan sebagai *cost*.

Meskipun sedikit hotel yang melakukan *community empowerment*, tetapi umumnya hotel di Bali sudah mulai melakukan CSR. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengusaha akomodasi hotel sudah memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya. Namun karena investor tentunya lebih peduli pada upaya mendapatkan *profit* dari pada menekuni *community empowerment*, maka CSR yang dilakukannya cenderung hanya untuk perlindungan diri agar tidak mendapat gangguan dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Terlepas dari itu, kepedulian tersebut tentunya harus dilihat sebagai potensi yang dapat diarahkan kepada *community empowerment*. Untuk itu diperlukan intervensi dari para *stakeholders*, terutama Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan dan PHRI yang menaunginya agar CSR perhotelan tersebut diarahkan pada program *community empowerment*, sehingga programnya tidak hanya bersifat *charity*.

Mengingat adanya ego sektoral dan vested interest yang berkembang di antara stakeholders dalam melakukan *community empowerment*, maka perlu upaya untuk mensinergikan para pihak melalui koordinasi dan konsolidasi yang produktif. Pihak yang paling kompeten untuk melakukan hal itu adalah Pemerintah Daerah sebagai pemilik otoritas dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Pemerintah

harus mengambil peran fasilitator baik melalui pembuatan kebijakan maupun implementasinya.

Berkaitan dengan di atas, perlu ada penyamaan visi di antara Kepala Daerah, dunia usaha, dan masyarakat serta komitmen bersama untuk melakukan *community empowerment*. Dengan begitu diharapkan akan mempermudah dalam membangun kerja sama pada level di bawahnya sehingga menghasilkan sinergi di antara para pihak dalam melakukan *community empowerment* yang efisien dan efektif. Hal ini sangat mungkin bisa dicapai dengan syarat ada *political will* dan *good will* dari semua *stakeholder* pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (1994), *Profil Industri Pariwisata*
- Cohen, Arthur A. and Norman T. Uphoff (1979), *Feasibility and Application of Rural Development Participation*. Ithaca, NY., Rural Development Committee, Center for International Studies, Cornell University
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, (2006), *Rencana strategi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 2005 – 2009*. Jakarta
- Dodson, Rob and J.J. Courtney, (1994), *Ticket to Thailand: A Study of Tourism*, Bangkok, Assumption University Press.
- Fox, M. (1977), “The Social Impact of Tourism: a challenge to researcher and planner”, dikutip dari Alister Mathiensen dan Geoffrey Wall dalam “Tourism: Economic, Physical and Social Impact”
- Gunn, C.A. (1988), *Tourism Planning*, 2nd edition, New York and London, Taylor and Francis.
- http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=16¬ab=16.
- [http://kppo.bappenas.go.id/files/9810RINGKASAN_EKSEKUTIF - BIDANG PARIWISATA.pdf](http://kppo.bappenas.go.id/files/9810RINGKASAN_EKSEKUTIF_-_BIDANG_PARIWISATA.pdf)
- <http://www.terranel.or.id/mitra/p2par/dokumen/masukan1325.pdf>.
- <http://visit-to-indonesia.blogspot.com/2007/09/konsep-dan-definisi-pariwisata.html>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/pariwisata>.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Empowerment#The_process_of_empowerment.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_carrying_capacity

- <http://suarapembaca.detik.com/read/2011/02/08/104850/1562321/471/salah-tafsir-data-kemiskinan>
- Inskip, Edward (1991), *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*. VNR Tourism and Commercial Recreation Series. New York, Van Nonstrand Reinhold.
- John Williamson, August 24, (1999), former MCC Nepal and MCC Indonesia, *Practical Community Empowerment: Concepts, Organizational Issues and the Process*. Email message from Keshab Kumar Pokhrel
- Kumar, Keshab Pokhrel, August 24, (1999), dikutip dari John Williamson, former MCC Nepal and MCC Indonesia, *Practical Community empowerment: Concepts, Organizational Issues and the Process*.
- Laporan Pertanggung jawaban Presiden Republik Indonesia, Agustus, 1993*
- PMB-LIPI (1987), *Aspek Sosial Budaya Pengembangan Industri Pulau Batam*, Jakarta: Dinamika Masyarakat.
- Santosa, Setyanto P. (13 Januari, 2004): Artikel *Mengenal Daya Saing Pariwisata Indonesia*,: http://kolom.pacific.net.id/ind/setyanto_p.santosa/artikel_setyanto_p.santosa/mengenal_daya_saing_pariwisata_Indonesia.html
- Spillane, J. James, (1987), *Ekonomi Pariwisata*, Jakarta, Kanisius.
- Sunario, Wuryastuti, 1987, *Perlu Management Handal Untuk Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Indonesia*, www.geografiana.com/nasional/wisata/belum-optimal-pengelolaan-pariwisata-alam-indonesia.
- Supriyoko, Ki, (2006) Dari International Conference on Cultural Tourism 2006 di Yogyakarta: *Pariwisata Sebagai Pilar Ekonomi*, Yogyakarta.

- Tahajuddin, Ujud, dkk., (1995), “*Aspek Sosial Budaya Industri Pariwisata*”, Jakarta, Seri Penelitian PMB-LIPI.
- Tepelus, Camelia M. (2006), A Model for Multi-stakeholder Partnerships on Human Right in Tourism, dalam Jan Jonker dan Marco de Witte (Editors), *Management Models for Corporate Social Responsibility*, Springer Berlin – Heidelberg, Germany
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1995, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Yoeti, A. Oka, H., Drs., MBA., (1996), *Pemasaran Pariwisata*, Bandung, Angkasa.

